

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun secara terpadu dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sementara itu pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal di atas, pada pasal 263 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMDN. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 41 bahwa tahapan penyusunan RPJMD perlu di susun Tahapan Dokumen RPJMD yang akan menjadi instrumen dalam rangka menuaikan janji politik Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih melalui Penjabaran visi, Misi dan Program Prioritas yang diusung. Oleh karena itu untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal pada semua tingkatan pemerintahan maka proses penyusunan RPJMD ini senantiasa mengacu kepada RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 – 2029 ini disusun berdasarkan 7 (Tujuh) Pendekatan yaitu teknokratis, Partisipatif, Politis, top down dan bottom up, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas bawah dan bawah atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan dari Kampung, Distrik, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional
5. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

6. Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
7. Pendekatan Spasial/ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Dokumen RPJMD ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Selain itu RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 merupakan instrumen dalam rangka menunaikan janji politik Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah terpilih melalui penjabaran Visi, Misi dan program prioritas yang diusung. RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 menjadi dasar perencanaan daerah, sementara Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 adalah strategi khusus yang diintegrasikan ke dalam RPJMD agar program percepatan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

RPJMD Papua Tengah juga menjadi dokumen Penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) Periode 2025-2029 yang dilantik pada tanggal 20 Februari Tahun 2025 dengan Visi *“Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan berkelanjutan.*

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan Antara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
9. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

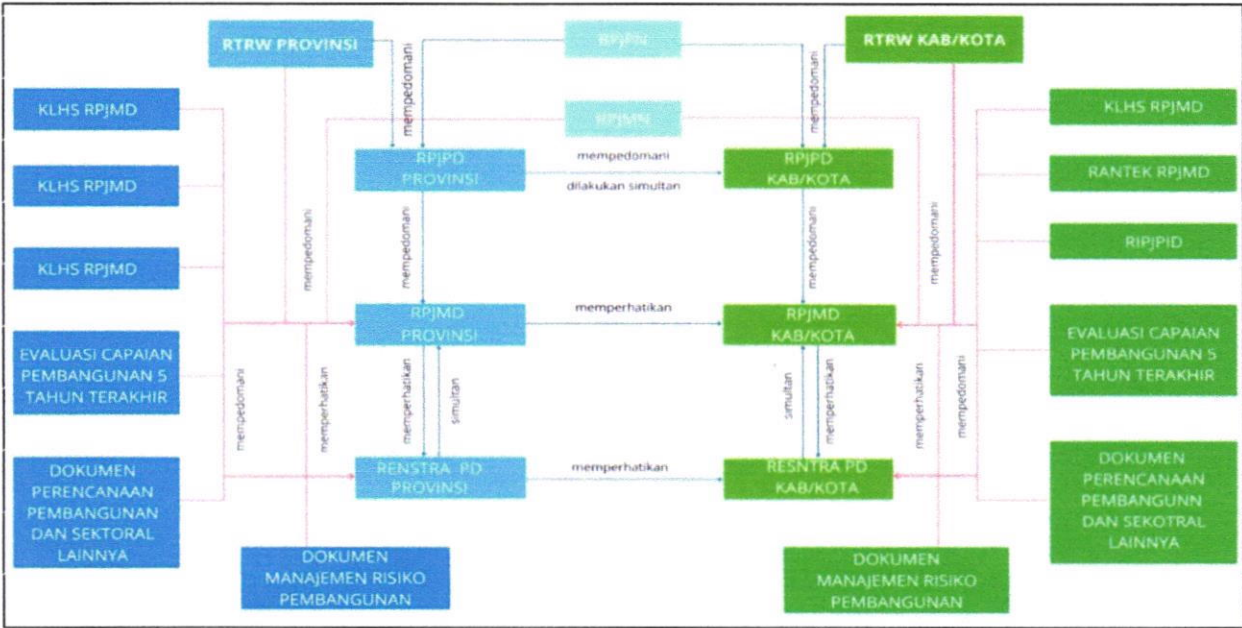
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Pembinaan dan Pengawasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infoemasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 35. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemukthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
- 36. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang pedoman Penyusunan RPJMD;
- 37. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya terutama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut, dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1. 1 Hubungan Antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut.

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah, RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 ini memperhatikan visi, misi, sasaran pokok RPJPD, serta prioritas pembangunan pada tahap RPJPD pertama (2025-2045).

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMDN) Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 memedomani RPJMDN Tahun 2025-2029 terutama visi, misi, tujuan dan sasaran pokok RPJMDN, serta Agenda Prioritas dan arah pengembangan wilayah Provinsi Papua Tengah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, terutama visi, misi, tujuan dan sasaran pokok RPJMD, arah kebijakan dan arah pengembangan wilayah Provinsi Papua Tengah.
4. RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043
Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 memedomani RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043, terutama terkait dengan rencana pola ruang dan program pengembangan wilayah.
5. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang diintegrasikan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk pembangunan Papua Tengah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
6. Dokumen Perencanaan Multi Sektor
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multisektor, seperti Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai/melaksanakan visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 ini sebagai berikut :

1. Menjadi dokumen Penjabaran Visi dan Misi KDH/WKDH dalam menyelaraskan dan menentukan Arah Kebijakan, Sasaran, dan tujuan dokumen perencanaan Daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, optimal, dan sinkron baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah serta antara Pusat dan Daerah;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
4. Menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Tahun 2025-2029

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya;
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.2 Gambaran Keuangan Daerah
 - 2.2.1 Gambaran ringkas Kondisi Keuangan Daerah lima Tahun Terakhir
 - 2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan
 - 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.3.1 Permasalahan
 - 2.3.2 Isu Strategis Daerah
- BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 3.2 Strategi Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - 4.1 Program Perangkat Daerah
 - 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

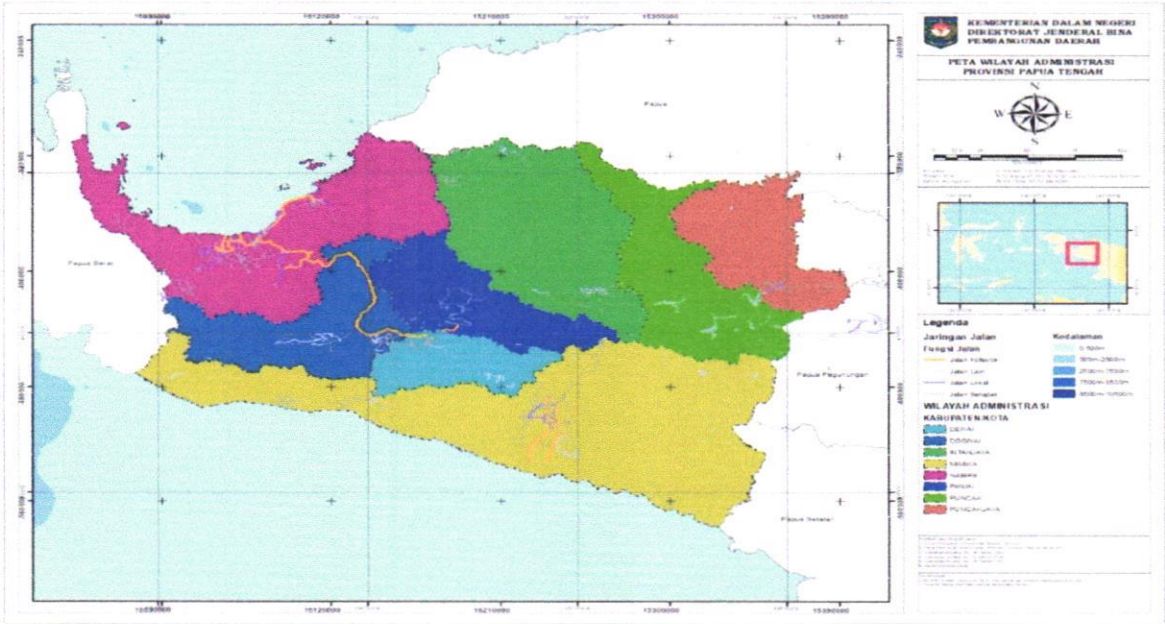
Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di bagian barat, Provinsi Papua Pegunungan di bagian timur, Provinsi Papua di bagian utara dan Provinsi Papua Selatan di bagian selatan. Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 Kabupaten dan memiliki ibukota yang berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten Mimika merupakan wilayah administrasi kabupaten terluas yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 18.298,95 km², sedangkan Kabupaten Deiyai merupakan wilayah administrasi kabupaten terkecil yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 2.846,41 km². Untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah dan batas administrasi Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2025

No	Kab/Kota	Ibukota	Luas (Km2)
1	2	3	4
1	Nabire	Nabire	11.806,09
2	Paniai	Enarotali	5.306,87
3	Puncak Jaya	Mulia	5.986,19
4	Mimika	Timika	18.298,95
5	Puncak	Ilaga	7.701,03
6	Dogiyai	Kigamani	3.792,93
7	Intan Jaya	Sugapa	5.334,45
8	Deiyai	Tigi	2.846,41
Papua Tengah		Nabire	61.072,91

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2025

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan/Distrik, Kelurahan, dan Desa/Kampung menurut Kabupaten 2019-2023

No	Kab/Kota	Kecamatan/Distrik	Kelurahan	Desa/Kampung
1	2	3	4	5
1	Nabire	15	9	80
2	Paniai	24	5	211
3	Puncak Jaya	26	3	299
4	Mimika	18	19	133
5	Puncak	25	-	206
6	Dogiyai	10	-	302
7	Intan Jaya	8	-	97
8	Deiyai	5	-	67
Jumlah		131	36	1.395

Sumber Data : BPS Papua Tengah, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data di atas terdapat 131 Distrik/Kecamatan, 36 Kelurahan, dan 1.395 kampung/desa yang tersebar pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

B. Topografi

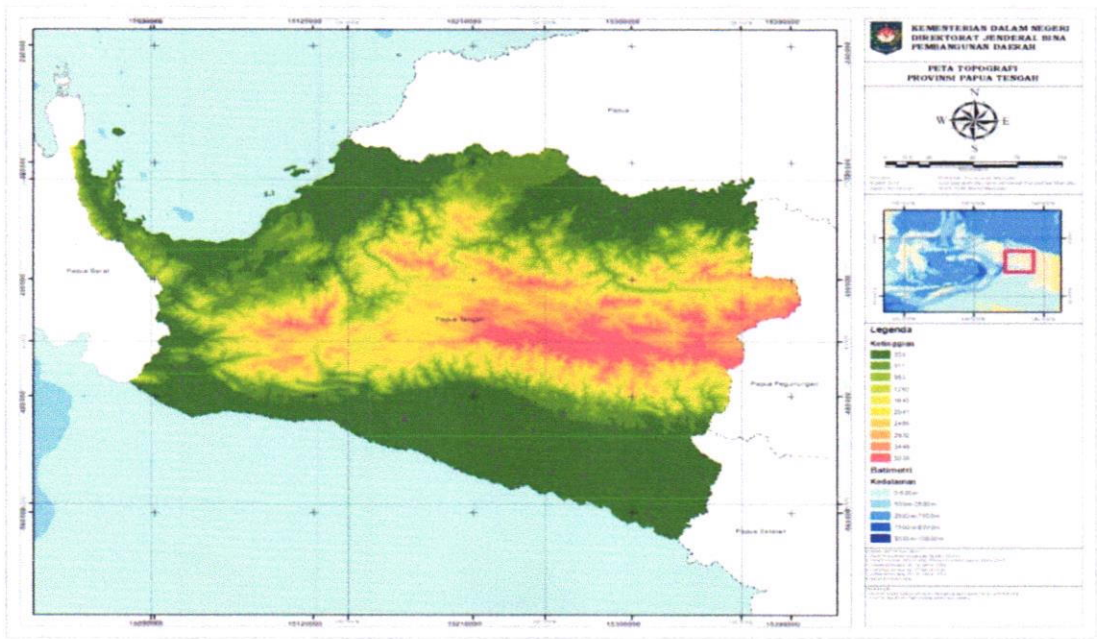
Provinsi Papua Tengah berada di 2 wilayah topografi, yaitu pesisir (dataran rendah) dan pegunungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataran rendah dengan luas mencapai 23.957,80 km2 pada ketinggian <203 mdpl dan memiliki wilayah pegunungan dengan luas mencapai 2.078,18 km2 pada ketinggian 3499-5039 mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 3 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua Tengah

No	Ketinggian	Luas (km2)
1	2	3
1	< 203 m	23.957,80
2	203 m - 511 m	8.222,87
3	511 m - 863 m	5.748,87
4	863 m - 1250 m	4.836,19
5	1250 m - 1643 m	4.535,36
6	1643 m - 2041 m	5.252,62
7	2041 m - 2466 m	4.419,42
8	2466 m - 2930 m	3.553,47
9	2930 m - 3449 m	2.871,60
10	3499 m - 5039 m	2.078,18

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Gambar 2. 2 Peta Topografi Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

C. Hidrologi

Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi 18 Daerah Pengaliran Sungai. Luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terluas adalah Daerah Pengaliran Sungai Mamberamo dengan cakupan seluas 16.669,87 km² sedangkan luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terkecil adalah Daerah Pengaliran Sungai Wondiwoi dengan cakupan seluas 5,31 km². Untuk lebih jelasnya mengenai luas cakupan Daerah Pengaliran Sungai dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

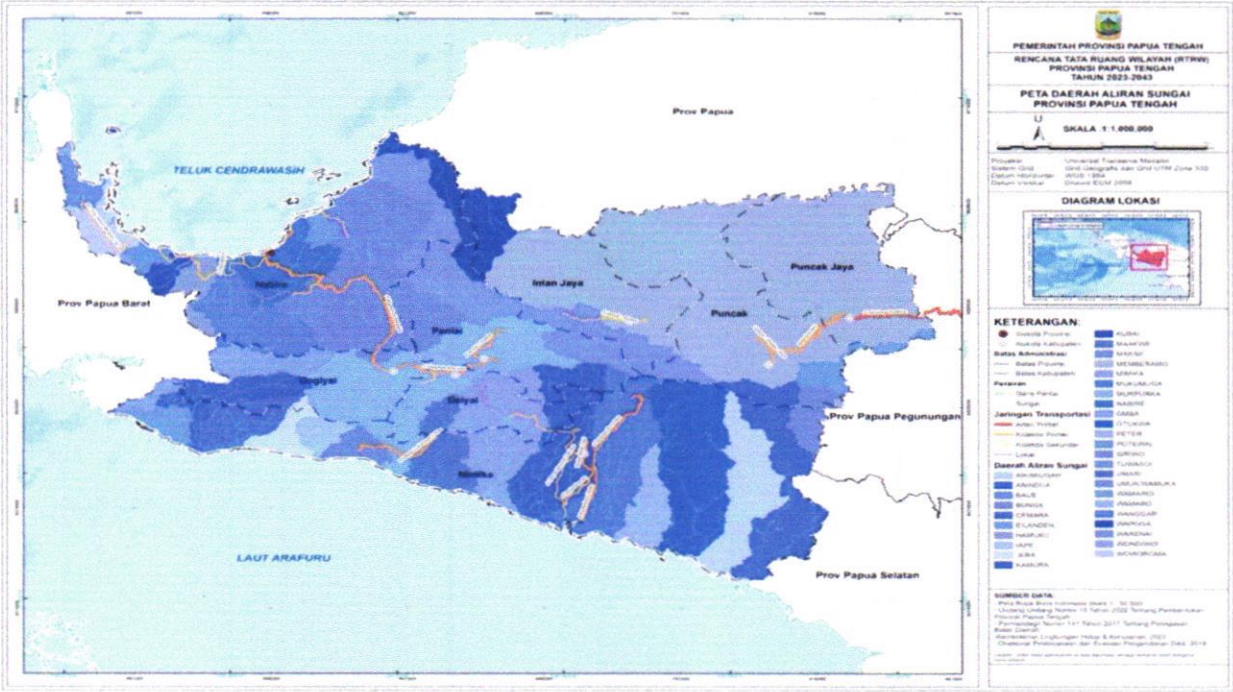
Tabel 2. 4 Cakupan Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
1	Nabire	Baue	40.460,15
		Hamuku	53.213,34
		Kubai	31.331,60
		Makimi	80.827,19
		Murpurka	126,33
		Nabire	136.025,00
		Omba	3.432,61
		Siriwo	362.783,37
		Tuwasoi	26.886,50
		Wamairo	24.644,45
		Wanggar	161.651,57
		Wapoga	72.660,85
		Warenai	123.727,24
		Wondiwoi	5.566,69
		Woworoma	74.966,28
	Luas DAS Nabire		1.180.020,55
2	Paniai	Kamura	51.606,88
		Mamberamo	78,60
		Mimika	19.738,55
		Mukumuga	14.913,84
		Murpurka	162.231,62
		Siriwo	80.230,81
		Wapoga	16.623,27

		Warenai	185.205,18
	Luas DAS Paniai		530.628,75
3	Puncak Jaya	Eilanden	14.670,78
		Mamberamo	585.023,41
	Luas DAS Puncak Jaya		599.694,20
4	Mimika	Aikimiugah	195.815,13
		Anindua	31.039,46
		Bunga	39.841,19
		Cemara	209.879,12
		Iape	38.822,14
		Jera	49.379,79
		Kamura	171.150,84
		Maakwe	91.848,54
		Mimika	109.071,37
		Mukumuga	249.286,27
		Murpurka	42.571,33
		Omba	24.191,87
		Otokwa	316.098,18
		Peter	1.816,00
		Potewal	48.107,43
		Umari	80.598,87
		Umuk/Wamuka	43.343,77
		Wamaro	90.039,79
		Warenai	618,24
	Luas DAS Mimika		1.833.519,35
5	Puncak	Aikimiugah	23,30
		Bunga	18.684,93
		Cemara	40.925,07
		Eilanden	42.376,59
		Mamberamo	635.525,89
		Mukumuga	407,50
		Otokwa	861,76
		Peter	431,27
		Warenai	31.677,67
	Luas DAS Puncak		770.913,98
6	Dogiyai	Anindua	76.118,82
		Iape	19,58
		Jera	4.888,40
		Murpurka	177.024,95
		Omba	79.814,45
		Siriwo	12.599,47
		Umari	21.820,13
		Wanggar	6.764,69
	Luas DAS Dogiyai		379.050,49
7	Intan Jaya	Mamberamo	353.908,13
		Mukumuga	110,75
		Murpurka	49,66
		Wapoga	84.461,77
		Warenai	95.028,91
	Luas DAS Intan Jaya		533.559,21
8	Deiyai	Kamura	43.996,84
		Maakwe	29.017,35
		Mimika	121.625,30
		Mukumuga	0,21
		Murpurka	89.950,75
	Luas DAS Deiyai		284.590,45
Total Luas DAS Provinsi Papua Tengah			6.111.976,98

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043**

Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Papua Tengah



D. Rawan Bencana

Provinsi Papua Tengah memiliki kerawanan terhadap bencana banjir, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, likuifaksi dan gempa bumi.

1. Banjir

Banjir merupakan salah satu dari bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

Bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Papua Tengah adalah banjir dan banjir rob. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Tabel 2. 5 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Banjir per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha)		
	Kerawanan Rendah	Kerawanan Sedang	Kerawanan Tinggi
Nabire	535,31	16522,70	182597,77
Paniai	23,88	127,21	19555,71
Puncak Jaya	274,33	11638,12	100652,44
Mimika	1289,23	61657,33	520170,04
Puncak	141,66	7421,94	69626,82
Dogiyai	50,74	442,34	15507,38
Intan Jaya	1,00	252,13	3769,39
Deiyai	31,21	2504,53	22384,17

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan data dari InaRISK BNPB, Kabupaten Mimika memiliki daerah rawan banjir terluas di Papua Tengah, termasuk luasan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pada Februari 2023 terjadi banjir bandang di Kabupaten Mimika, tepatnya di Distrik Tembagapura di mana PT Freeport Indonesia berada. Penyebab utama banjir ini adalah curah hujan tinggi pada bulan puncak hujan yaitu pada Januari dan Februari. Fenomena ini berdampak pada peningkatan kejadian hujan

lebat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan banjir bandang di berbagai penjuru daerah di Papua.

Selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire juga terdampak oleh bencana banjir. Sebanyak 3 distrik yaitu Makimi, Uwapa, dan Wanggar mengalami banjir pada akhir tahun 2022 lalu. Banjir dengan ketinggian 1-1,5 meter ini disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Legari.

Kejadian bencana banjir menimbulkan sejumlah kerugian seperti kerusakan bangunan dan barang akibat terendam air, gangguan kesehatan warga, kerusakan lahan pertanian dan kebun, pencemaran lingkungan, bahkan hingga hilangnya nyawa. Namun demikian, telah dilakukan upaya pendampingan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Papua Tengah. Upaya ini meliputi pelatihan mitigasi bencana dan pemberian informasi analisis dari BMKG secara rutin terkait kondisi cuaca di provinsi ini.

2. Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Meskipun tsunami tidak terlalu merusak garis Pantai, namun potensi bahaya dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi. Fenomena tsunami seringkali terjadi karena gempa yang disebabkan oleh pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng.

Suatu area dikatakan memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah longsor terjadi di dekat Pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan. Area berada pada risiko yang lebih besar jika berlokasi kurang dari 25 meter di atas permukaan laut dan dalam beberapa meter dari garis pantai.

Tabel 2. 6 Kabupaten dan Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Tingkat Kerawanan Tsunami	Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
Rendah	Mimika	5072,75
	Nabire	498,09
Sedang	Nabire	1357,30
Tinggi	Nabire	2716,56

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Meskipun Provinsi Papua tidak memiliki potensi terjadi tsunami atau bukan daerah rawan bencana tsunami, namun dalam catatan sejarah pernah terjadi gempa bumi besar yang disertai tsunami pada tahun 1996. Data InaRISK menyebutkan bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah adalah dua kabupaten yang memiliki potensi rawan tsunami karena lokasinya yang berada di kawasan pesisir.

Gambar 2. 5 Peta Kerawanan Bencana Tsunami Provinsi Papua Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di musim kemarau. Saat musim kemarau, salah satu yang menjadi perhatian adalah gejala El Nino. El Nino terjadi akibat naiknya suhu muka laut di Pasifik. Bila kenaikan suhu muka laut lebih dari 1,5 derajat celsius, maka Indonesia akan mengalami El Nino kuat yang berakibat timbulnya kekeringan.

Pulau Papua berpotensi mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan. Diketahui berdasarkan informasi BNPB, sejak tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan secara luas terjadi di tanah Papua. Peningkatan jumlah *hotspot* tidak terlepas dari pembukaan perkebunan yang besar-besaran di Papua. Jenis tanah yang terbakar adalah tanah gambut dan mineral. Berdasarkan pantauan citra satelit, perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan berlangsung cukup cepat dan luas di Papua. Aktivitas ini disertai dengan peningkatan kebakaran hutan dan lahan dalam pembersihan lahan. Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan di Papua ini banyak terjadi di Kabupaten Merauke dan Mappi.

Tabel 2. 7 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

No	Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)		
		Kerawanan Rendah	Kerawanan Sedang	Kerawanan Tinggi
1	Nabire	321.790,81	167.439,48	32.415,72
2	Paniai	49.524,36	408.57,59	57.087,54
3	Puncak Jaya	136.220,12	81.811,72	8.442,17
4	Mimika	490.680,50	170.403,91	42.253,01
5	Puncak	117.972,98	78.064,88	85.435,94
6	Dogiyai	57.501,44	29.262,22	3.069,48
7	Intan Jaya	46.787,22	38.167,35	8.234,49
8	Deiyai	28.351,20	23.867,35	2.970,27

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Jika ditinjau dari informasi InaRISK BNPB, tingkat kerawanan tinggi karhutla berada di Kabupaten Puncak mengingat wilayah ini masih didominasi oleh kawasan hutan yang cukup masif. Meskipun di beberapa lokasi diketahui memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan yang kecil karena curah hujan tinggi, namun segala bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, tetap dipersiapkan sehingga pemerintah daerah tetap menjalankan langkah-langkah mitigasi untuk berjaga-jaga.

4. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Salah satu contoh cuaca ekstrem adalah siklon yang menimbulkan angin kencang dan hujan lebat, serta kemarau berkepanjangan.

Tabel 2. 8 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Cuaca Ekstrem per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

No	Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem (Ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Nabire	243.095,00	149.416,00	89.148,70
2	Paniai	10.152,80	2.819,05	25.749,40
3	Puncak Jaya	30.739,00	107.009,00	43.332,90
4	Mimika	734.785,50	428.652,50	277.020,50
5	Puncak	44.489,80	34.729,80	65.543,90
6	Dogiyai	13.793,60	4.352,65	8.484,65
7	Intan Jaya	13.059,20	645,42	37,30
8	Deiyai	46.431,10	3.386,67	14.482,30

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Cuaca ekstrem kerap terjadi di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data kerawanan cuaca ekstrem di atas, Kabupaten Mimika memiliki wilayah terluas dengan tingkat kerentanan tinggi. Meski demikian, dampak cuaca ekstrem cukup dirasakan oleh Kabupaten Puncak. Kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan yang diiringi cuaca dingin ekstrem di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu gagal panen dan mengakibatkan hilangnya nyawa. Kejadian cuaca ekstrem hampir setiap tahun terjadi di kabupaten ini. Oleh karena morfologi Kabupaten Puncak merupakan daerah pegunungan, maka ketika terjadi fenomena el nino justru menimbulkan turunnya hujan es sehingga tanaman perkebunan menjadi mati dan gagal panen.

5. Likuifaksi

Fenomena likuifaksi atau pelulukan tanah adalah suatu proses yang membuat tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat dikarenakan getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh air. Fenomena ini biasanya terjadi saat gempa bumi terjadi pada daerah-daerah atau zona-zona dengan tanah yang mengandung air. Salah satu contohnya yaitu di dekat pantai atau di daerah gempa, di mana ada lapisan yang mengandung air seperti tanah pasir.

Tabel 2. 9 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Likuifaksi per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

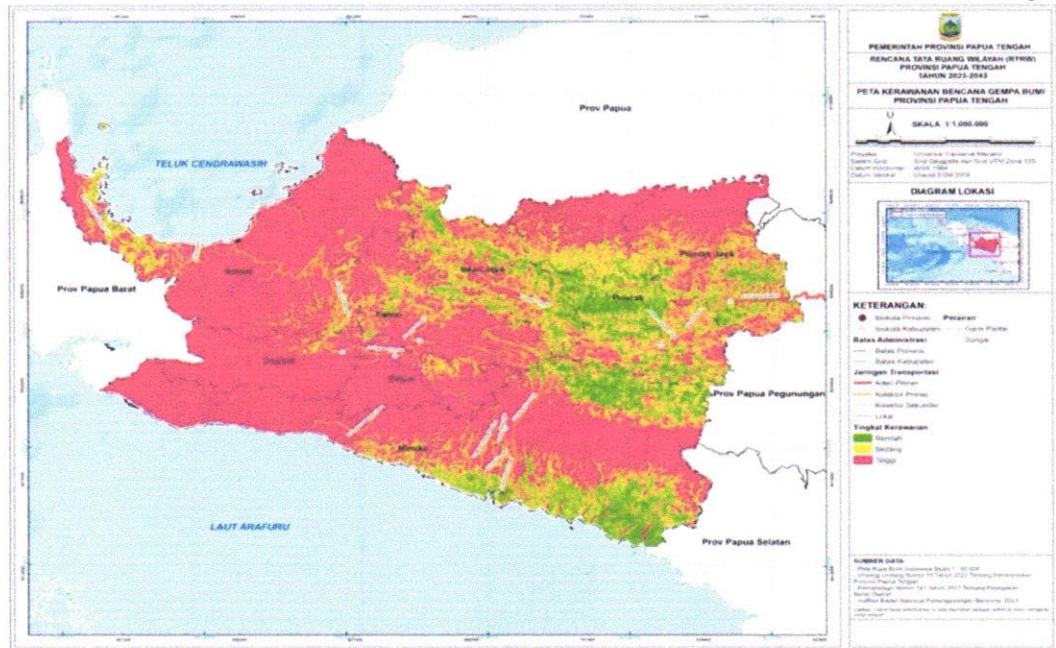
No	Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Likuifaksi (Ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Nabire	265.462,91	91.288,39	2.609,68
2	Paniai	19.647,05	2.193,49	0,00
3	Puncak Jaya	24.323,48	152.623,56	0,00
4	Mimika	312.916,52	879.237,68	3.792,25
5	Puncak	15.650,07	111.140,88	0,00
6	Dogiyai	12.496,77	13.454,94	0,00
7	Intan Jaya	6.564,27	5.832,31	0,00
8	Deiyai	529,59	38.897,47	0,00

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan likuifaksi tinggi di Provinsi Papua Tengah yaitu pada Kabupaten Mimika dan Nabire. Salah satu faktor pendorongnya yaitu lokasi dari kedua kabupaten tersebut yang merupakan kawasan pesisir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, likuifaksi rentan terjadi di daerah dengan struktur tanah berbutir halus dan jenuh air.

6. Gempa Bumi
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang *seismik*. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Tengah merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana alam gempa bumi yang tinggi. Kawasan dengan kerawanan gempa bumi yang rendah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Mimika. Sementara daerah lainnya masuk ke dalam zona tingkat kerawanan yang tinggi.

Gambar 2. 4 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Provinsi Papua Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.2.1 Potensi Hutan

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah berdasarkan dari Peta Rupa Bumi Indonesia mencapai 11.667,75 km2. Sementara luas lahan Hutan Provinsi Papua Tengah mencapai 5.828.043 Kawasan hutan yang terbesar di Provinsi Papua Tengah ini berupa Hutan Lindung yang luasnya mencapai 2.293.552 km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 10 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

No	Kab/Kota	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan					
		Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	15.848.672	6.890.351	90.772.441	35.476.446	N/A	31.425.993

2	Paniai	-	4.573.208	28.182.70 3	23.540.80 9	N/A	68.686
3	Puncak Jaya	-	9.311.408	52.253.75 7	30.011.04 8	N/A	4.502.40 7
4	Mimika	4.936.50 0	23.946.46 4	88.781.58 5	21.902.91 6	N/A	37.995.7 05
5	Puncak	887.365	22,124.76	887.365,0 0	279.549.8 8	N/A	131,953. 17
6	Dogiyai	89.408	635.911	33.423.88 9	29.433.20 5	N/A	3.265.36 5
7	Intan Jaya	479.941	2.681.830	49.550.24 1	41.886.06 3	N/A	4.502.40 7
8	Deiyai	918.091	2.375.207	25.248.46 9	21.390.81 0	N/A	564.361
Papua Tengah		23.159.9 77	50.414.37 9	369.100.4 50	203.641.2 97	N/A	82.324.9 24

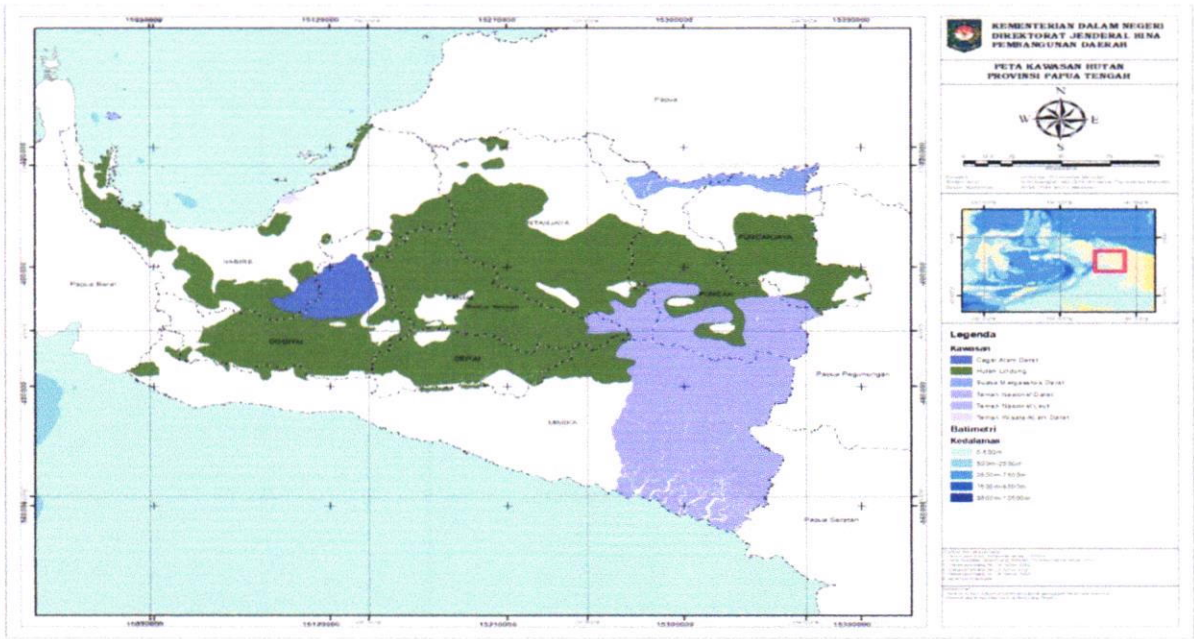
Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Jumlah Luas Hutan dan Perairan terluas di Provinsi Papua Tengah terluas berada di Kabupaten Mimika mencapai 177.563.170 Ha, sementara luas hutan dan perairan yang terkecil terdapat di kabupaten Deiyai.

Tabel 2. 11 Luas Kawasan Peruntukan Hutan Provinsi Papua Tengah

No	Keterangan	Luas (Km2)
1	2	3
1	Cagar Alam Darat	1.418,85
2	Hutan Lindung	24.888,42
3	Suaka Margasatwa Darat	931,16
4	Taman Nasional Darat	11.336,87
5	Taman Nasional Laut	18,11
6	Taman Wisata Alam Darat	62,78

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

B. Kawasan Hutan Rakyat

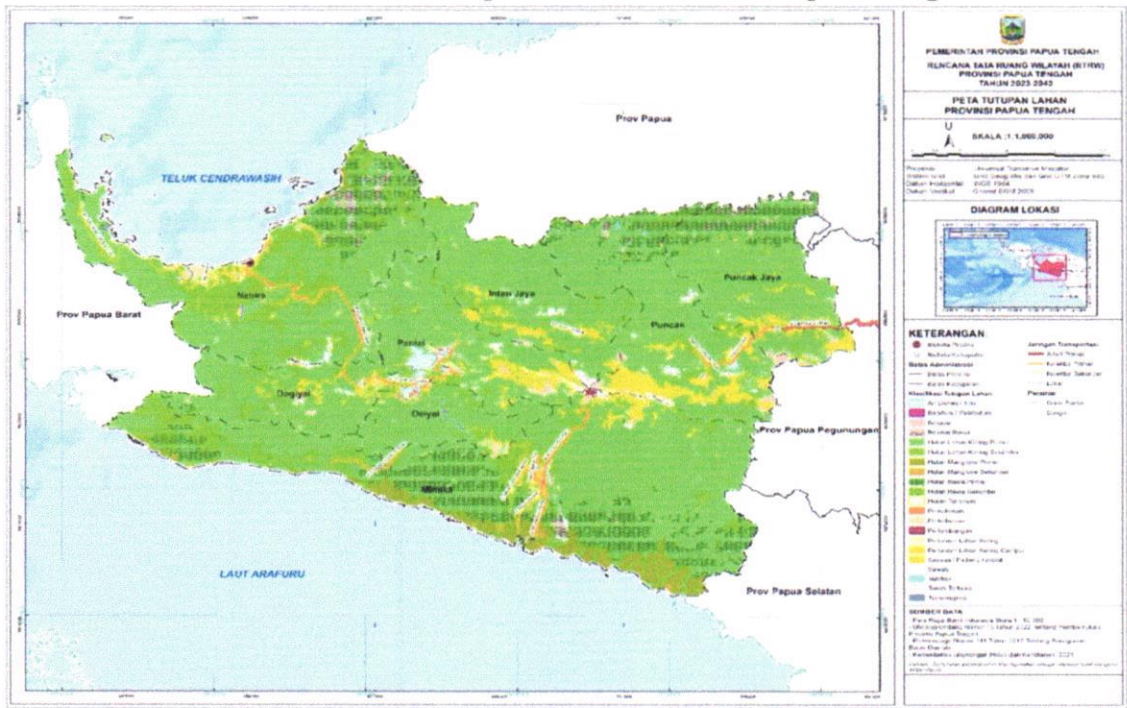
Kawasan hutan rakyat yang berada di Provinsi Papua Tengah terdiri dari perkebunan dan pertanian. Kawasan perkebunan dan pertanian merupakan kawasan yang dikelola oleh masyarakat sehingga termasuk ke dalam kawasan hutan rakyat. Untuk lebih jelas mengenai kawasan hutan rakyat dapat melihat rinci luasan tutupan lahan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 12 Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tengah

No	Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)
1	Air Danau / Situ	24.271,37
2	Bandara / Pelabuhan	654,60
3	Belukar	137.203,81
4	Belukar Rawa	72.281,63
5	Hutan Lahan Kering Primer	3.696.095,75
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	623.370,34
7	Hutan Mangrove Primer	209.088,02
8	Hutan Mangrove Sekunder	13.018,73
9	Hutan Rawa Primer	756.094,67
10	Hutan Rawa Sekunder	76.060,91
11	Hutan Tanaman	9,62
12	Pemukiman	15.985,35
13	Perkebunan	19.692,89
14	Pertambangan	1.624,07
15	Pertanian Lahan Kering	18.986,97
16	Pertanian Lahan Kering Campur	200.750,10
17	Savana / Padang rumput	160.972,94
18	Sawah	1.401,69
19	Tambak	83,12
20	Tanah Terbuka	80.798,95
21	Transmigrasi	3.531,46
Grand Total		6.111.976,98

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043 **

Gambar 2. 7 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Tengah



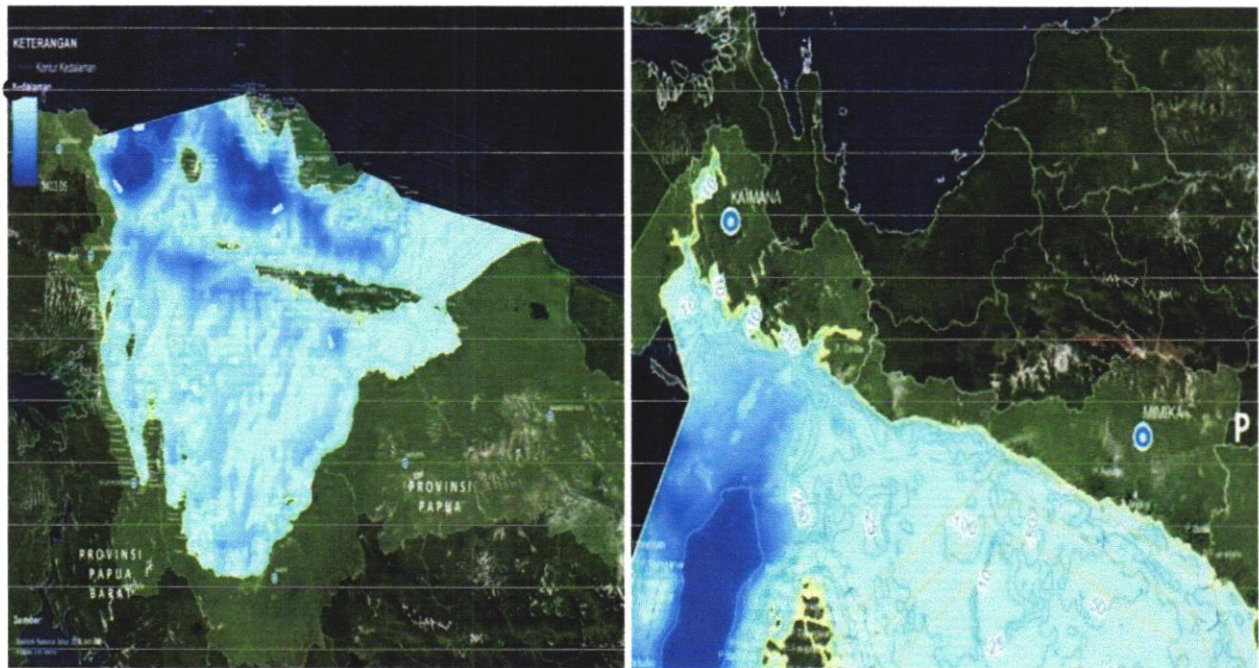
Sumber : RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043**

2.1.1.2.2 Potensi Laut

A. Batimetri

Karakteristik perairan berdasarkan kedalaman di Provinsi Papua Tengah menunjukkan perbedaan yang mencolok antara wilayah utara dan selatan. Secara umum, perairan laut di provinsi ini terbagi ke dalam dua kawasan utama, yaitu perairan Laut Teluk Cenderawasih di bagian utara dan perairan Laut Arafura di bagian selatan. Kedalaman perairan di kedua wilayah tersebut sangat bervariasi dan mencerminkan kondisi oseanografi yang kompleks. Profil batimetri Kawasan sebagian besar wilayah di sebelah timur cenderung lebih dangkal daripada wilayah Teluk Cenderawasih sebelah barat. Pada wilayah utara, perairan Laut Teluk Cenderawasih memiliki kedalaman yang berkisar antara 100 meter hingga lebih dari 1.000 meter, terutama pada zona pelagis dan laut lepas. Kawasan ini termasuk dalam kategori cekungan laut dalam (deep sea basin).

Gambar 2.8 Peta Batimetri Perairan Laut Teluk Cendrawasih dan Laut Arafuru



Gambar 1. Peta Batimetri Perairan Laut Teluk Cenderawasih dan Laut Arafura (Sumber : KKP, 2022).

Sebaliknya, pada perairan Laut Arafura di bagian selatan wilayah Papua Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika memiliki karakteristik yang relatif dangkal. Kedalaman perairan di kawasan ini umumnya berada pada kisaran 5 hingga 80 meter, terutama di wilayah landas kontinen Arafura yang luas, dangkal, dan sangat produktif sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan demersal dan udang (Peta Laut Indonesia No.151, Pushidrosal, 2014).

B. Sumber Daya Hayati

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Tengah, khususnya di bagian utara, dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Keanekaragaman ini meliputi terumbu karang, padang lamun, rumput laut, mangrove, serta berbagai jenis ikan, krustasea, dan mollusca, ditambah dengan potensi sumber daya non-hayati lainnya. Ekosistem terumbu karang di Perairan Teluk Cenderawasih, yang termasuk dalam wilayah segitiga karang dunia (World Coral Triangle), dikenal sebagai salah satu area dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Sementara itu, wilayah pesisir selatan Papua Tengah, yaitu perairan Laut Arafura, merupakan salah satu perairan yang kaya akan sumber daya ikan pelagis dan demersal, menjadikannya salah satu wilayah penangkapan ikan utama di Indonesia. Di pesisir ini juga terdapat ekosistem mangrove yang luas, yang mendukung kegiatan perikanan tradisional dan komersial.

Kegiatan utama yang berkembang di kawasan ini mencakup perikanan tangkap, budidaya laut, industri, perdagangan, dan transportasi laut. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi untuk pengembangan wisata bahari, pengelolaan kawasan taman nasional laut, dan konservasi perairan.

1. Ekosistem Terumbu Karang

Sebaran terumbu karang di perairan pesisir Provinsi Papua Tengah hanya dapat ditemui Kabupaten Nabire. Status kondisi terumbu karang di Provinsi Papua Tengah umumnya dari sedang sampai dengan baik. Teluk Cenderawasih memiliki tipe-tipe ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove dan perairan dangkal yang kurang dari 20 m. Beragam jenis vegetasi mangrove dan hutan pantai, beragam jenis lamun, serta beragam jenis terumbu karang terdapat di kawasan Teluk Cenderawasih. Terumbu karang merupakan ekosistem yang tersebar secara luas dan paling dominan dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Terumbu karang di Teluk Cenderawasih tersebar terutama di tepi pulau-pulau dan di sekitar gugusan pulau yang ada di dalam kawasan teluk. Potensi karang di Taman Nasional Teluk Cenderawasih terdapat ± 200 jenis karang yang terdiri dari 67 genus dan sub genus jenis karang Scleractinia. Di kawasan ini dijumpai pula adanya koloni *blue coral (Heliopora coenela)*, karang lunak dari jenis *Sacroplyton sp*, Gorgians (*Anthipathes sp*). Jenis karang pada zona *reef slope* antara lain *Leptoseris spp*, *Montipora spp*, *Oxypora spp*, *Pacyseris spp*, *Hicidium clephantatus* dan *Hicidium poritesrus*.

Rata-rata persentase tutupan karang hidup di bagian dalam teluk, khususnya di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih sebesar 36,13%. Persentase tutupan karang hidup tertinggi terdapat di Pulau Yoop, yaitu sebuah pulau kecil berpenduduk yang ada di depan Teluk Wandamen, dengan nilai 63,33%. Sedangkan persentase tutupan karang hidup terendah di perairan Kampung Rumberpoon, yaitu sebesar 23,07%. Terumbu karang di kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Padaido, yang terletak di bagian utara Teluk Cenderawasih, berbatasan dengan perairan Samudera Pasifik didominasi oleh tipe karang tepi (*fringing reef*) dan diikuti oleh tipe karang penghalang (*barrier reef*). Habitat terumbu karang di kawasan TWP Padaido umumnya berada pada kedalaman antara 30-40 m, dengan persentase tutupan karang hidup sebesar 35,85% (Giyanto *et al.*, 2017).

Potensi ekosistem terumbu karang di provinsi Papua Tengah sangat bernilai secara ekologi untuk menunjang kegiatan perikanan dan pariwisata. Selain itu Karakteristik perairan yang berada di Kabupaten Nabire pada wilayah timur yang sebagian besar adalah kepulauan di mana terdapat gugusan Kepulauan Moora dan dibagian baratnya merupakan pulau-pulau kecil di Kawasan Teluk Cenderawasih yang juga merupakan bagian dari Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta keindahan bawah lautnya.

2. Padang Lamun

Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang telah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan laut. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi-BRIN pada tahun 2018, diperkirakan luas padang lamun di perairan timur Indonesia, termasuk di wilayah Papua, mencapai sekitar 284.660 hektare. Sebagian besar padang lamun ini tersebar di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, terutama di kawasan Teluk Cenderawasih dan Kepulauan Moora. Secara umum Lamun di Teluk Cenderawasih tersebar cukup luas, terutama di Perairan Biak-Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, perairan Nabire, dan Teluk Wondama. dengan jumlah jenis yang teridentifikasi adalah 9 jenis (P2O LIPI, 2017) dari 12 jenis lamun yang ditemukan di Indonesia. Jenis lamun yang distribusinya paling luas dan paling sering ditemukan adalah *Enhalus acroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* dan *Syringodium isoetifolium*. Kondisi Padang lamun di Teluk Cenderawasih berkisar dari sedang sampai dengan baik.

Lamun di beberapa tempat di Teluk Cenderawasih juga merupakan habitat bagi spesies kharismatik, seperti dugong dan penyu hijau (Tapilatu *et al.*, 2022), sehingga pelestarian ekosistem lamun perlu mendapatkan perhatian, khususnya lamun perairan dalam yang didominasi oleh jenis *Halophila sp* dan *Halodule sp*. Jenis lamun yang paling sering ditemukan dan memiliki distribusi

luas di wilayah ini antara lain *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, serta *Syringodium isoetifolium*. Kondisi padang lamun di Provinsi Papua Tengah bervariasi, mulai dari kondisi sedang hingga baik. Potensi dan pemanfaatan padang lamun di provinsi ini mencakup sebagai objek penelitian, pemanfaatan sumber daya ikan, serta sebagai habitat bagi ikan-ikan ekonomis penting dan dugong.

3. Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove adalah tipe hutan yang khas, terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove di Papua Tengah memiliki peran ekologis dan ekonomi yang sangat penting. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, luas hutan mangrove eksisting di Papua Tengah mencapai sekitar 303.820 hektar dengan jumlah spesies mangrove mencapai 52 spesies dan kerapatannya berkisar antara 603 – 3820 pohon/Ha. Upaya pelestarian untuk menjaga fungsi ekosistem mangrove tersebut dilakukan melalui pengelolaan yang baik dan benar. Salah satu yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan inventarisasi dan pengamatan terhadap kondisi potensi dan keanekaragamannya. Beberapa jenis mangrove yang ditemukan di Papua adalah: *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora stylosa*, *Sonneratia alba*, *Ceriops tagal*, *Bruguiera gymnorhiza*, *Avicennia alba*, *Avicennia marina*, *Avicennia lanata*, *Avicennia officinalis*, *Sonneratia caseolaris*, *Gandelia candel*, *Nypah sp*, *Nypah fruticans*, *Xylocarpus granatum*. Sebaran hutan mangrove terbesar di Papua Tengah Sebagian besar di Kabupaten Mimika dan sisanya di kabupaten Nabire. Umumnya mangrove ini tersebar di wilayah delta, muara dari sungai-sungai besar, pesisir, daerah pasang – surut dan sungai –Sungai. Kawasan pesisir pantai selatan Provinsi Papua Tengah terutama di Kabupaten Mimika adalah kawasan yang paling tinggi dengan luasan dan tutupan hutan mangrovenya. Selain itu, kawasan seperti Pigapu Nimaotimi juga dikenal sebagai pusat konservasi ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat setempat. Hutan mangrove di Papua Tengah tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir dari erosi, tetapi juga sebagai habitat yang penting bagi berbagai spesies laut serta sebagai sumber daya alam yang mendukung perekonomian masyarakat pesisir.

4. Spesies Kharismatik

Wilayah perairan Papua Tengah juga menjadi rumah atau habitat dari berbagai spesies kharismatik atau langka. Tercatat berbagai jenis penyu, hiu, serta mamalia laut ditemukan di wilayah perairan ini. Lebih dari 80% spesies penyu yang terdapat di Indonesia dapat ditemukan di perairan pesisir Papua Tengah. Tercatat penyu-penyu tersebut berada sekitar area Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih di Kabupaten Nabire. Penyu adalah salah satu hewan kharismatik yang ditemukan di Teluk Cenderawasih disebabkan oleh keberadaan habitat alami seperti terumbu karang, padang lamun, dan pantai berpasir. Empat dari tujuh spesies penyu di dunia tersebar di Teluk Cenderawasih dan Bentang Laut Kepala Burung (BHS) secara umum. Keempat jenis penyu tersebut adalah penyu hijau (*Chelonia mydas* Linnaeus, 1758), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata* Linnaeus, 1766), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea* Eschscholtz, 1829), dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea* Vandelli, 1761). Penyu hijau tersebar di Bentang Laut Kepala Burung dan Teluk Cenderawasih, namun umumnya berada di perairan pesisir dan diperkirakan menghuni perairan dangkal dan daerah mencari makan.

Kawasan perairan Teluk Cenderawasih merupakan habitat dan daerah migrasi atau perlintasan dari beberapa spesies kharismatik dan spesies-spesies penting yang dilindungi lainnya. Dari golongan ikan, beberapa jenis hiu dijumpai di kawasan Teluk Cenderawasih, diantaranya Hiu Paus (*Rhincodon typus*), Hiu Reef Whitetip (*Triaenodon obesus*), Hiu Blacktip (*Charcarinus melanopterus*). Dua jenis pari yang ditemukan di kawasan teluk, yaitu Pari Manta (*Manta birostris*), Pari Rajawali Totol (*Aetobatus narinari*). Ikan Kakatua Besar

(bumphead parrotfish; *Bolbomethopon nuricatum*) adalah spesies ikan Kakatua terbesar yang terdapat di area terumbu karang. Dri golongan reptil ada empat jenis penyu yang terdapat di Teluk Cenderawasih, yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*, serta Buaya Muara (*Crocodylus porosus*). Dari golongan mamalia laut terdapat Lumba-lumba Leher Botol (*Delphinus delphinus*) dan Duyung (*Dugong Dugon*) dan Paus Biru (*Balaenoptera musculus*). Dari golongan moluska beberapa jenis penting, seperti *Tridacna gigas*, *T. derasa*, *T squamosal*, *T. Maxima*, *T. cooce*a, dan *Hipopus hipopus* (TNTC, 2022).

Ikan hiu karang masih cukup banyak ditemukan di wilayah perairan utara Papua Tengah. Spesies penting yang menjadi indikator ekosistem laut yang sehat ini hidup dan berkembang di hampir seluruh ekosistem terumbu karang di Papua Tengah terutama di wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) yang merupakan spesies ikan terbesar di dunia, dapat ditemukan kehadirannya hampir sepanjang tahun di wilayah perairan Papua, terutama di perairan Kwatisore Teluk Cenderawasih Kabupaten Nabire sebagai habitat penting bagi ikan tersebut.

Biota “kharismatik” yang ditemukan mendiami wilayah perairan Laut Arafura setiap tahun baik yang aktif bergerak maupun yang statis, diantaranya penyu, dugong, hiu paus dan duyung. Alur migrasi biota laut diarahkan untuk mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan jalur migrasi biota laut ekonomis penting, biota laut langka, terancam punah, dan dilindungi, serta melaksanakan perlindungan alur migrasi biota dari kegiatan pelayaran, kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya (Pemerintah Provinsi Papua, 2022).

2.1.1.2.3 Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah sebagian besar pertambangan emas, granit dan tembaga. Pertambangan emas masih mendominasi potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelas mengenai lokasi potensi pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kab/Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
1	2	3
Nabire	Yaur	Pasir Kuarsa, Granit, Marmer
	Lagari	Emas
	S.Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng, Kaolin
	KaliBumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Napan	Emas, Tembaga
	Wapoga	Emas
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, Tembaga
	Ilaga	Arsenit, Tembaga, Emas, Perak
Paniai	Enarotali	Pasir Kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet
	Uwagimamo	Emas, Tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, Emas
	Komopa	Tembaga, Emas

Mimika	Tembagapura	Tembaga, Perak, Emas
Intan Jaya	Sugapa (Bulagi)	Emas

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Papua, 2016**

2.1.1.2.4 Potensi Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah ialah : 1) Taman Nasional Lorentz (wilayahnya meliputi beberapa kabupaten diantaranya : Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya) ; 2) Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Nabire. Serta beberapa destinasi pariwisata lainnya antara lain : 1) Danau Tigi di Kabupaten Deiyai ; 2) Danau Paniai dan Danau Tage di Kabupaten Paniai ; 3) Danau Mamae dan Air Terjun Bihewa di Kabupaten Nabire ; dan 4) Ekowisata Piramida Cartens (wilayahnya meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya). Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Tengah dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata pulau, obyek wisata budaya (dengan dikembangkannya kawasan strategis sosial budaya Wilayah La Pago dan Mee Pago), obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan obyek wisata alam.

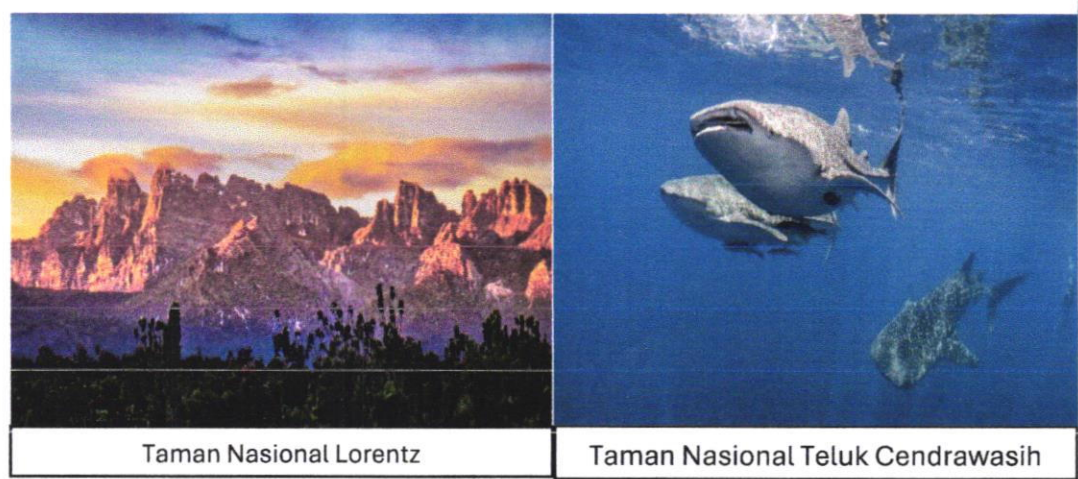
Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua Tengah yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika) dan KP Paradoi (Kabupaten Nabire). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Tabel 2. 14 Jumlah Objek Wisata per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah

No	Kab/Kota	Jumlah Objek Wisata		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	94	94	113
2	Paniai	2	2	2
3	Puncak Jaya	1	1	1
4	Mimika	1	1	1
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	1	1	1
8	Deiyai	1	1	1
Papua Tengah		100	100	119

Sumber : Nabire Dalam angka 2022 data diolah bapperida PPT (data sementara)**

Gambar 2. 9 Potensi Objek Wisata Pada Provinsi Papua Tengah



Sumber : Google.co.id

2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.408.991 jiwa di tahun 2021 dan di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21.960 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Mimika sebanyak 316.295 jiwa pada tahun 2022. Sementara jumlah penduduk terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten Deiyai sebanyak 102.168 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah tahun 2023 dan 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Nabire	173,770	175,360
2	Paniai	232,570	236,530
3	Puncak Jaya	232,570	236,530
4	Mimika	323,820	327,780
5	Puncak	120,700	122,590
6	Dogiyai	122,990	125,180
7	Intan Jaya	141,710	143,850
8	Deiyai	104,610	106,500
Papua Tengah		1.452.740	1.474.320

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2010-2022 sebesar 4,3 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2022 sebesar 1,53 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua Tengah periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen berdasarkan Data BPS tahun 2022.

Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 dan 2024

No	Kab/Kota	Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2023	2024	2023-2024
1	2	3	4	5
1	Nabire	173,770	175,360	0,78
2	Paniai	232,570	236,530	0,96
3	Puncak Jaya	232,570	236,530	1,48
4	Mimika	323,820	327,780	1,04

5	Puncak	120,700	122,590	1,39
6	Dogiyai	122,990	125,180	1,57
7	Intan Jaya	141,710	143,850	1,33
8	Deiyai	104,610	106,500	1,55
Papua Tengah		1.452,740	1.474,320	1,20

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mencapai 11,91 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Deiyai dengan kepadatan penduduk mencapai 35,89 jiwa/km² dan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya dengan kepadatan penduduk mencapai 26,1 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 17 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No	Kab/Kota	Persentase Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)		Rasio Jenis Kelamin (Population Sex Ratio)	
		2020	2022	2020	2022	2020	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	11,96	11,91	14,72	14,85	109,93	109,55
2	Paniai	16,01	16,06	43,82	44,57	119,44	118,81
3	Puncak Jaya	15,84	8,31	38,89	39,28	119,44	118,81
4	Mimika	22,29	22,25	17,70	17,91	119,31	118,88
5	Puncak	8,24	8,31	15,67	15,92	111,42	110,94
6	Dogiyai	8,47	8,50	32,43	33,00	108,33	108,01
7	Intan Jaya	9,75	9,77	26,56	26,97	109,94	109,49
8	Deiyai	7,20	7,23	36,75	35,89	112,00	111,60
Papua Tengah		99,76	92,34	226,54	228,39	909,81	906,06

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

2.1.2.1 Indeks Kerawanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah atau negara. Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat di wilayah tersebut dapat mengakses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Adapun data Indeks Kerawanan Pangan (IKP) provinsi Papua Tengah tahun 2022- 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Indeks Kerawanan Pangan Provinsi Papua Tengah 2022-2024

No	Kab/Kota	Indeks Ketahanan Pangan		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Nabire	69,19	78,07	66,97
2	Paniai	27,91	21,52	22,27
3	Puncak Jaya	19,34	25,14	24,19
4	Mimika	80,55	81,83	83,64
5	Puncak	18,27	20,1	30,12
6	Dogiyai	22,93	31,23	31,37
7	Intan Jaya	17,21	14,54	14,14
8	Deiyai	24,7	21,93	21,35
Papua Tengah		35,01	36,79	30,48

Sumber Data : BPS Papua, 2025

Berdasarkan data diatas bahwa indeks ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah mengalami penurunan dari tahun 2023-2024 yang awalnya berada pada nilai 36,79 pada tahun 2023 menjadi 30,48 pada tahun 2024 hal ini dikarenakan pada beberapa Kabupaten mengalami penurunan indeks salah satunya yang signifikan adalah kab Nabire yang awalnya pada tahun 2023 nilainya sebesar 78,07 menjadi 66,97 pada tahun 2024.

2.1.2.2 Rumah tangga dengan Akses Sanitasi

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi merujuk pada jumlah atau persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Ini adalah indikator penting dalam bidang kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, karena sanitasi yang baik dapat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki data rumah tangga dengan akses sanitasi sebagai berikut:

Tabel 2.19 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Papua Tengah 2022-2024

No	Kab/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Nabire	85,51	88,6	93,23
2	Paniai	32,07	40,6	31,71
3	Puncak Jaya	12,42	9	9,64
4	Mimika	80,46	77,3	86,27
5	Puncak	11,51	1,8	-
6	Dogiyai	10,57	26,4	17,89
7	Intan Jaya	8,84	10,8	23,54
8	Deiyai	67,47	37,5	26,48
Papua Tengah		41,55	41,15	41,44

Sumber Data: BPS Papua Tengah, 2025

Berdasarkan Data diatas bahwa kabupaten yang memiliki Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak adalah Kabupaten Puncak dengan Persentase sampai dengan 2023 sebesar 1,8, sedangkan kabupaten yang memiliki rumah tangga dengan akses sanitasi layang dengan presentse tertinggi ada pada Kabupaten Nabire.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua Tengah dalam periode 4 (empat) tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Tabel 2. 20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2019-2023

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022	2023 ***
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	11.084,22	11.178,38	12.015,16	12.692,86	13.561,88
2	Paniai	4.181,80	4.283,39	4.446,53	4.705,23	5.013,91
3	Puncak Jaya	1.404,63	1.387,23	1.407,07	1.450,21	1.509,37
4	Mimika	54.834,54	63.716,34	95.216,35	110.407,81	126.872,92
5	Puncak	1.400,81	1.438,05	1.513,26	1.612,81	1.669,26
6	Dogiyai	1.313,23	1.355,63	1.411,76	1.445,34	1.543,59

7	Intan Jaya	1.248,66	1.273,03	1.303,46	1.362,07	1.404,74
8	Deiyai	1.389,14	1.435,66	1.490,80	1.574,24	1.663,90
Papua Tengah		9.607,13	10.758,46	14.850,55	16.906,32	153.239,57

Sumber : BPS Pusat Statistik, Prov. Papua Dalam Angka 2023 & Papua Tengah Dalam angka 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua Tengah melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Angka PDRB Provinsi Papua Tengah pada tahun 2019 sebesar 9.607,13 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 153.239,57 Miliar Rupiah.

Tabel 2. 21 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2019-2023

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023***
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	7.457,29	7.355,88	7.684,56	7.882,34	8.154,41
2	Paniai	3.020,87	3.034,64	3.084,64	3.194,46	3.272,18
3	Puncak Jaya	1.010,15	969,32	983,03	1.012,03	1.021,53
4	Mimika	45.651,03	50.871,59	69.618,91	80.277,60	86.625,49
5	Puncak	824,47	825,11	831,07	862,72	882,92
6	Dogiyai	892,88	895,96	906,90	914,01	938,58
7	Intan Jaya	761,71	758,85	767,00	787,24	806,77
8	Deiyai	833,65	830,73	841,20	873,28	889,62
Papua Tengah		7.556,51	8.192,76	10.589,66	11.975,46	101.701,88

Sumber : BPS Pusat Statistik, Prov. Papua Dalam Angka 2023 & Rancangan Akhir RKPD Prov. Papua 2023

Sementara itu, angka PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), selama kurun empat tahun terakhir adalah masing-masing 7.556,51 Miliar Rupiah (2019), 8.192,76 Miliar Rupiah (2020), 10.589,66 Miliar Rupiah (2021), 11.975,46 Miliar Rupiah (2022), dan pada tahun 2023 mencapai 101.701,88 miliar Rupiah.

2.1.3.2 Tingkat Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua Tengah mencapai 38,28% dari jumlah penduduk pada tahun 2021. Kabupaten Intan Jaya merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 42,03% dari jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2021, sedangkan Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 14,28% dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019 - 2023

No	Kab/Kota	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Per Kabupaten				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	37,14	36,75	35,08	35,43	34,83
2	Paniai	65,54	65,98	62,57	62,97	61,14
3	Puncak Jaya	45,89	46,07	46,39	47,61	47,50
4	Mimika	31,79	31,75	30,95	31,58	30,31
5	Puncak	43,09	42,43	40,78	41,28	42,01
6	Dogiyai	30,37	28,31	28,38	29,32	29,32
7	Intan Jaya	21,10	20,46	21,31	21,86	21,16

8	Deiyai	31,87	30,98	30,83	31,04	30,18
	Papua Tengah	38,34	37,84	37,03	37,63	37,05

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

2.1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, juga PDB perkapita, yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selama tahun 2019-2023, IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Tengah sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Untuk Kabupaten Mimika, mencapai peringkat pertama di Provinsi Papua Tengah, yang telah mencapai 75,91 poin, kemudian diikuti dengan Kabupaten Nabire pada urutan ke-2, dengan 71,36 poin, dan Kabupaten Paniai di urutan ke-3, dengan 58,83 poin. Adapun pada tahun 2023, daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Puncak, dengan 44,71 poin. Untuk lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 23 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	Nabire	68,53	68,83	69,15	69,91	71,36
2	Paniai	56,58	56,31	56,70	57,14	58,83
3	Puncak Jaya	48,33	48,37	48,99	49,84	51,49
4	Mimika	74,13	74,19	74,48	75,08	75,91
5	Puncak	42,70	43,04	43,17	43,87	44,71
6	Dogiyai	55,41	54,84	55,00	55,72	56,74
7	Intan Jaya	47,51	47,79	48,34	49,25	50,39
8	Deiyai	50,11	49,46	49,96	50,42	51,4
	Papua Tengah	55,41	55,35	55,72	56,40	57,60

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua) 2024

2.1.3.4 Rata-rata lama sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2. 24 Rata- Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah

No	Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	9,70	10,00	10,01	10,16	10,33
2	Paniai	4,38	4,57	4,77	4,78	4,79
3	Puncak Jaya	3,61	3,62	3,74	4,03	4,23
4	Mimika	9,91	10,17	10,18	10,20	10,47
5	Puncak	1,96	2,15	2,16	2,17	2,19
6	Dogiyai	4,92	4,93	4,94	4,96	4,97

7	Intan Jaya	2,64	2,84	3,09	3,26	3,27
8	Deiyai	3,00	3,01	3,25	3,26	3,27
Papua Tengah		5,02	5,16	5,27	5,35	5,44

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh dibawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, di mana hingga tahun 2023 tercatat RLS Provinsi Papua Tengah hanya mencapai 5,44 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua Tengah, dalam menyerap penduduk usia sekolah. Daerah di Provinsi Papua Tengah yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2023 berada di Kabupaten Mimika dengan nilai RLS 10,47 artinya sudah mencapai target program Pendidikan. Sedangkan daerah yang memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2023 berada di Kabupaten Puncak dengan nilai 2,19.

2.1.3.5 Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel 2. 25 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	11,59	11,92	12,18	12,44	12,64
2	Paniai	10,48	10,49	10,50	10,52	10,53
3	Puncak Jaya	6,96	7,24	7,49	7,50	7,51
4	Mimika	12,17	12,40	12,69	12,95	12,96
5	Puncak	5,19	5,39	5,40	5,58	5,59
6	Dogiyai	10,57	10,58	10,59	10,61	10,62
7	Intan Jaya	7,36	7,65	7,66	7,67	7,69
8	Deiyai	9,80	9,81	9,82	9,84	9,85
Papua Tengah		9,27	9,44	9,54	9,63	9,67

Sumber : BPS Provinsi Papua,2024

2.1.3.6 Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua Tengah.

Tabel 2. 26 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tengah

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	67,97	68,06	68,03	68,41	68,73
2	Paniai	66,27	66,44	66,44	66,94	67,22

3	Puncak Jaya	64,98	65,15	65,34	65,66	65,90
4	Mimika	72,27	72,32	72,38	72,57	72,83
5	Puncak	65,61	65,74	66,06	66,13	66,40
6	Dogiyai	65,60	65,73	65,85	66,13	66,39
7	Intan Jaya	65,51	65,60	65,58	65,93	66,12
8	Deiyai	65,11	65,24	65,36	65,66	65,93
Papua Tengah		66,67	66,79	66,87	67,17	67,44

Sumber : BPS Provinsi Papua,2024

2.1.3.7 Pengeluaran Per kapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran per kapita masyarakat. Selanjutnya, dapat terlihat data pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel 2. 27 Pengeluaran Per kapita Masyarakat di Provinsi Papua Tengah Tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	9.195	8.840	8.856	9.040	9.381
2	Paniai	6.767	6.361	6.377	6.554	6.977
3	Puncak Jaya	5.523	5.282	5.289	5.422	5.731
4	Mimika	12.035	11.431	11.400	11.647	12.076
5	Puncak	5.702	5.378	5.412	5.583	5.975
6	Dogiyai	5.709	5.373	5.415	5.705	6.182
7	Intan Jaya	5.593	5.283	5.328	5.624	6.140
8	Deiyai	4.958	4.632	4.673	4.808	5.104
Papua Tengah		6.935	6.573	6.594	6.798	7.195

Sumber : BPS Provinsi Papua,2024

Capaian pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami kenaikan serta penurunan dalam jangka waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Peningkatan terjadi dari Tahun 2022 menuju Tahun 2023, kemudian cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020. Angka tertinggi berada di Tahun 2023 sebesar 7.195, pendapatan per kapita pada provinsi Papua tengah pada tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

2.1.3.8 Persentase Balita Gizi Buruk

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut:

Tabel 2. 28 Status Gizi Anak Balita Umur 0-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua Tengah dibuat terakhir 2024

No	Kab/Kota	BB/U				TB/U			
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nabire	94	433	3.540	176	81	365	3.768	24
2	Paniai	15	26	136	44	13	17	166	15
3	Puncak Jaya	2	16	375	14	18	89	298	2
4	Mimika	174	573	6.673	333	217	614	6.850	72
5	Puncak	3	11	218	8	16	25	199	0

6	Dogiyai	21	30	143	11	40	44	119	2
7	Intan Jaya	2	10	56	2	0	7	63	0
8	Deiyai	14	27	217	19	29	41	201	6
Papua Tengah		325	1.126	11.358	607	414	1.202	11.664	121

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024**

Tabel 2. 29 Angka *Stunting* Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan

No	Kab/Kota	BB/TB					
		Gizi Buruk (0-59 Bulan)	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	115	293	3.444	276	84	26
2	Paniai	28	31	96	16	15	25
3	Puncak Jaya	0	8	348	31	17	3
4	Mimika	76	370	6.711	450	117	29
5	Puncak	0	5	184	41	10	0
6	Dogiyai	14	28	126	25	8	4
7	Intan Jaya	1	2	50	10	6	1
8	Deiyai	8	15	218	22	8	6
Papua Tengah		242	752	11.177	871	265	94

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024**

2.1.3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk diatas 15 tahun pada Provinsi Papua Tengah mencapai 713.544 jiwa, yang terdiri dari 596.283 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 76 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 153.004 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua Tengah mencapai 15.257 jiwa atau sebanyak 2,20% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kabupaten Mimika memiliki jumlah penduduk diatas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua Tengah dengan jumlah mencapai 162.465 jiwa, yang terdiri dari 115.391 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,46 % dan 50.210 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Mimika mencapai 7,8 %.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua Tengah berada pada Kabupaten Puncak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Puncak mencapai 85,95 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0 %. Kabupaten Nabire memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Nabire mencapai 6,65% atau sebanyak 5.425 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah Tahun 2017-2021

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	68,09	72,38	69,75	74,15	73,09
2	Puncak Jaya	89,79	94,29	77,34	84,81	91,39
3	Paniai	90,39	89,17	87,92	58,41	89,26
4	Mimika	65,83	68,88	64,93	63,46	64,77
5	Puncak	92,08	94,43	79,47	85,95	89,43
6	Dogiyai	89,66	86,18	90,12	82,45	78,20

7	Intan Jaya	76,74	73,68	82,10	69,21	75,75
8	Deiyai	86,98	89,45	92,65	89,65	85,01
Papua Tengah		82,45	83,56	80,54	76,01	80,86

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

Tabel 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua Tengah 2024-2025

No	Uraian	2024	2025
1	2	3	4
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,99	78,97
2	Laki-laki	83,71	86,00
3	Perempuan	69,13	70,76

Sumber Data: BPS Provinsi Papua, 2025

2.1.3.10 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia. Indeks ini dikembangkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) dan digunakan secara luas dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Reports*). Adapun data indeks ketimpangan gender Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Papua Tengah 2022-2024

No	Kab/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Nabire	0,51	0,496	0,482
2	Paniai	0,62	0,674	0,859
3	Puncak Jaya	0,51	0,520	0,560
4	Mimika	0,56	0,513	0,392
5	Puncak	0,37	0,694	0,614
6	Dogiyai	0,71	0,693	0,853
7	Intan Jaya	0,87	0,887	0,865
8	Deiyai	0,87	0,879	0,853
Papua Tengah		-	-	0,526

Sumber Data : BPS Papua Tengah, 2025

2.1.4 Aspek Daya Saing

2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Tengah

Perekonomian Provinsi Papua Tengah dapat diidentifikasi dari akumulasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 33 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (juta rupiah) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.625.807,77	3.592.044,39	3.952.117,85	3.952.117,85	3.829.000,34
B. Pertambangan dan Penggalan	38.885.901,53	44.658.934,36	44.676.533,66	44.676.533,66	78.342.000,43
C, Industri Pengolahan	135.169,86	237.772,45	246.843,41	246.843,41	241.000,78

D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.079,81	14.065,08	14.266,93	14.266,93	16.000,89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.393,34	9.468,68	9.020,49	9.020,49	9000,50
F. Konstruksi	3.215.685,73	5.084.537,63	5.232.825,53	5.232.825,53	5.234.000,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.685.041,17	3.375.041,90	3.495.244,36	3.495.244,36	3.770.000,77
H. Transportasi dan Pergudangan	2.180.995,35	960.354,58	990.611,08	990.611,08	1.264.000,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	890.896,36	214.854,65	217.271,85	217.271,85	217.000,01
J. Informasi dan Komunikasi	253.779,72	1.536.800,58	1.549.919,96	1.549.919,96	1.686.000,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.393.742,48	319.468,19	459.518,28	459.518,28	558.000,91
L. Real Estate	693.647,21	888.679,46	894.871,54	894.871,54	986.000,44
M.N. Jasa Perusahaan	555.870,25	397.468,53	398.721,66	398.721,66	410.000,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.867.904,40	3.615.462,10	3.618.437,55	3.618.437,55	3.199.000,24
P. Jasa Pendidikan	1.386.320,81	465.515,91	473.909,62	473.909,62	482.000,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	414.521,21	431.359,01	456.953,77	456.953,77	444.000,24
R.S.T.U. Jasa lainnya	286.537,18	338.097,41	344.041,25	344.041,25	370.000,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	60.499.294,18	66.139.924,91	67.031.108,79	67.031.108,79	101.057.009,02

Sumber: Papua Tengah Dalam Angka, 2024 **

Tabel 2. 34 Proporsi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,99	5,43	5,90	5,90	4,10
B. Pertambangan dan Penggalian	64,27	67,52	66,65	66,65	75,00
C. Industri Pengolahan	0,22	0,36	0,37	0,37	0,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	5,32	7,69	7,81	7,81	6,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	5,10	5,21	5,21	4,12
H. Transportasi dan Pergudangan	3,60	1,45	1,48	1,48	1,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,47	0,32	0,32	0,32	0,23
J. Informasi dan Komunikasi	0,42	2,32	2,31	2,31	1,59

K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	0,48	0,69	0,69	0,58
L. Real Estate	1,15	1,34	1,34	1,34	0,98
M.N. Jasa Perusahaan	0,92	0,60	0,59	0,59	0,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	5,47	5,40	5,40	3,47
P. Jasa Pendidikan	2,29	0,70	0,71	0,71	0,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,65	0,68	0,68	0,44
R.S.T.U. Jasa lainnya	0,47	0,51	0,51	0,51	0,39
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Papua Tengah Dalam Angka, 2024**

Tabel diatas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama tahun 2019 – 2023, dengan pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar (75,00 %). Sektor (F): Konstruksi dan sektor (G): Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar kedua dan ketiga, dengan rata-rata 6,35% dan 4,12% selama tahun 2019-2023. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang sangat mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua Tengah. Akan tetapi, terdapat penurunan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2023.

B. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang merepresentasikan Kemampuan daerah dalam bersaing secara nasional ataupun Global. IDSD akan mengukur bagaimana produktivitas suatu daerah. IDSD akan menjadi tolak ukur sejauh mana daerah dalam menghadapi perubahan daya saing global yang lebih luas.

Tabel 2. 35 Jumlah Kabupaten yang Memiliki Fasilitas Akses Kesehatan 2023-2024

No	Kabupaten	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu/Pustu
1	Nabire	1	-	32	20	131
2	Mimika	7	1	26	8	196
3	Paniai	1	-	31	1	74
4	Puncak Jaya	1	-	16	-	17
5	Dogiyai	1	1	15	-	79
6	Deiyai	1	-	10	-	7
7	Puncak	1	-	17	-	14
8	Intan Jaya	1	-	6	2	78

Sumber Data : Dinas Kesehatan Prov Papua Tengah, 2024 (data diolah)

IDSD jika dilihat dari jumlah Kabupaten yang memiliki Sarana Kesehatan terbagi dalam beberapa kategori. Dari 8 (delapan) kabupaten yang memiliki Rumah sakit terdapat 3 (tiga) rumah sakit Type C dan 5 (lima) Rumah sakit Type D yang berjalan pada tahun 2024.

2.1.5 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.5.1 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran per kapita masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengeluaran per kapita masyarakat di provinsi Papua Tengah periode tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Nabire	9.195	8.840	8.856	9.040	9.381

Mimika	12.035	11.431	11.400	11.647	12.076
Puncak Jaya	5.523	5.282	5.289	5.422	5.731
Intan Jaya	5.293	5.293	5.293	5.624	6.140
Paniai	6.767	6.361	6.377	6.554	6.977
Deiyai	4.958	4.632	4.673	4.808	5.104
Dogiyai	5.709	5.373	5.415	5.705	6.182
Puncak	5.702	5.378	5.412	5.583	5.975
Papua Tengah	6.935	6.573	6.594	6.798	7.196

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Capaian pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada beberapa kabupaten dalam jangka waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Penurunan terjadi dari tahun 2019 menuju 2020, kemudian cenderung mengalami Peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Angka tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 7.196. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.

2.1.5.2 Sarana Transportasi

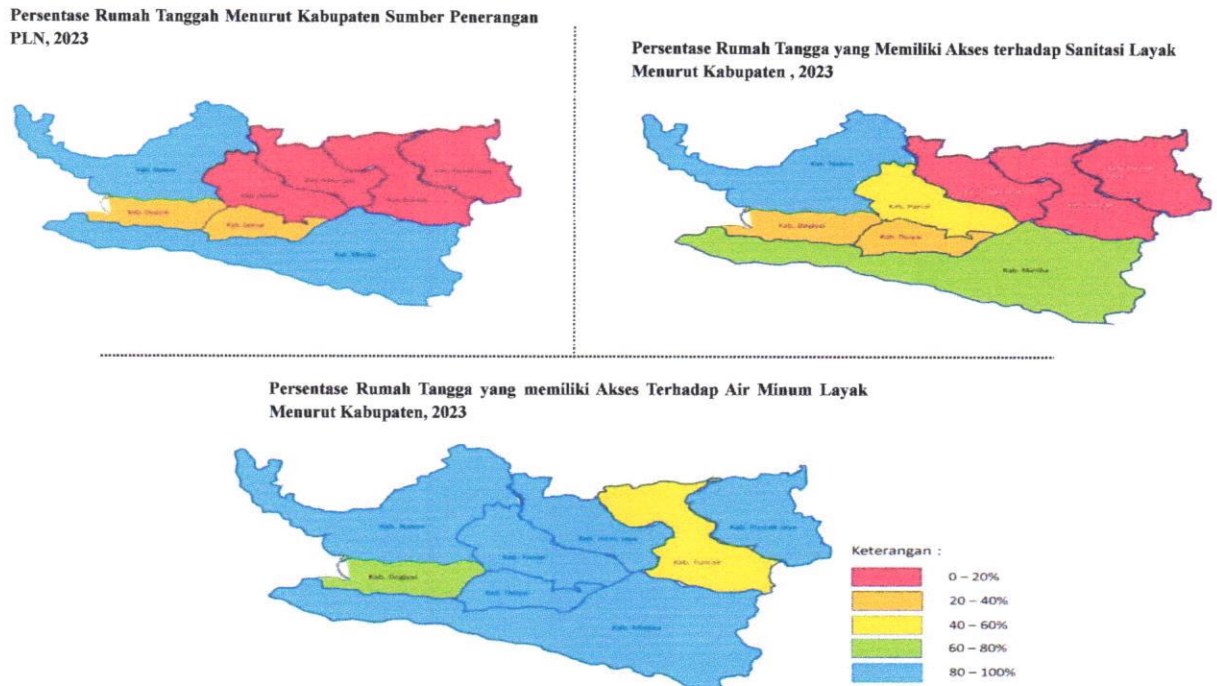
Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial dalam hal perpindahan orang dan barang. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu, maupun Risiko perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman barang, barang lebih murah dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas pada umumnya untuk lebih mudah dan sering dilakukan. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya pembangunan.

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini merupakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat aktivitas ini harus terhubung satu sama lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih luas sehingga aktivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi.

2.1.5.3 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan akses internet merupakan indikator dasar yang menjadi tolak ukur daya saing daerah. Dalam Gambar 2.13 tersaji persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki akses terhadap fasilitas tersebut. Untuk akses terhadap listrik, hampir seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap listrik (>80%), hanya kabupaten Puncak yang masih terkendala pada akses listrik (40-60%).

Gambar 2. 10 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi Provinsi Papua Tengah, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Papua Tengah 2023, data diolah

2.1.6 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.1.6.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.1.6.1.1 Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2022

No	Kab/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)								
		7-12 Tahun			13-15 Tahun			16-18 Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
1	Nabire	94,63	94,61	94,37	94,41	94,38	95,51	80,04	77,22	83,36
2	Paniai	84,02	84,07	83,12	79,82	80,88	80,17	46,62	47,56	46,56
3	Puncak Jaya	77,59	77,26	75,67	65,77	65,57	65,97	39,53	32,94	37,65
4	Mimika	94,16	95,58	95,56	95,28	95,17	94,75	81,79	72,2	84,63
5	Puncak	52,21	52,22	51,61	30,44	32,43	31,98	28,2	22,55	27,71
6	Dogiyai	85,9	85,88	85,59	84,6	83,44	83,84	57,17	65,16	65,82
7	Intan Jaya	61,92	61,45	60,96	53,27	52,79	52,34	45,91	38,8	45,1
8	Deiyai	63,78	65,82	65,35	58,85	60,05	59,52	56	53,25	46,26
Papua Tengah		76,78	77,11	76,53	70,31	70,59	70,51	54,41	51,21	54,64

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

2. Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari tahun 2019 sampai 2022. Jumlah SD, SMP dan SMA di Provinsi Papua Tengah mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Kabupaten Mimika merupakan wilayah yang memiliki fasilitas terbanyak di Provinsi Papua Tengah dengan jumlah 83 SD, 38 SMP dan 26 SMA pada tahun 2021. Untuk lebih jelas mengenai rincian jumlah fasilitas sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Jumlah Fasilitas Sekolah di Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten

No	Kab/Kota	SD			SMP			SMA/SMK			Perguruan Tinggi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17
1	Nabire	74	76	73	35	35	37	31	30	26	7	6	8
2	Paniai	86	84	72	15	14	10	12	12	11	-	-	-
3	Puncak Jaya	26	26	26	8	7	6	5	5	8	-	-	-
4	Mimika	86	87	83	40	39	38	26	26	26	8	7	6
5	Puncak	44	44	38	8	8	8	3	3	3	-	-	-
6	Dogiyai	51	54	47	11	10	10	6	5	4	1	1	1
7	Intan Jaya	23	23	31	6	6	6	2	2	2	-	-	-
8	Deiyai	35	35	34	7	7	9	4	4	4	-	-	-
Papua Tengah		425	429	404	130	126	124	89	87	84	16	14	15

Sumber : BPS Provinsi Papua 2022,

3. Perkembangan Guru dan Murid

Jumlah guru di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022. Pada Tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 14.836 dan mengalami penurunan menjadi 14.769 pada Tahun 2021/2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan guru di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39 Perkembangan Guru di Provinsi Papua Tengah Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Negeri		Swasta		Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	3.256	3.095	2.206	2.021	5.462	5.116
2	Puncak Jaya	717	620	16	18	733	638
3	Paniai	1.391	1.425	797	628	2.188	2.053
4	Mimika	3.068	3.102	1.385	1.474	4.453	4.576
5	Puncak	442	406	34	34	476	440
6	Dogiyai	417	516	283	312	700	828
7	Intan Jaya	62	55	62	65	124	120
8	Deiyai	622	786	78	212	700	998
Papua Tengah		9.975	10.005	4.861	4.764	14.836	14.769

Sumber : Sumber : BPS Provinsi Papua 2022,

Jumlah murid di Provinsi Papua Tengah stabil dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 10.754 dan mengalami peningkatan menjadi 11.094 pada tahun 2021/2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Perkembangan Murid di Provinsi Papua Tengah Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Negeri		Swasta		Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	2.019	1.945	1.145	1.017	3.164	2.962
2	Paniai	269	343	847	855	1.116	1.198
3	Puncak Jaya	237	324	0	0	237	324
4	Paniai	269	343	847	855	1.116	1.198
5	Mimika	2.314	2.365	3.137	3.151	5.451	5.516
6	Puncak	74	46	34	34	108	80
7	Dogiyai	98	157	331	350	429	507
8	Intan Jaya	62	55	0	0	62	55
Papua Tengah		5.162	5.325	5.592	5.769	10.754	11.094

Sumber : BPS Provinsi Papua 2022, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tengah 2024

2.1.6.1.2 Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2. 41 Angka Kematian Bayi Tahun 2020

No	Kab/Kota	Angka Kematian Bayi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 1000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	68	3.372	20,2
2	Puncak Jaya	0	532	0,0
3	Paniai	5	0	0,0
4	Mimika	11	2.821	3,9
5	Puncak	0	206	0,0
6	Dogiyai	14	1.099	12,7
7	Intan Jaya	0	86	0,0
8	Deiyai	0	0	0
Papua Tengah		98	8.116	12,07

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua Tengah merupakan akumulasi dari 8 kabupaten/kota.

2. Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Tabel 2. 42 Angka Kematian Ibu Tahun 2020

No.	Kab/Kota	Angka Kematian Ibu		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 100.000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	4	3.372	119
2	Puncak Jaya	2	532	376
3	Paniai	2	0	0
4	Mimika	2	2.821	71
5	Puncak	0	206	0
6	Dogiyai	6	1.099	546
7	Intan Jaya	1	86	1.163
8	Deiyai	0	0	0
Papua Tengah		17	8.116	209

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua Tengah per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka kematian ibu mencapai angka 209.

2.1.6.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

• Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua Tengah terdapat pada Kabupaten Mimika dengan total 162,1 km (35,9%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Dogiyai merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua Tengah dengan 8 km

(1,77%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 43 Panjang Jalan di Provinsi Papua Tengah (km)

No	Kab/Kota	Provinsi	Aspal	Lainnya
1	2	3	4	5
1	Nabire	Papua Tengah	832,9	53
2	Paniai	Papua Tengah	280,9	12,1
3	Puncak Jaya	Papua Tengah	11,61	261,5
4	Mimika	Papua Tengah	765,10	134,8
5	Puncak	Papua Tengah	392	27,29
6	Dogiyai	Papua Tengah	0	8
7	Intan Jaya	Papua Tengah	19,603	275,69
8	Deiyai	Papua Tengah	0	72,5

Sumber : BPS Provinsi Papua,2023

Gambar 2. 11 Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Tengah



Sumber data: Ranwal RTRW Papua Tengah, 2023-2043

2.1.6.1.4 Urusan Perumahan Rakyat

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Terdapat akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua Tengah semenjak tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 2.165 unit. Adapun jumlah rumah layak huni selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 44 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua Tengah 2018-2022

No	Kab/Kota	Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Nabire	152	148	148	10	-	500
2	Puncak Jaya	27	54	42	18	37	203
3	Paniai	40	38	35	15	10	138
4	Mimika	90	359	292	117	18	933
5	Puncak	-	-	-	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-	-	-	-
7	Intan Jaya	32	68	8	165	11	331
8	Deiyai	-	-	-	60	-	60

No	Kab/Kota	Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	9
Papua Tengah		341	667	525	385	76	2.165

Sumber : Dinas Perumahan dan Dinsos Kabupaten Lingkup Provinsi Papua Tengah, 2022

2.1.6.1.5 Urusan Ketenteraman Perlindungan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pengamanan di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45 Jumlah Polisi Pamong Praja per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 2020-2022

No	Kab/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	-	-	113
2	Puncak Jaya	-	-	35
3	Paniai	-	-	25
4	Mimika	-	-	-
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	30	32	29
8	Deiyai	-	-	-
Papua Tengah		30	32	202

Sumber : Bps Provinsi Papua, 2023

2.1.6.1.6 Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua.

Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.

1. Keagamaan
Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua Tengah cenderung terjadi peningkatan sepanjang tahun 2018-2022. Tercatat sampai dengan tahun 2022 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 18,31 unit. Artinya 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 18 unit tempat ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang

cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 8 kabupaten/kota sepanjang tahun 2018-2022 sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Rasio Tempat Ibadah Per 10.0000 Penduduk Provinsi Papua Tengah

No	Kab/Kota	Provinsi	Wil. Adat	Tahun		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	Papua Tengah	Mee Pago	28,33	27,88	38,74
2	Paniai	Papua Tengah	Mee Pago	14,07	13,75	10,53
3	Puncak Jaya	Papua Tengah	La Pago	19,35	18,87	27,97
4	Mimika	Papua Tengah	Mee Pago	12,85	12,61	18,51
5	Puncak	Papua Tengah	La Pago	1,89	1,86	22,37
6	Dogiyai	Papua Tengah	Mee Pago	14,7	14,5	9,37
7	Intan Jaya	Papua Tengah	Mee Pago	1,64	1,62	10,87
8	Deiyai	Papua Tengah	Mee Pago	11,86	11,75	8,18

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

Tabel 2. 47 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua				
		Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
		2020	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	202	328	52	7	3
2	Paniai	13	125	52	-	-
3	Puncak Jaya	2	370	2	-	-
4	Mimika	134	207	70	1	2
5	Puncak	2	251	5	-	-
6	Dogiyai	1	81	11	-	-
7	Intan Jaya	1	52	2	-	-
8	Deiyai	1	42	18	-	-
Provinsi Papua		356	1.456	212	8	5

Sumber: BPS Provinsi Papua (Kementerian Agama Provinsi Papua)

2.1.6.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.6.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), prosentase kesempatan kerja, prosentase angkatan kerja yang kerja serta distribusi lapangan pekerjaan merupakan gambaran yang bermanfaat untuk melihat prospek ekonomi suatu daerah. TPAK merupakan rasio antara banyaknya penduduk angkatan kerja dengan banyaknya Penduduk usia kerja. Hal ini menggambarkan banyaknya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik itu dengan bekerja ataupun mencari kerja.

Tabel 2. 48 Tingkat Partisipasi Angka Kerja Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Nabire	78.857	75.658	3.199	35.176	69,15	6,65
2	Puncak Jaya	167.950	166.724	1.226	27.949	85,73	1,74
3	Paniai	127.259	125.667	N/A	53.731	70,31	0,66
4	Mimika	145.828	139.995	5.833	73.047	66,63	5,35

No	Kab/Kota	Angkataan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
5	Puncak	89.265	89.054	N/A	6.338	93,37	0,94
6	Dogiyai	80.269	78.347	N/A	9.501	89,42	0,21
7	Intan Jaya	94.091	91.062	N/A	19.560	82,79	0,00
8	Deiyai	51.421	50.662	N/A	23.350	86,77	0,79
Papua Tengah		834.940	817.169	10.258	248.652	80.52	2,48

Sumber : BPS Provinsi Papua, ,Papua Tengah Dalam Angka PPT 2024

1. Angkatan Kerja Aparatur Sipil Negara

Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Tengah mencapai 8.116 jiwa atau sebesar 39,9% dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan jumlah pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.629 atau sebesar 32% pegawai negeri sipil perempuan berasal dari Kabupaten Mimika. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2022

No	Kab/Kota	PNS (Jenis Kelamin)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Nabire	2.377	1.968	4.345
2	Puncak Jaya	1.665	612	2.277
3	Paniai	1.577	688	2.265
4	Mimika	1.995	2.629	4.624
5	Puncak	1.427	490	1.917
6	Dogiyai	1.258	585	1.843
7	Intan Jaya	910	585	1.495
8	Deiyai	1.014	559	1.573
Papua Tengah		12.223	8.116	20.339

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

2.1.6.2.2 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi proses registrasi penduduk, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan proses administrasi lainnya yang berkaitan dengan data kependudukan. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki tujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki identitas resmi yang sah dan memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan publik serta menjalankan fungsi pemerintahan lainnya. Adapun Data Kependudukan pada Provinsi Papua Tengah Khusus Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan table di bawah ini :

Tabel 2. 50 Jumlah Penduduk Orang Asli Papua Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Nabire	58.054	51.394	109.448
2	Puncak Jaya	111.944	96.247	208.191
3	Paniai	66.314	54.267	120.581
4	Mimika	107.000	92.345	199.345
5	Puncak	90.393	80.573	170.966
6	Dogiyai	59.839	54.823	114.662

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
7	Intan Jaya	66.935	59.903	126.838
8	Deiyai	47.843	42.397	90.240
Papua Tengah		608.322	531.949	1.140.271

Sumber Data : Dinas Dukcapil Prov Papua Tengah, 2024 (data diolah)

2.1.6.2.3 Urusan Perhubungan

Sektor transportasi merupakan salah satu jaringan distribusi barang dan orang/ penumpang yang berkembang sangat dinamis. Selain itu, sektor transportasi juga berperan di dalam mendukung, mendorong serta menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dalam kapasitas yang tersedia, kualitas layanan, aksesibilitas, keterjangkauan beban publik, dan utilisasi. Sistem jaringan transportasi di Provinsi Papua Tengah dibagi menjadi jaringan jalan, terminal, jalan rel, jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, jaringan transportasi laut, dan bandar udara.

A. Transportasi Darat

1). Jalan

Jaringan jalan memiliki keterkaitan yang menunjang tercapainya struktur tata ruang suatu wilayah untuk mendukung kegiatan secara optimal sesuai dengan hierarkinya. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Sedangkan kondisi jaringan jalan Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada sumber Rencana pengembangan jaringan jalan di Provinsi Papua dalam RTRW Provinsi induk Papua tahun 2013, dan sistem jaringan jalan strategis Nasional dan jalan nasional. Jaringan jalan yang terdapat di Provinsi Papua Tengah berdasarkan data RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 yaitu :

1. Jalan Nasional

- a. Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura – Sami – Mamberamo Raya – Waropen - Nabire;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Kimibay-Batas Kota Nabire
- c. Jaringan Jalan Arteri Primer Timika – Waghete- Enarotali
- d. Jaringan jalan Arteri primer Wamena – Karubaga - Mulia

2. Jalan Provinsi

- a. Jaringan jalan kolektor primer Nabire – Waghete - Enarotali;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Enarotali – Sugapa.

2). Rel Kereta Api

Transportasi jalan rel terdiri dari jaringan prasarana, sarana transportasi kereta, dan simpul transportasi kereta api. Hingga saat ini transportasi jaringan jalan rel belum tersedia di wilayah Provinsi Papua. Padahal potensi moda kereta api ini lebih baik daripada moda transportasi darat lainnya dari sisi kapasitas angkut yang lebih banyak, baik untuk barang maupun penumpang, jarak tempuh yang cukup jauh, dengan biaya transportasi yang relatif lebih murah, dan tingkat polusi yang rendah. Pada kondisi *eksisting*, jalur kereta api masih belum tersedia, namun berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 terdapat rencana pengembangan jaringan pelayanan transportasi kereta api di Provinsi Papua Tengah adalah:

- a. Lintas Jayapura-Sami-Nabire
- b. Lintas Nabire-Manokwari-Sorong
- c. Lintas Nabire-Timika

Sedangkan arahan pengembangan simpul transportasi kereta api berupa stasiun di kota pusat pertumbuhan, atau pusat produksi barang yang dilalui jalan rel yaitu:

Tabel 2. 51 Arahkan pengembangan Simpul Transportasi Kereta Api di Provinsi Papua

No	Rute	Lokasi Kabupaten	Lokasi Stasiun
1	Jayapura-Sarmi-Nabire	Kota/Kab. Jayapura-Sarmi-Mamberamo Raya-Waropen-Nabire.	Jayapura, Depapre, Sarmi, Trimuris, Botawa, Nabire.
2	Nabire-Manokwari (Papua Barat)	Nabire-Papua Barat	Nabire
3	Nabire-Timika	Nabire-Dogiyai-Deiyai-Paniai-Mimika.	Nabire, Moanamani, Waghete, Enarotali, Timika, Pomako.

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

3). Terminal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antar kota antar provinsi. Sedangkan terminal penumpang tipe B merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi. Lokasi terminal penumpang tipe A memiliki kriteria sebagai berikut:

- Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan
- Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara atau rencana pengembangan jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara

Lokasi terminal penumpang tipe B memiliki kriteria sebagai berikut:

- Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan
- Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033, lokasi dan tipe terminal di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terminal Tipe A
 - a. Terminal Nabire – Kabupaten Nabire
2. Terminal Tipe B
 - a. Terminal Oyehe – Kabupaten Nabire
 - b. Terminal Mulia – Kabupaten Puncak Jaya
 - c. Terminal Timika – Kabupaten Mimika
 - d. Terminal Waghete – Kabupaten Deiyai
 - e. Terminal Enarotali – Kabupaten Paniai
 - f. Terminal Waghete – Kabupaten Deiyai

4). Transportasi Udara

A. Bandar Udara

Berdasarkan pada hierarki, bandar udara merupakan pusat pelayanan yang terdiri atas:

1. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
2. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
3. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

4. Bandar udara pengumpan merupakan Bandar udara tujuan atau penunjang bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal

Di Provinsi Papua Tengah, pengembangan bandara pengumpul dengan skala pelayanan tersier tahun 2013-2033 dilakukan pada:

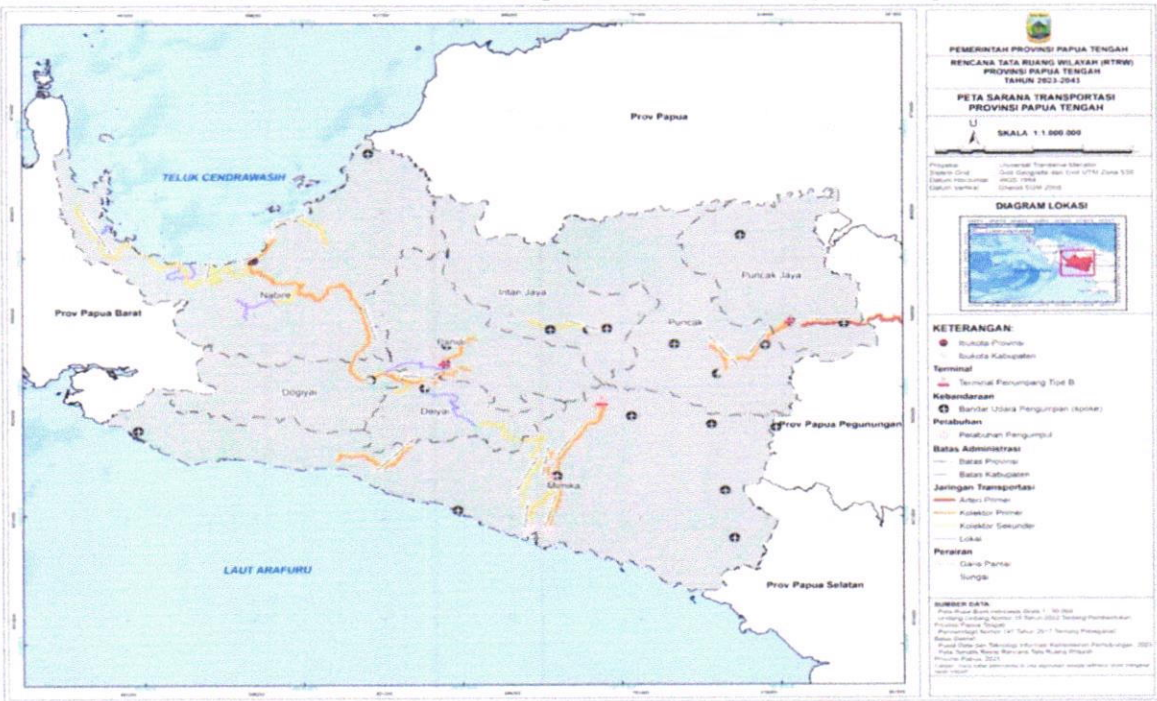
- a. Bandar Udara Wanggar di Kabupaten Nabire;
 - b. Bandar Udara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika;
- Rencana pengembangan bandara pengumpan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2013-2033.

Tabel 2. 52 Bandara Pengumpan di Provinsi Papua Tahun 2013-2033 yang Akan Dikembangkan

No	Nama Bandara	Lokasi
	Bandara Mulia	Puncak Jaya
	Bandara Sinak	Puncak
	Bandara Waghete	Deiyai
	Bandara Illu	Puncak Jaya
	Bandara Illaga	Puncak
	Bandara Beoga	Intan Jaya
	Bandara Fawi	Puncak Jaya
	Bandara Sugapa	Intan Jaya
	Bandara Enarotali	Paniai
	Bandara Obano	Paniai
	Bandara Moanamani	Dogiyai
	Bandara Kokonao	Mimika
	Bandara Jila	Mimika
	Bandara Ugimuga	Mimika
	Bandara Potowai	Mimika
	Bandara Alama	Mimika
	Bandara Jita	Mimika
	Bandara Agimuga	Mimika

Sumber : Hasil Rencana Tahun 2012

Gambar 2. 12 Peta Transportasi Provinsi Papua Tengah



2.1.6.2.4 Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Layanan telekomunikasi dapat diindikasikan dari penerimaan sinyal internet telepon seluler.

Tabel 2. 53 Banyaknya Desa/Kampung menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Papua Tengah, 2021

Kabupaten/Kota	4G/LTE	3G/H/H +/ EVDO	2,5G/E / GPRS	None
Nabire	29	5	13	8
Paniai	-	1	25	91
Puncak Jaya	8	12	20	75
Mimika	53	7	-	6
Puncak	-	1	-	52
Dogiyai	-	2	19	14
Intan Jaya	-	-	-	16
Deiyai	3	1	4	40
Jumlah	930	228	360	938

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa layanan telekomunikasi yang memadai dengan sinyal 4G/LTE hanya terdapat di beberapa kabupaten di antaranya Mimika, Nabire, dan Puncak Jaya. Sedangkan di kabupaten lainnya, masih cukup banyak kampung yang belum terlayani koneksi internet yang memadai.

2.1.6.2.5 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Adapun data Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM pada Provinsi Papua Tengah Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 54 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2020-2024

No	Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nabire	-	-	216	232	278
2	Paniai	-	-	201	221	230
3	Puncak Jaya	-	-	19	19	19
4	Mimika	-	-	197	237	268
5	Puncak	-	-	31	32	33
6	Dogiyai	-	-	6	8	10
7	Intan Jaya	-	-	99	99	100
8	Deiyai	-	-	56	56	58
	Jumlah	-	-	825	904	996

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, 2025

7	Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

2.1.6.3.2 Urusan Perikanan dan Kelautan

A. Sumber Daya buatan dan Jasa Kelautan

1. Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PERMEN-KP No. 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yaitu WPP 717 sebelah utara dan 718 sebelah selatan. Sesuai amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pelabuhan perikanan menjadi dasar Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan amanah sesuai dengan kewenangannya. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan Pelabuhan Perikanan tipe D, semula kewenangan pengelolaannya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota (Permen KP No.08 Tahun 2012), berdasarkan UU 23 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Tahapan P3D.

Tabel 2.58 sebaran Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua Tengah

No	Pelabuhan	Kabupaten	WPP	Kewenangan Pengelolaan	Status
1	2	3	4	5	6
1	PP. Waharia	Kab. Nabire	717	Provinsi	Operasional dan PPI
2	PP. Pomako	Kab. Mimika	718	Provinsi	Operasional dan PPI

Sumber Data: DKP Papua, 2020

Kategori Pelabuhan perikanan di Provinsi Papua Tengah dibagi dalam klaster peruntukannya yaitu pangkalan pendaratan ikan (2 unit) PPI Poumako di Kabupaten Mimika, PPI Waharia di Kabupaten Nabire (DKP Papua, 2020). Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas P2KP Provinsi Papua Tengah, Pelabuhan Perikanan juga merupakan fasilitator pembangunan bidang perikanan di wilayah utara Provinsi Papua Tengah dan di wilayah selatan Papua Tengah, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas bisnis usaha perikanan tangkap untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan berkesinambungan.

B. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua Tengah memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua Tengah terbagi dua, yaitu perairan utara Papua Tengah tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km²) sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua Tengah masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki potensi sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumber daya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua Tengah. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Tengah Utara dengan pusat kegiatan di Nabire;
- Laut Papua Tengah dengan pusat kegiatan di Mimika.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Perikanan tangkap yang digunakan oleh masyarakat relatif masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

Tabel 2. 59 Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	2.905	2.936	2.910
2	Paniai	-	-	-
3	Puncak Jaya	-	-	-
4	Mimika	-	250	300
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-
8	Deiyai	-	-	-
Papua Tengah		3.011	3.042	3.016

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

Tabel 2.60 Volume Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap menurut Kabupaten di Papua Tengah Tahun 2023

No	Kab/Kota	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Tangkap di perairan Darat	
		Ton	Rupiah	Ton	Rupiah
1	2	3	4	5	
1	Nabire	13.602.656	414.210.289.700	22.099	749.994.500
2	Paniai	-	-	738.034	24.116.080.000
3	Puncak Jaya	-	-	-	-
4	Mimika	1.258.800	42.336.200.000	-	-
5	Puncak	-	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-	-
8	Deiyai	-	-	107.724	3.982.277.500
Papua Tengah		14.861.456	456.546.489.700	867.857	28.848.352.000

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

C. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua Tengah memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada produksi budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut :

- Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih di Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Timika.
- Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika.
- Perikanan budidaya air tawar (kolam) yang berada pada 8 (delapan Kabupaten) yaitu Kab Nabire, Kab. Timika, Kab. Paniai, Kab.Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Tengah tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan nila.

Tabel 2. 61 Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	53	53	53
2	Paniai	-	-	-
3	Puncak Jaya	-	-	-
4	Mimika	-	159	159
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	154	154
7	Intan Jaya	-	-	-
8	Deiyai	12	12	12
Papua Tengah		65	65	65

Sumber : BPS Provinsi Papua 2022 & data diolah Perangkat Daerah data Sementara **

Tabel 2.62 Volume Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya menurut Kabupaten di Papua Tengah Tahun 2023

No	Kab/Kota	Sungai		Danau	
		Ton	Rupiah	Ton	Rupiah
1	2	3	4	5	
1	Nabire	-	-	-	-
2	Paniai	-	-	738.034	24.116.080.000
3	Puncak Jaya	-	-	-	-
4	Mimika	22.099	749.994.500	-	-
5	Puncak	-	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-	-
8	Deiyai	-	-	107.724	3.982.277.500
Papua Tengah		22.099	749.994.500	845.768	28.098.357.500

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

2.1.6.3.3 Urusan Pertanian

Produksi komoditas di Provinsi Papua Tengah paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua Tengah mencapai 7.356,28 Ton dan produksi padi setara beras mencapai 4.178,72 Ton. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupaten Nabire. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian produksi komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Produksi Komoditas Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 2025

No	Kabupaten	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)	Produksi Kopi
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	7.312,00	4.153,56	991,00	725,00	-
2	Puncak Jaya	-	-	-	-	352.653
3	Paniai	-	-	346,00	113,00	231.211
4	Mimika	44,28	25,16	128,00	106,00	-
5	Puncak	-	-	182,00	-	349.875
6	Dogiyai	-	-	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-	-	-
8	Deiyai	-	-	-	-	331.431
Jumlah		7.356,28	4.178,72	1.647,00	944,00	1.265.170

Sumber : BPS Prov Papua, 2023

2.1.6.3.3. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Pasar sebagai salah satu sarana distribusi mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian, baik bagi produsen, pelaku kegiatan perdagangan, maupun konsumen. Selain pasar, terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti swalayan, warung, dan toko.

Sarana perdagangan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari pasar tradisional, swalayan, dan warung/toko. Pada tahun 2022 tercatat bahwa jumlah pasar terbanyak berada di Kabupaten Nabire dengan jumlah 36 unit. Namun demikian, jumlah total sarana perdagangan yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 5.652 unit.

Tabel 2. 64 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2023

No	Kabupaten	Pasar	Swalayan	Warung/Toko
1	2	3	4	5
1	Nabire	36	15	1.515
2	Puncak Jaya	-	-	-
3	Paniai	-	-	-
4	Mimika	16	50	5.586
5	Puncak	5	2	-
6	Dogiyai	14	16	-
7	Intan Jaya	4	-	-
8	Deiyai	1	-	117
Jumlah		76	83	7.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 RTRW Papua Tengah 2023-2024 **

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu daerah. Kinerja Pemerintah Daerah dapat di ukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali di gunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah yang disetujui melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Tengah dikelompokkan atas: (1) Pendapatan ; (2) Belanja; (3) Pembiayaan. Secara nominal penetapan target dan capaian realisasi Pendapatan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Tengah terjadi peningkatan sepanjang periode 2022 sampai dengan 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 65 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 s/d Tahun 2024*)

No	Uraian	Ta. 2022 (Rp)	Ta. 2023 (Rp)	Ta. 2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	499.855.205.617,00	536.032.229.926,00	7,24
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	492.274.971.900,00	528.451.996.209,00	7,35
1.1.2	Retribusi Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	7.578.233.717,00	7.578.233.717,00	0,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	1.830.679.615.000,00	2.704.261.413.000,00	47,72
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	1.830.679.615.000,00	2.704.261.413.000,00	47,72
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.000.000.000,00	386.634.134.688,00	888.695.877.319,00	129,85
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.000.000.000,00	386.634.134.688,00	888.695.877.319,00	129,85
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	42.000.000.000,00	2.717.168.955.305,00	4.128.989.520.245,00	51,96
2	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA OPERASI	31.446.658.500,00	1.626.283.288.154,00	2.784.544.005.346,00	71,22
2.1.1	Belanja Pegawai	1.325.680.000,00	153.377.922.890,00	369.143.107.497,00	140,68
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.845.978.500,00	1.093.766.155.683,00	1.895.641.897.356,00	73,31
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	9.224.787.410,00	100,00
2.1.5	Belanja Hibah	2.075.000.000,00	224.053.882.108,00	363.706.233.550,00	62,33
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	155.085.327.473,00	146.827.979.533,00	(5,32)
2.2	BELANJA MODAL	9.106.253.000,00	808.133.518.594,00	1.363.958.491.937,00	68,78
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	185.880.036.681,00	41.063.129.600,00	(77,91)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.196.244.900,00	138.580.027.006,00	221.523.061.054,00	59,85
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	99.957.151.863,00	360.804.636.433,00	260,96
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000,00	375.382.890.444,00	735.410.664.850,00	95,91
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	850.008.100,00	637.050.000,00	950.000.000,00	49,12
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	7.696.362.600,00	4.207.000.000,00	(45,34)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.447.088.500,00	16.653.946.376,00	99.804.562.224,00	499,28
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.447.088.500,00	16.653.946.376,00	99.804.562.224,00	499,28
2.4	BELANJA TRANSFER	0,00	291.490.409.132,00	382.500.453.306,00	31,22

2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	256.490.409.132,00	322.500.453.306,00	25,74
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	35.000.000.000,00	60.000.000.000,00	71,43
	JUMLAH BELANJA DAERAH	42.000.000.000,00	2.742.561.162.256,00	4.630.807.512.812,00	68,85
	SURPLUS/(DEFISIT)	0,00	(25.392.206.951,00)	(501.817.992.567,00)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	25.392.206.951,00	501.817.992.567,00	1.876,27
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	25.392.206.951,00	501.817.992.567,00	1.876,27
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	25.392.206.951,00	501.817.992.567,00	1.876,27
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	25.392.206.951,00	501.817.992.567,00	1.876,27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

Jika diperhatikan ketiga komponen APBD diatas, komponen Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan di Provinsi Papua Tengah meningkat drastis dari tahun ke tahun , hal ini di sebabkan karena di tahun 2022 Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang baru terbentuk dan sudah harus menjalankan pemerintahannya dengan pembiayaan yang berasal dari pendapatan transfer dari Provinsi Papua (Provinsi induk) ditambah dengan Hibah dari Kabupaten yang masuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Di Tahun 2023, pendapatan mengalami peningkatan dikarenakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mendapatkan alokasi APBD penuh dari Pusat ditambah dengan pendapatan lainnya. Tahun 2024 pun pendapatan mengalami peningkatan, adapun peningkatan yang cukup signifikan diperoleh dari dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pendapatan lainnya yang Sah.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan Sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis Risiko ikuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Tabel 2. 66 Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Papua Tengah

No	Uraian	Rata-rata pertumbuhan 2022 - 2024 (%)
1	ASET	87,95
1.1	ASET LANCAR	77,30
1.1.1	Kas	81,94
1.1.2	Piutang	6,61
1.1.3	Persediaan	84,53
1.2	ASET TETAP	102,82
1.2.1	Tanah	9,59
1.2.2	Peralatan dan Mesin	209,78
1.2.3	Gedung dan Bangunan	252,99
1.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	51,11
1.2.5	Aset Tetap lainnya	1.809,23

No	Uraian	Rata-rata pertumbuhan 2022 - 2024 (%)
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
1.3	ASET LAINNYA	15,33
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
1.3.2	Tagihan Tuntutan ganti kerugian daerah	0,00
1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua	0,00
1.3.4	Aset tak Berwujud	72,05
	JUMLAH ASET DAERAH	87,95
2	KEWAJIBAN	58,55
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	58,55
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	0,00
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0,00
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	0,00
2.1.4	Utang Belanja	58,55
3	EKUITAS DANA	93,33
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	93,33
3.1.1	Ekuitas	93,33

Sumber : BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal (investasi daerah), dan pembayaran pokok utang.

2.2.1.4 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh Tabel 2.67 sebagai berikut:

Tabel 2. 67 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 s/d Tahun 2024

No	Uraian	Total belanja Pegawai (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	%
1	TA. 2022	1.325.680.000,00	42.000.000.000,00	3,16
2	TA. 2023	153.377.922.890,00	2.742.561.162.256,00	5,59
3	TA. 2024	369.143.107.497,00	4.630.807.512.812,00	7,97

Sumber data: BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

Perlu di perhatikan bahwa dalam pengalokasian anggaran belanja aparatur harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan satu tahun anggaran. Diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target dan realisasi belanja. Berdasarkan Tabel 2.57 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja aparatur selama periode 2022-2024, di setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan terdapat alokasi anggaran untuk penambahan aparatur dari Provinsi Induk (Papua) berikut gaji dan tunjangan melekat, dan untuk belanja pegawai honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah.

2.2.1.5 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan Pembiayaan selama tahun 2022- 2024 sebagaimana tabel 2.68.

Tabel 2. 68 Defisit Riil Anggaran Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 s/d Tahun 2024

No	Uraian	TA 2022	TA 2023	TA 2024**)
1	Pendapatan Daerah	42.000.000.000,00	2.717.168.955.305,00	4.128.989.520.245,00
2	Belanja Daerah	42.000.000.000,00	2.742.561.162.256,00	4.630.807.512.812,00
3	Surplus/(Defisit)	0,00	(25.392.206.951,00)	(501.817.992.567,00)
4				
5	Penerimaan Pembiayaan	0,00	25.392.206.951,00	501.817.992.567,00
6	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
7	Pembiayaan Netto	0,00	25.392.206.951,00	501.817.992.567,00
8				
9	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	0,00

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

Kurun waktu tahun 2022-2024 Realisasi Pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan demikian juga dengan belanja daerah. Defisit ditahun 2023-2024 defisit riil nihil.

Tabel 2. 69 Komposisi Penutup Defisit Riil Realisasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 s/d Tahun 2024

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)		
		2002	2023	2024**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,00	25.392.206.951,00	501.817.992.567,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

Dari Tabel 2.69 terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2022-2024), terdapat kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) yang sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Pada pelampauan pendapatan banyak dipengaruhi adanya optimalisasi pendapatan daerah sedangkan penghematan belanja banyak dipengaruhi oleh sisa belanja atas pengadaan barang dan jasa.

Tabel 2. 70 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 s/d Tahun 2024

No.	Uraian	2022		2023		2024**	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A
1.	Jumlah SiLPA	0,00	0,00	25.392.206.951	100	501.817.992.567	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

2.2.1.6 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yaitu :

- a. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar ;
- b. Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah ;
- c. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

2.2.1.7 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pada bagian ini akan diproyeksikan pendapatan daerah berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut berasal dari pendapatan Daerah tahun 2022 – 2024, sedangkan untuk data Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2026 diperoleh dari surat usulan masing-masing Perangkat Daerah Penghasil. Berikut adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:

Tabel 2. 71 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 s/d 2030 Provinsi Papua Tengah

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	616.815.676.100,00	709.792.421.538,00	816.806.617.596,00	939.982.069.628,00	1.081.764.791.344,00	1.081.764.791.344,00
1.1.1	Pajak daerah	607.719.795.640,00	698.877.764.986,00	803.709.429.734,00	924.265.844.194,00	1.062.905.720.823,00	1.062.905.720.823,00
1.1.2	Retribusi daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	9.093.880.460,00	10.912.656.552,00	13.095.187.862,00	15.714.225.434,00	18.857.070.521,00	18.857.070.521,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.974.687.554.300,00	3.272.156.309.730,00	3.599.371.940.703,00	3.959.309.134.774,00	4.355.240.048.252,00	4.355.240.048.252,00
1.2.1	Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	1.602.711.016.500,00	1.762.982.118.150,00	1.939.280.329.965,00	2.133.208.362.962,00	2.346.529.199.259,00	2.346.529.199.259,00
1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	871.199.907.600,00	958.319.898.360,00	1.054.151.888.196,00	1.159.567.077.016,00	1.275.523.784.718,00	1.275.523.784.718,00
1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	549.523.374.400,00	604.475.711.840,00	664.923.283.024,00	731.415.611.326,00	804.557.172.459,00	804.557.172.459,00
1.2.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	169.651.766.900,00	186.616.943.590,00	205.278.637.949,00	225.806.501.744,00	248.387.151.918,00	248.387.151.918,00
1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	12.335.967.600,00	13.569.564.360,00	14.926.520.796,00	16.419.172.876,00	18.061.090.164,00	18.061.090.164,00
1.2.2	Pendapatan Transfer-Lainnya	1.371.976.537.800,00	1.509.174.191.580,00	1.660.091.610.738,00	1.826.100.771.812,00	2.008.710.848.993,00	2.008.710.848.993,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	636.173.011.100,00	699.790.312.210,00	769.769.343.431,00	846.746.277.774,00	931.420.905.551,00	931.420.905.551,00
1.2.2.2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	735.803.526.700,00	809.383.879.370,00	890.322.267.307,00	979.354.494.038,00	1.077.289.943.442,00	1.077.289.943.442,00

1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.022.000.258.917,00	1.175.300.297.755,00	1.351.595.342.418,00	1.554.334.643.781,00	1.787.484.840.348,00	1.787.484.840.348,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.022.000.258.917,00	1.175.300.297.755,00	1.351.595.342.418,00	1.554.334.643.781,00	1.787.484.840.348,00	1.787.484.840.348,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.613.503.489.317,00	5.157.249.029.023,00	5.767.773.900.717,00	6.453.625.848.183,00	7.224.489.679.944,00	7.224.489.679.944,00
2	BELANJA						
2.1	BELANJA OPERASI	3.087.353.412.521,00	3.426.676.866.846,00	3.828.506.589.102,00	4.272.860.808.529,00	4.809.915.239.125,00	4.809.915.239.125,00
2.1.1	Belanja Pegawai	442.971.728.996,00	531.566.074.795,00	637.879.289.754,00	765.455.147.705,00	918.546.177.246,00	918.546.177.246,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.079.988.181.959,00	2.281.986.409.253,00	2.524.284.370.641,00	2.802.927.026.237,00	3.125.366.080.173,00	3.125.366.080.173,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	10.147.266.151,00	11.161.992.766,00	12.278.192.043,00	13.506.011.247,00	14.856.612.372,00	14.856.612.372,00
2.1.5	Belanja Hibah	400.076.856.905,00	440.084.542.596,00	484.092.996.856,00	512.502.296.542,00	563.752.526.196,00	563.752.526.196,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	154.169.378.510,00	161.877.847.436,00	169.971.739.808,00	178.470.326.798,00	187.393.843.138,00	187.393.843.138,00
2.2	BELANJA MODAL	1.544.742.351.894,00	1.749.822.700.185,00	1.926.179.075.914,00	2.131.494.163.353,00	2.324.884.234.897,00	2.324.884.234.897,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	45.990.705.152,00	51.509.589.770,00	57.690.740.542,00	64.613.629.407,00	72.367.264.936,00	72.367.264.936,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.751.520.212,00	292.964.248.244,00	336.908.885.481,00	387.445.218.303,00	445.562.001.048,00	445.562.001.048,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	414.925.331.898,00	477.164.131.683,00	548.738.751.435,00	631.049.564.150,00	725.706.998.773,00	725.706.998.773,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	823.659.944.632,00	922.499.137.988,00	976.870.826.331,00	1.042.117.385.761,00	1.074.666.186.121,00	1.074.666.186.121,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	997.500.000,00	1.047.375.000,00	1.099.743.750,00	1.154.730.938,00	1.212.467.485,00	1.212.467.485,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.417.350.000,00	4.638.217.500,00	4.870.128.375,00	5.113.634.794,00	5.369.316.534,00	5.369.316.534,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	77.311.578.684,00	50.191.352.958,00	52.700.920.606,00	55.335.966.636,00	58.102.764.968,00	58.102.764.968,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	77.311.578.684,00	50.191.352.958,00	52.700.920.606,00	55.335.966.636,00	58.102.764.968,00	58.102.764.968,00
2.4	BELANJA TRANSFER	415.950.498.636,00	452.649.548.500,00	492.920.583.350,00	537.118.843.285,00	585.635.053.246,00	585.635.053.246,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	354.750.498.636,00	390.225.548.500,00	429.248.103.350,00	472.172.913.685,00	519.390.205.054,00	519.390.205.054,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	61.200.000.000,00	62.424.000.000,00	63.672.480.000,00	64.945.929.600,00	66.244.848.192,00	66.244.848.192,00
	JUMLAH BELANJA	5.125.357.841.735,00	5.679.340.468.489,00	6.300.307.168.972,00	6.996.809.781.803,00	7.778.537.292.236,00	7.778.537.292.236,00

	SURPLUS/(DEFISIT)	(511.854.352.418,00)	(522.091.439.466,00)	(532.533.268.255,00)	(543.183.933.620,00)	(554.047.612.292,00)	(554.047.612.292,00)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	511.854.352.418,00	522.091.439.466,00	532.533.268.255,00	543.183.933.620,00	554.047.612.292,00	554.047.612.292,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	511.854.352.418,00	522.091.439.466,00	532.533.268.255,00	543.183.933.620,00	554.047.612.292,00	554.047.612.292,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber data: BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

2.2.1.8 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah) serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas dimaksud.

Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang, tertuang pada Tabel 2.62.

Tabel 2. 72 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	616.815.676.100,00	709.792.421.538,00	816.806.617.596,00	939.982.069.628,00	1.081.764.791.344,00	1.081.764.791.344,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.974.687.554.300,00	3.272.156.309.730,00	3.599.371.940.703,00	3.959.309.134.774,00	4.355.240.048.252,00	4.355.240.048.252,00
1.2.1	Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	1.602.711.016.500,00	1.762.982.118.150,00	1.939.280.329.965,00	2.133.208.362.962,00	2.346.529.199.259,00	2.346.529.199.259,00
1.2.2	Pendapatan Transfer-Lainnya	1.371.976.537.800,00	1.509.174.191.580,00	1.660.091.610.738,00	1.826.100.771.812,00	2.008.710.848.993,00	2.008.710.848.993,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.022.000.258.917,00	1.175.300.297.755,00	1.351.595.342.418,00	1.554.334.643.781,00	1.787.484.840.348,00	1.787.484.840.348,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.613.503.489.317,00	5.157.249.029.023,00	5.767.773.900.717,00	6.453.625.848.183,00	7.224.489.679.944,00	7.224.489.679.944,00
2	BELANJA						
2.1	BELANJA OPERASI	3.087.353.412.521,00	3.426.676.866.846,00	3.828.506.589.102,00	4.272.860.808.529,00	4.809.915.239.125,00	4.809.915.239.125,00
2.2	BELANJA MODAL	1.544.742.351.894,00	1.749.822.700.185,00	1.926.179.075.914,00	2.131.494.163.353,00	2.324.884.234.897,00	2.324.884.234.897,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	77.311.578.684,00	50.191.352.958,00	52.700.920.606,00	55.335.966.636,00	58.102.764.968,00	58.102.764.968,00
2.4	BELANJA TRANSFER	415.950.498.636,00	452.649.548.500,00	492.920.583.350,00	537.118.843.285,00	585.635.053.246,00	585.635.053.246,00
	JUMLAH BELANJA	5.125.357.841.735,00	5.679.340.468.489,00	6.300.307.168.972,00	6.996.809.781.803,00	7.778.537.292.236,00	7.778.537.292.236,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(511.854.352.418,00)	(522.091.439.466,00)	(532.533.268.255,00)	(543.183.933.620,00)	(554.047.612.292,00)	(554.047.612.292,00)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	511.854.352.418,00	522.091.439.466,00	532.533.268.255,00	543.183.933.620,00	554.047.612.292,00	554.047.612.292,00
	PEMBIAYAAN NETTO	511.854.352.418,00	522.091.439.466,00	532.533.268.255,00	543.183.933.620,00	554.047.612.292,00	554.047.612.292,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber data: BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

Tabel 2. 73 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tengah

No	Uraian	Proyeksi					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	4.630.807.512.812,00	5.125.357.841.735,00	5.679.340.468.489,00	6.300.307.168.972,00	6.996.809.781.803,00	7.778.537.292.236,00
1	Prioritas I (Biaya Belanja Langsung Wajib dan Mengikat)	1.481.858.404.100,00	1.845.128.823.025,00	2.158.149.378.026,00	2.142.104.437.450,00	2.658.787.717.085,00	2.800.273.425.205,00
2	Prioritas II (Biaya Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah)	2.546.944.132.047,00	2.562.678.920.868,00	2.669.290.020.190,00	3.339.162.799.555,00	3.358.468.695.265,00	3.500.341.781.506,00
3	Prioritas III Biaya Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya)	602.004.976.665,00	717.550.097.842,00	851.901.070.273,00	819.039.931.967,00	979.553.369.453,00	1.477.922.085.525,00
J U M L A H		4.630.807.512.812,00	5.125.357.841.735,00	5.679.340.468.489,00	6.300.307.168.972,00	6.996.809.781.803,00	7.778.537.292.236,00

Sumber data: BPKAD Provinsi Papua Tengah, 2025

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah

Setelah pembentukan daerah otonomi baru, secara administratif kabupaten- kabupaten di wilayah adat Meepago termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Meepago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat menyelesaikan masalah secara tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang pendidikan; (2) urusan bidang kesehatan; (3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta (6) urusan bidang sosial.

2.3.1.2.1 Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Papua Tengah telah lama menjadi perhatian nasional, demi mencapai pemerataan kualitas Pendidikan antarwilayah. Berbagai studi menunjukkan terdapat kesenjangan antara kondisi Pendidikan di Papua Tengah dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun menunjukkan tren yang meningkat selama lima tahun terakhir, tetapi capaian kedua indikator tersebut di Papua Tengah masih tertinggal dengan rata-rata di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan Pendidikan di Papua Tengah menunjukkan terdapat tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan Pendidikan; dan (3) Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan Pendidikan. Permasalahan akses menyangkut kemudahan bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sementara masalah mutu terkait bagaimana proses Pendidikan dapat dijalankan secara efektif sehingga menghasilkan keluaran yang kompetitif. Sementara tata kelola merupakan sebuah hubungan institusi dan aktor-aktor terkait, terutama pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk pendidikan. Terkait dengan ketiga faktor tersebut, uraian terhadap rumusan masalah dan akar masalahnya bisa dilihat pada Tabel 2.74 .

Tabel 2. 74 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
Akses, kualitas dan tata kelola pendidikan yang belum optimal	1 Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan	1	Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi
		2	Rendahnya proporsi pengeluaran per kapita rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan
		3	Belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Beberapa kabupaten mengalami kekurangan fasilitas sekolah menengah.
		4	Kondisi topografi yang sangat ekstrim dan variatif sehingga menyulitkan peserta didik mengakses sekolah
	2 Belum optimalnya mutu/ kualitas layanan pendidikan	1	Belum optimalnya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
		2	Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas relatif masih rendah
		3	Belum maksimalnya melek Calistung (membaca, menulis dan berhitung)
		4	Fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti kelas dalam kondisi rusak, kekurangan fasilitas laboratorium, dsb
		5	Rendahnya sekolah yang bersertifikasi A dan B
		6	Pendidikan ekstrakurikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal
		7	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran
		8	Belum berkembangnya sekolah menengah, politeknik dan perguruan tinggi yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti jurusan pertanian, pariwisata, pertambangan
		9	Rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di sekolah menengah, politeknik dan universitas, serta kurangnya program pemagangan yang terstruktur sehingga kompetensi lulusan kurang relevan
	3 Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan	1	Belum maksimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
		2	Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi
		3	Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah
		4	Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran

		5	Belum ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Tengah.
--	--	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.2.2 Urusan Bidang Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Tengah tergolong rendah yang, ditandai dengan masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya prevalensi gizi buruk pada balita. Permasalahan- permasalahan yang memberikan sumbangan terhadap angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang kesehatan terdapat dalam Tabel 2.75.

Tabel 2. 75 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan belum memadai	1	Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas	1	Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial di 3 kabupaten telah mencapai 100%, namun di Kabupaten Nabire hanya 38,5%
				2	Rasio 1 posyandu per jumlah balita masih melebihi 1: 100
				3	Belum semua kabupaten melaksanakan Posbindu PTM sesuai standar
				4	Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis <i>Telemedicine</i> belum berjalan sesuai standar
		2	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum memadai Serta penyebarannya belum merata	1	Baru 42,6% puskesmas di wilayah Provinsi Papua Tengah yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan
				2	Distribusi tenaga medis, perawat dan bidan belum merata, terutama untuk daerah-daerah sulit
		3	Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal	1	Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu dan anak tidak berjalan secara teratur
				2	Cakupan pelayanan ibu dan anak masih rendah, terutama di kabupaten yang memiliki wilayah sulit
				3	Prevalensi penyakit menular (Tb, malaria, HIV, diare, pneumonia) tinggi
				4	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi rendah
				5	API Malaria masih tinggi, dan belum ada kabupaten yang dinyatakan telah mencapai eliminasi malaria
				6	Belum ada kabupaten yang memenuhi kriteria melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja dan Upaya Kesehatan Olah Raga
				7	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan sesuai standar
				8	Pencapaian target pemenuhan Standar

					Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain meliputi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat
				9	Sebagian target-target Renstra Kemenkes di tingkat provinsi belum terpenuhi, antara lain mencakup penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta peningkatan sumber daya kesehatan
2	Kualitas SDM Provinsi Papua Tengah masih rendah, yang dipengaruhi oleh faktor gizi sejak 1000 HPK	1	Tingginya prevalensi balita stunting	1	Belum semua kabupaten menjalankan <i>surveilans</i> gizi sesuai standar
				2	Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitif untuk pencegahan stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan
				3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan intervensi spesifik untuk pencegahan stunting masih rendah.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.2.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat dalam Tabel 2.76.

Tabel 2. 76 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi(jalan dan jembatan) serta sistem pengendali aliran air.	1	Masih banyaknya jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal penanganannya
			2	Kurangnya kapasitas OPD untuk mengidentifikasi dan mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan prioritas
			3	Lambatnya rehabilitasi jalan/ jembatan rusak
			4	Pembangunan jalan/jembatan yang terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan sektoral dan spasial masih belum dikelola secara optimal
			5	Kurangnya akses jalan antar ibu kota kabupaten menuju ke distrik serta kampung yang bisa terakses
			6	Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Papua tengah terutama ke daerah-daerah yang memiliki

				potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan
			7	Belum adanya pengendali banjir untuk kawasan pemukiman dan pertanian yang terletak disepanjang aliran sungai yang berpotensi banjir
			8	Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
			9	Belum terpenuhinya kebutuhan saluran drainase
	2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar penyedia air baku dan air bersih	1	Manajemen infrastruktur dasar yang masih sangat rendah
			2	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat
			3	Belum tercukupinya kesiapan sarana pendukung air bersih
			4	Belum maksimalnya optimalisasi pemanfaatan sumber sumber air baku
	3	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur sanitasi	1	Belum adanya sarana pengelolaan sampah untuk masyarakat dan TPA di berbagai wilayah di Provinsi Papua Tengah
			2	Rendahnya implementasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD)
			4	Tingginya persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS)
	4	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan infrastruktur	1	Kondisi geografis wilayah yang sulit berimplikasi pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah
	5	Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang	1	Belum optimalnya implementasi dan pengawasan pemanfaatan ruang
			2	Rendahnya kualitas data tata ruang wilayah, baik data pemetaan, kuantitatif, serta kualitatif
			3	Evaluasi implementasi rencana tata ruang masih belum memadai
			4	Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Papua Tengah
			5	Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.2.4 Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman terdapat dalam Tabel 2.77.

Tabel 2. 77 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Papua Tengah.

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	1	Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat	1	Kurang memadainya sanitasi dan jamban yang aman, bersih dan layak pada rumah tangga
			2	Masih banyaknya keluarga yang memiliki rumah dengan atap, dinding dan lantai tanah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria rumah layak huni
			3	Rendahnya kepemilikan rumah dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan standar keamanan dan keselamatan
			4	Masih terdapat 13 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah, dengan penanganan yang kurang optimal
			5	Belum optimalnya jumlah rumah yang dibangun untuk Orang Asli Papua (OAP)
	2	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan	1	Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dan kepulauan-kepulauan telah mengakibatkan kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Papua Tengah
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan masyarakat dan penataan kawasan permukiman
			3	Pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman seringkali masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.2.5 Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketenteraman, ketertiban serta perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2. 78 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penanganan penyelesaian masalah terhadap keamanan, ketenteraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat	1 Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.	1 Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan
		2 Belum optimalnya penegakan perda dan Perkada
		3 Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat, serta masih tingginya tindak pidana yang belum tertangani
		4 Belum memadainya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan
		5 Masih adanya potensi kecemburuan sosial di masyarakat antara orang asli Papua dan warga pendatang
		6 Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umat beragama
		7 Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat
	2 Belum optimalnya penyelenggaraan stabilitas politik daerah	1 Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan
		2 Lemahnya peran partai politik dan DPRD sebagai lembaga demokrasi
		3 Rendahnya tingkat kebebasan sipil dalam berkumpul dan berserikat
		4 Masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
	3 Tingginya Risiko bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi & adaptasi yang komprehensif	1 Provinsi Papua Tengah termasuk provinsi yang memiliki kelas Risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi
		2 Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana di beberapa wilayah yang memiliki kelas Risiko multi bencana tinggi
		3 Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial
		4 Masih rendahnya kesadaran terhadap Risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
		5 Banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana yang belum ditangani

			dengan baik
		6	Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.2.6 Urusan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya sosial. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang sosial di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.79.

Tabel 2. 79 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Sosial di Provinsi Papua Tengah.

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Tingginya kerentanan sosial masyarakat	1	Lemahnya perlindungan sosial dan mitigasi Risiko bencana sosial maupun bencana alam	1	Tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan
			2	Masih banyaknya kelompok orang asli Papua dalam komunitas adat terpencil yang belum terjamah dan memiliki aksesibilitas dalam pembangunan
			3	Kekosongan bantuan sosial atau penanganan Risiko sosial yang belum responsif terhadap kondisi kelompok miskin dan rentan, seperti pada perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, serta skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi darurat
			4	Belum optimalnya pemberian paket bantuan dan rehabilitasi sosial kepada PMKS
			5	Belum tersedianya peralatan logistik (bahan pembangunan rumah/logistik lainnya) dalam penanganan bencana sosial dan bencana alam
	2	Lemahnya akurasi dan validitas data penerima bantuan perlindungan sosial	1	Belum optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (lansia, janda, duda, yatim piatu, tuna rungu, tuna daksa, gangguan jiwa)
			2	Belum tersedianya data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perlindungan sosial (bencana sosial, bencana alam, dan masyarakat kurang mampu)
			3	Belum adanya integrasi antara data penerima bantuan perlindungan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan pendataan terpilah OAP dan non-OAP <i>by name by address</i> secara berkala yang

				dilakukan di tingkat kampung melalui SIO Papua
	3	Lemahnya kualitas SDM yang menangani masalah kesejahteraan sosial	1	Belum memadainya SDM yang terdidik/ terlatih di bidang rehabilitasi sosial
			2	Keterbatasan pendampingan pelayanan untuk penduduk miskin dan rentan, serta strukturisasi pendamping sosial di masyarakat
	4	Lemahnya kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	1	Pembiayaan bantuan sosial (seperti bantuan tunai, bantuan siswa miskin, bantuan penyandang difabel) saat ini sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD, dan belum mengoptimalkan sumber pembiayaan lain seperti hibah, CSR, TJSL, PKBL, maupun filantropi
			2	Kurangnya koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga kerja; (2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) urusan bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang lingkungan hidup; (6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8) urusan bidang pemberdayaan masyarakat kampung; (9) urusan bidang perhubungan; (10) urusan bidang komunikasi dan informatika; (11) urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; (12) urusan bidang penanaman modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga; (14) urusan bidang kebudayaan.

2.3.1.3.1 Urusan Bidang Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Papua Tengah masih cukup rendah, di mana angkanya pada tahun 2020 adalah sebesar 69.55%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk Angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Tengah juga tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang terserap diindikasikan masih memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga kerja yang dibutuhkan. Tabel 2.80 akan memberikan pemetaan antara rumusan masalah dan akar masalah di bidang urusan ketenagakerjaan.

Tabel 2. 80 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Tenaga Kerja di Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja, serta penempatan dan	1	Rendahnya kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) tenaga kerja untuk mendukung produktivitas industri, karena mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah

		perluasan kesempatan kerja	2	Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik (lulusan SMK dan universitas) karena adanya <i>mismatch</i> antara bidang pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia
			3	Belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Papua Tengah yang memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Tengah hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian Tenaga Kerja
			4	Longgarnya ikatan kerja (<i>engagement</i>) serta tingginya kecenderungan pencarian kerja baru/meninggalkan pekerjaan(<i>turnover rate</i>) yang dapat meningkatkan Risiko untuk tidak bekerja
		2 Belum terjalinnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja	1	Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UMP yang ditetapkan masih sangat rendah
			2	Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
			3	Penanganan perselisihan tenaga kerja belum maksimal
		3 Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan	1	Belum terealisasinya pemetaan/ data dukung kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan yang berinvestasi di Papua Tengah sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Papua Tengah
			2	Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja
			3	Belum ada sinergisitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Papua Tengah baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, gas bumi & perminyakan
2	Belum	1	Belum optimalnya	1 Pemutusan hubungan kerja (PHK)

optimalnya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 terhadap ketenaga-kerjaan		produktivitas tenaga kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan Kerja		atau penurunan pendapatan buruh/karyawan sebagai dampak pandemi Covid-19
			2	Meningkatnya pekerja sektor pertanian-informal di perdesaan yang berpotensi meningkatkan pekerja miskin di perdesaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.2 Urusan Bidang Pembeerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak termarginalisasi dalam proses- proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangan gender, angka IPG di Papua Tengah masih tertinggal jauh di bawah nasional. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu besar di Papua Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.81.

Tabel 2. 81 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah	1	Belum optimalnya perlindungan hak serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan	1	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas.
			2	Banyaknya perkawinan yang tidak sah
			3	Kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan
			4	Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal
			5	Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan perempuan
	2	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1	Rendahnya pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik, yaitu: a. kepemilikan akte kelahiran; b. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; c. puskesmas ramah anak, d. kampung anak sejahtera; e. sekolah ramah anak; f. pusat kreatifitas anak; g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); h. Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); i. media informasi layak anak seperti PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak)
			2	Masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras pada anak

			3	Masih terdapat kasus konsumsi video porno untuk anak di bawah umur
			4	Masih terdapat kekerasan anak dalam rumah tangga
			5	Belum ada penyediaan rumah layak anak (panti) untuk anak di keluarga yang tidak mampu
			6	Masih terjadinya kasus diskriminasi dan eksploitasi anak
			7	Masih terdapat kasus pernikahan dini pada anak usia remaja
			8	Pelayanan untuk anak yang sedang dalam masa tahanan kurang maksimal
	3	Belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan	1	Masih kurangnya tenaga perempuan yang bekerja di DPR, lembaga eksekutif, dan PNS
			2	Terdapat pola patrilineal kesukuan, menyebabkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menjadi sulit
	4	Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
			2	Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah
			3	Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.3 Urusan Bidang Pangan

Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.82.

Tabel 2. 82 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Tingginya kerawanan pangan masyarakat	1	Rendahnya ketahanan pangan masyarakat	1	Terbatasnya diversifikasi pangan lokal. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal
			2	Terbatasnya akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan

				berbasis sumber daya lokal masih terbatas
			3	Persentase daerah rentan pangan di Provinsi Papua Tengah masih cukup tinggi
			4	Belum optimalnya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
	2	Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	1	Rendahnya daya beli penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan. Hal ini ditunjukkan dengan konsumsi pangan yang berada di bawah standar kecukupan gizi
			2	Akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal masih terbatas
			3	Masih terbatasnya infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan
	3	Belum optimalnya tata kelola dan SDM pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi	1	Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas <i>supply</i> bahan pangan
			2	Terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.4 Urusan Bidang Pertanian

Pertanian merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan fisik masih terkendala oleh tingginya konflik pertanian, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah. Pelayanan administrasi pertanian juga bukan hal yang mudah di Papua Tengah, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanian di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.83.

Tabel 2. 83 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pengelolaan pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah	1	Belum optimalnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1	Banyaknya tanah yang terlantar, dengan status kepemilikan yang belum jelas
			2	Belum adanya database/pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah
			3	Pelayanan administrasi pertanian masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis
			4	Rendahnya penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi

	2	Belum optimalnya pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat	5	Belum harmonisnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesesuaian undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang sektoral
			1	Tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat
			2	Belum maksimalnya pengakuan negara/ pemerintah daerah atas tanah adat/tanah ulayat
			3	Belum ada harmonisasi data sertifikat hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.5 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran disertai dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah. Salah satu permasalahan fundamental dalam bidang lingkungan hidup adalah belum adanya dokumen perencanaan dan analisis tertulis yang mengakomodir potensi dan masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagaimana Tabel 2.84.

Tabel 2. 84 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan yang mendukung keberlanjutan sektor lingkungan hidup	1	Belum optimalnya perencanaan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	1	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup
			2	Belum adanya dokumen yang mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			3	Belum adanya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
	2	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	1	Penurunan kualitas udara karena pembakaran kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta kebakaran hutan dan lahan
			2	Penurunan kualitas air karena pencemaran limbah domestik, kondisi sanitasi tidak layak dan tingginya paparan beban pencemaran sungai
			3	Penurunan kualitas tutupan lahan karena deforestasi hutan/lahan, serta belum signifikannya reforestasi hutan/lahan dan kegiatan penanaman lainnya

			4	Terdapat tekanan demografi kepada kawasan konservasi yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa dan berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi
			5	Penerapan pola penanganan/pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan dan pengembangan <i>circular economy</i> dari pemanfaatan sampah dan limbah menggunakan metode 3R (<i>reduce, reuse and recycle</i>).
			6	Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
			7	Tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah
			8	Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai <i>backbone</i> ekonomi belum terimplementasikan dengan baik di Papua Tengah. Konversi hutan mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.6 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut pada akses pelayanan publik lainnya. Misalnya, akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang paling fundamental untuk memastikan pengakuan hukum seorang individu oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan publik yang menjadi haknya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki dalam peningkatan cakupan penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Papua Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.85. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Tengah meningkat signifikan, dari 37.32% pada tahun 2017 sampai 63.64% pada tahun 2020. Namun, kepemilikan akta lahir masih sangat rendah. Pada tahun 2021, masih ada 44.64% anak berusia 0-4 tahun yang belum memiliki akta lahir. Tentunya, hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan pencatatan sipil juga masih sangat buruk. Rasio pasangan yang berakta nikah pada tahun 2021 hanya ada 37.73%.

Adapun permasalahan yang disebutkan tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana prasarana kependudukan, seperti ketersediaan gedung perkantoran serta alat perekaman KTP. Selain itu, sumber daya manusia atau kader di tingkat kampung sebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas. Adapun rumusan masalah pada bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2. 85 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau semua masyarakat	1	Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	1	Belum optimalnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan akta catatan sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik
			2	Rendahnya penerbitan akta kelahiran bagi anak di setiap daerah
			3	Cakupan pendataan data terpilah OAP dan non OAP belum 100%
			4	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan
	2	Terbatasnya sarana prasarana kependudukan	1	Sarana dan prasarana pendataan Dukcapil (Gedung perkantoran dan alat perekaman KTP) yang masih sangat terbatas dan menyebar tidak merata
			2	Terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga kerja atau kader untuk pencatatan dokumen kependudukan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.7 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meskipun dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di Papua Tengah, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke depan. Lonjakan penduduk dapat mengakibatkan ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Permasalahan utama yang perlu menjadi pusat perhatian adalah rendahnya cakupan akseptor KB. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.86.

Pada umumnya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui upaya promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga berkualitas dengan usia kawin ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan melalui pola asuh tumbuh kembang balita dan remaja. Dalam hal ini, persepsi masyarakat mengenai program KB sangat penting, dan berdasarkan LKIP BKKBN Tahun 2020, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Program KB hanyalah upaya pembatasan jumlah anak dan pemusnahan etnik tertentu.

Selain itu dari segi pelaksanaan program, Papua Tengah masih belum optimal dalam menyediakan alat kontrasepsi bagi PUS. Terbatasnya petugas lapangan KB di tingkat kabupaten/kota juga memperparah pelaksanaan program KB. Selain itu, angka kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi. Adapun lengkapnya mengenai rumusan masalah pada bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2. 86 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana	1	Rendahnya akseptor KB aktif	1	Belum optimalnya penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS
			2	Rendahnya literasi fungsi dan keterkaitan KB
			3	Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan pemasangan alat kontrasepsi masih relatif terbatas
			4	Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (alkon) KB jangka Panjang
			5	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi karena lokasi kampung yang sulit terjangkau
			6	Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan kader KB
	2	Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
			2	Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga, yaitu: 1. fungsi agama; 2. fungsi sosial budaya; 3. fungsi cinta dan kasih sayang; 4. fungsi perlindungan; 5. fungsi reproduksi; 6. fungsi sosialisasi dan pendidikan; 7. fungsi ekonomi; serta 8. fungsi pembinaan lingkungan
			3	Pernikahan usia anak
			4	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.8 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk mengembangkan potensi masyarakat, misalnya dalam sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian, pengelolaan institusi lokal masyarakat dalam suatu unit wilayah juga di pegang oleh bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini dipandang strategis sebagai unit pembangunan dalam paradigma baru membutuhkan upaya pemberdayaan. Khususnya di Papua Tengah, saat ini kebijakan Provinsi banyak mendorong terbentuknya pemberdayaan tersebut. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.87.

Tabel 2. 87 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pembangunan	1	Masih rendahnya penggunaan dana kampung untuk kebutuhan	1	Masih lemahnya pemahaman masyarakat kampung dalam manajemen pengelolaan anggaran kampung.
			2	Belum maksimalnya pembinaan manajemen pengelolaan anggaran

kampung berbasis sumber daya kampung		prioritas pembangunan kampung.		kepada setiap aparat kampung.
			3	Belum berjalannya fungsi evaluasi anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK).
			4	Belum terbentuk / belum dimanfaatkannya Badan Usaha Milik Kampung sebagai sumber pendapatan kampung
			5	Pemenuhan aspirasi kebutuhan program kampung masih bersifat kekeluargaan belum sampai pada pemenuhan kebutuhan umum kampung
	2	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan kampung	1	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung (Bamuskam dan Baperkam).
			2	Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat kampung dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat
			3	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem administrasi kampung, termasuk Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua)
	3	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat kampung	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program prioritas kampung untuk kepentingan bersama.
			2	Belum tersedianya instrumen kebijakan dan petunjuk pelaksanaan standar pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu serta pelaksanaan pemberdayaan OAP sesuai kewenangan Otsus di kampung
			3	Belum optimalnya pembinaan kader kampung dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung
	4	Belum optimalnya Pembangunan kampung	1	Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus
			2	Belum optimalnya pelaksanaan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat kampung
			3	Penetapan target sasaran penerima manfaat dalam pembangunan kampung belum secara maksimal didukung ketersediaan data <i>by name by address</i> terpilah OAP dan non-OAP di tingkat kampung
			4	Cakupan implementasi program strategis pemberdayaan masyarakat dan kampung belum dilaksanakan oleh seluruh kampung dan kabupaten/kota

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.9 Urusan Bidang Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan ketidakoptimalan konektivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan dampak yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.88.

Tabel 2. 88 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya konektivitas transportasi	1	Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan Pelayanan transportasi dalam pemenuhan kebutuhan transportasi	1	Kurang optimalnya pemanfaatan bandara perintis
			2	Kurang maksimalnya keberadaan titik terminal untuk mengangkut kendaraan umum dan penumpang
			3	Belum optimalnya fungsi fasilitas terminal karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan
			4	Rendahnya ketersediaan moda transportasi antar daerah
			5	Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara
			6	Biaya angkutan umum yang belum terstandar
			7	Masih terisolasinya beberapa wilayah distrik
	2	Lemahnya implementasi transportasi berwawasan lingkungan	1	Belum berjalannya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi seperti penurunan emisi gas buang kendaraan dan penurunan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan
	3	Masih rendahnya Tingkat keselamatan dan keamanan perjalanan	1	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat (Lampu jalan, rambu-rambu)
	4	Belum optimalnya tata kelola urusan perhubungan	1	Kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara
			2	Proses perencanaan (studi pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama
			3	Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik Transportasi
			4	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.10 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; diseminasi informasi dan komunikasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.89.

Tabel 2. 89 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Belum optimalnya Penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah	1	Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
				2	Masih sedikitnya SDM di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung yang menguasai keahlian pada bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan/manajemen sistem E-Government termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				3	Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik, tata Kelola, sistem e-Government, serta sistem pendataan, termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				4	Belum diterapkannya pengamanan dan persandian terhadap sistem teknologi dan informasi pemerintah
				5	Belum adanya SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang persandian
				6	Belum optimalnya pelembagaan serta akselerasi cakupan penggunaan dan pendataan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung.
				7	Belum optimalnya pengadaan alat jurnalistik
2	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat
				2	Jaringan internet yang belum merata tersebar di seluruh wilayah
				3	Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha sehingga menyisakan blank spot di wilayah non-komersial

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.11 Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan koperasi dan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.90.

Tabel 2. 90 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Kondisi perkembangan koperasi yang stagnan	1	Lemahnya tata kelola dan kelembagaan koperasi	1	Persentase koperasi aktif di Provinsi Papua Tengah masih rendah
				2	Banyak koperasi yang belum berbadan hukum
				3	Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas sehingga pengelolaan koperasi belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional
		2	Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran koperasi, serta kurang tanggapnya koperasi terhadap dinamika kebutuhan pasar	1	Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM
2	Rendahnya kontribusi UMKM pada sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah	1	Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran UMKM	2	Belum aktifnya peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan lokal (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan)
				1	Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya
				2	Kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah
				4	Sulitnya kondisi geografis sehingga UMKM mengalami kesulitan mendistribusikan produk
				5	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
				6	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan

				hasil pertanian rakyat
			7	Masih rendahnya partisipasi Koperasi dalam aktivitas pertambangan rakyat
		2	Lemahnya kapasitas pembiayaan UMKM	1 Minimnya modal usaha sehingga UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak
				2 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menyediakan jasa pinjaman modal untuk UMKM belum dimanfaatkan secara optimal
				3 Mayoritas UMK merupakan UMK yang tidak berbadan usaha

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.12 Urusan Bidang Penanaman Modal

Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang penanaman modal di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.91.

Tabel 2. 91 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Penanaman Modal di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah
Rendahnya kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan investor <i>needs</i>	1	Belum adanya kejelasan penyelesaian kasus antar investor dengan pemilik hak ulayat
			2	Belum tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah
			3	Belum optimalnya performa sistem logistik di Papua Tengah
			4	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan perizinan standar OSS
	2	Belum optimalnya kualitas penanaman modal	1	Belum optimalnya perkembangan pengusaha asli Papua dalam kegiatan ekonomi
			2	Masih tingginya pelanggaran terhadap izin lokasi
			3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin usaha
			4	Belum efektifnya pelaporan pertanggung jawaban investor terhadap Pemerintah Daerah
	3	Lemahnya tata kelola penanaman modal	1	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM layanan perizinan
			2	Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
		3	Belum optimalnya promosi investasi daerah
		4	Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan penanaman modal antar pusat dan daerah
	4 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penanaman modal	1	Penundaan investasi oleh investor karena ketidakjelasan supply chain atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.13 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belum optimalnya penggalian potensi dan pengembangan kapasitas pemuda dan keolahragaan merupakan permasalahan yang ditemukan di Provinsi Papua Tengah. Telah tersedia fasilitas olah raga yang tersebar di seluruh kabupaten, namun belum dilakukannya pencarian dan pengembangan bakat olahragawan yang dapat dilatih untuk merepresentasikan Provinsi Papua Tengah dalam kompetisi-kompetisi olah raga. Selain itu, diperlukannya SDM/pelatih yang memiliki kompetensi di pendidikan keolahragaan untuk mengembangkan talenta calon-calon olahragawan. Berikut adalah tabel yang memetakan permasalahan di bidang kepemudaan dan olah raga.

Tabel 2. 92 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pengembangan daya saing pemuda berbasis pada unsur-unsur kebudayaan dan olahraga	1	Belum optimalnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga	1	Keterbatasan SDM pertandingan
			2	Banyak atlet yang mengalami kendala administrasi karena ada perbedaan data di akte dan kondisi fisiknya
			3	Kurangnya pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di bidang keolahragaan
			4	Prestasi dan daya saing keolahragaan yang belum maksimal
			5	Kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi
			6	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota
	2	Belum optimalnya peran sosial pemuda	1	Munculnya orientasi berlebihan kepada kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kegiatan kepeloporan di bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga
			2	Budaya premanisme di kalangan pemuda
			3	Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan Narkotika
	3	Belum optimalnya peran pemuda	1	Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda disebabkan karena (1) terbatasnya lapangan kerja;

		sebagai penggerak ekonomi		dan (2) belum sesuainya kompetensi dan kualifikasi pemuda dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia
			2	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.3.14 Urusan Statistik

2.3.1.3.15 Urusan Persandian

2.3.1.3.16 Urusan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Papua Tengah memiliki potensi yang besar, namun kondisi tersebut sekaligus menghadapi Papua Tengah dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan kebudayaan.

Tabel 2. 93 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kebudayaan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam Kehidupan masyarakat	1 Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1 Belum tersedianya ruang publik untuk pertunjukan seni dan budaya
		2 Promosi budaya yang belum memadai melalui festival dan event-event budaya di tingkat kabupaten dan Provinsi Papua Tengah.
		3 Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
		4 Belum optimalnya pembinaan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tua-tua adat kepada generasi muda, sebagai bentuk menjaga kelangsungan sejarah asal-usul, arsitektur rumah tradisional, pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal.
	2 Kurangnya pelestarian budaya asli Papua Tengah.	1 Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya
		2 Belum dilestarikannya arsitektur rumah adat kaki seribu sebagai simbol arsitektur tradisional yang bernilai bagi pengembangan budaya dan pariwisata.
		3 Belum adanya <i>roadmap</i> dan catatan-catatan kajian Etnografi sebagai sarana pelestarian budaya suku OAP di Papua Tengah dimasa yang akan datang.
		4 Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
		5 Belum adanya museum etnografi

			sebagai tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya masyarakat
	3	Belum adanya pemetaan batas- batas ulayat adat ditingkat marga dan keret di kampung	1 Pemahaman batas-batas adat masih bersifat lisan dan belum ada yang tertulis atau dikaji dalam pemetaan, sehingga masih rawan konflik tanah adat antar kampung. 2 Belum optimalnya pembinaan adat kepada generasi muda berkenan pemahaman tentang cerita sejarah asal-usul dan batas-batas hak ulayat adat antar marga atau keret.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4 Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas: (1) urusan bidang perikanan; (2) urusan bidang pariwisata; (3) urusan bidang pertanian; (4) urusan bidang kehutanan; (5) urusan bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian.

2.3.1.4.1 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan bidang perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan, produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, beserta pengembangan SDM masyarakat bidang perikanan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perikanan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.94.

Tabel 2. 94 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perikanan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	1	Belum optimalnya produksi dan pemasaran sektor perikanan	1	Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
			2	Masih rendahnya teknologi perikanan Budidaya
			3	Masih rendahnya promosi hasil budidaya Perikanan
			4	Kurangnya pemahaman terkait teknik budidaya
			5	Belum optimalnya akses permodalan untuk peningkatan skala usaha budidaya perikanan
			6	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
	2	Lemahnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan	1	Belum efektifnya pengembangan industri pengolahan di bidang perikanan
	3	Belum optimalnya tata kelola sumber daya perikanan	1	Belum terdatanya nelayan budidaya dan nelayan tangkap
			2	Belum terbentuknya bina kelompok nelayan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.2 Urusan Bidang Pariwisata

Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemetaan

masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pariwisata di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.95.

Tabel 2. 95 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pariwisata di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata	1	Belum tersedianya fasilitas akomodasi dan layanan makan dan minum untuk wisatawan (homestay, resort dan restaurant)
			2	Belum tersedianya sarana prasarana pariwisata, termasuk fasilitas penunjang atraksi wisata (gazebo, toilet, spot foto, pos jaga dan menara pandang)
			3	Belum optimalnya pengembangan ekowisata berbasis flora dan fauna <i>endemik</i>
			4	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan wisata budaya
			5	Belum optimalnya penguatan kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan
	2	Belum optimalnya pemasaran pariwisata	1	Strategi komunikasi pemasaran belum terpadu sehingga branding pariwisata belum terpublikasi secara optimal
			2	Belum tersedianya layanan informasi pariwisata
			3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam mempromosikan citra Pariwisata
	3	Belum optimalnya pengembangan kelembagaan kepariwisataan	1	Kapasitas SDM pariwisata masih terbatas
			2	Belum terlembaganya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
			3	Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor yang belum optimal dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.3 Urusan Bidang Pertanian

Urusan bidang pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perbaikan produktifitas komoditas pertanian, pemenuhan kebutuhan petani terhadap sarana prasarana pertanian, melakukan penyehatan hewan ternak, serta menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan ternak dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pertanian di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.96.

Tabel 2. 96 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pertanian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					
1	Belum optimalnya kontribusi sub sektor tanaman pangan dan holtikultura terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura	1	Masih kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan dan holtikultura
				2	Pengembangan varietas tanaman pangan unggulan lokal belum dilakukan dengan baik
				3	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan pertanian masyarakat
		2	Belum optimalnya Pemasaran komoditas tanaman pangan dan holtikultura	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
				3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM pertanian tanaman pangan dan holtikultura	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping petani tidak memadai
				3	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok tani untuk menjadi wadah <i>sharing knowledge</i> petani
PERKEBUNAN					
2	Belum optimalnya kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perkebunan	1	Masih kecilnya skala usaha perkebunan
				2	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)
				3	Keterbatasan sumber bibit perkebunan yang berkualitas
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan perkebunan masyarakat
		2	Belum optimalnya Pemasaran komoditas perkebunan	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil perkebunan rakyat

			3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar	
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM perkebunan	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping perkebunan tidak memadai
				3	Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
3	Belum optimalnya kontribusi subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan	1	Kurangnya distribusi bibit ternak
				2	Kurang lengkapnya pendataan hewan ternak
				3	Belum adanya penyediaan sarana produksi ternak daerah (bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin ternak)
		2	Minimnya akses pelayanan kesehatan ternak	1	Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten
				2	Belum optimalnya pemasaran komoditas peternakan
		2	Belum optimalnya pemasaran komoditas peternakan	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan peternak tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM peternakan	1	Mayoritas tingkat pendidikan peternak adalah SD dan SMP sehingga dapat mempengaruhi kompetensi, kreativitas dan inovasi peternak dalam menghasilkan komoditas peternakan berkualitas dan berdaya saing
				2	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok ternak untuk menjadi wadah sharing knowledge petani
3	Belum adanya pembinaan bagi kelompok ternak				

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.4 Urusan Bidang Kehutanan

Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi dengan persentase hutan tertinggi di Indonesia berdasarkan data KLHK tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutan. Selain sebagai potensi yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan hutan juga memiliki tantangan yang tidak kecil. Berdasarkan data dan informasi sektor

kehutanan beberapa tahun terakhir, dapat dirumuskan permasalahan yang dikelompokkan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2. 97 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Kehutanan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang memastikan pengelolaan yang berkelanjutan di bidang kehutanan	1	Serapan emisi masih rendah dari sektor kehutanan dan lahan	1	Perubahan lahan yang tidak produktif menjadi produktif masih rendah
			2	Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan dan modal sosial masih lemah
	2	Belum optimalnya penjagaan dan pengawasan terhadap hutan dan kawasan lindung	1	Belum optimalnya pengawasan terhadap ekosistem hutan serta kawasan lindung
			2	Belum adanya regulasi khusus terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam Hayati
	3	Nilai tambah hasil kehutanan masih rendah	1	Pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan masih rendah
			2	Dukungan SDM pendamping serta sarana dan prasarana masih terbatas
			3	Jaringan pemasaran hasil produksi masyarakat sangat terbatas
			4	Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.5 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah; pengelolaan minyak dan gas bumi; pelaksanaan inventarisasi geologi; serta akses penyediaan listrik secara optimal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat dalam Tabel 2.98.

Tabel 2. 98 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1 Rendahnya produktivitas sektor energi dan sumber daya mineral	1	Belum maksimalnya peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antar personal maupun antar sektor	1	Belum efektifnya proses perizinan pertambangan (IUP)
			2	Belum optimalnya pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI)
			3	Kuantitas dan kualitas penelitian dan survei pelayanan geologi masih sangat kurang
			4	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan
			5	Rendahnya daya serap sektor pertambangan dalam menyerap produk-produk pertanian lokal
	2	Rendahnya akses masyarakat	1	Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan rumah tangga, industri dan perkantoran

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	terhadap sumber daya energi listrik	2 Penyediaan sumber daya energi listrik pada kampung yang sangat terbatas dan tidak merata
		3 Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.6 Urusan Bidang Perdagangan

Urusan bidang perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan; terpenuhinya kebutuhan sarana distribusi perdagangan; mendorong stabilitas harga barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta menyelenggarakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.99.

Tabel 2. 99 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perdagangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1 Belum efektifnya penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan	1 Belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan
		2 Besarnya biaya transportasi untuk distribusi perdagangan
		3 Belum optimalnya sistem pengelola data dan informasi perdagangan
		4 Minimnya kualitas pasar rakyat dalam meningkatkan konsumsi produk domestik yang beredar di pasar rakyat
	2 Belum adanya standar mutu komoditas	1 Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
		2 Minimnya diversifikasi produk bernilai tambah berbasis berbasis SDA
		3 Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan
	3 Belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang	1 Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup
		2 Belum adanya jaminan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.4.7 Urusan Bidang Perindustrian

Urusan bidang perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perencanaan pembangunan industri; penerbitan izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang industri di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.100.

Tabel 2. 100 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perindustrian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kontribusi sektor industri	1 Belum optimalnya dukungan	1 Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
dalam perekonomian wilayah		sumber daya manusia, modal dan infrastruktur	2	Belum optimalnya dukungan infrastruktur seperti jalan, listrik, air dan sarana pengelolaan limbah/ persampahan dalam pengembangan industri
			3	Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah
	2	Belum terwujudnya daya saing, kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan	1	Belum terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif
			2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas produksi dan industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
	3	Belum terwujudnya tata kelola perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1	Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri
			2	Lemahnya tingkat partisipasi pemegang izin usaha industri dalam menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5 Urusan Pemerintahan Penunjang

Urusan pemerintahan penunjang terdiri atas: (1) urusan bidang pemerintahan umum; (2) urusan bidang aparatur dan kepegawaian; (3) urusan bidang keuangan daerah; (4) urusan bidang perencanaan pembangunan daerah; serta (5) urusan bidang pengawasan pembangunan daerah.

2.3.1.5.1 Urusan Bidang Pemerintahan Umum

Berdasarkan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum mencakup: (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar atau UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; (4) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota; serta (6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan pemerintahan umum Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.101.

Tabel 2. 101 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pemerintahan Umum di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan publik Secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya koordinasi kewenangan pemerintahan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan umum	1	Kuatnya prinsip <i>money follow function</i> dan <i>money follow organization</i> , serta belum efektifnya implementasi <i>money follow programme</i>
			2	Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar-unit kerja dan antar-instansi serta dengan mitra strategis lainnya
			3	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pembangunan antar yurisdiksi, distrik,

				kelurahan dan kampung
			4	Belum optimalnya koordinasi, perencanaan, implementasi serta monitoring evaluasi penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus Papua
			5	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan program-program Otonomi Khusus
			6	Belum efektifnya penataan kelembagaan daerah yang sesuai dengan kewenangan khusus yang dilaksanakan terkait dengan kebijakan Otsus Papua Tengah
			7	Belum optimalnya koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial serta afirmasi terhadap OAP
			8	Masih terdapat persoalan tanah ulayat yang belum selesai untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan
			9	Belum optimalnya pelaksanaan SPM di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota
			10	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah
			11	Rendahnya kewenangan Lembaga MRP dalam mengawal program-program Otonomi Khusus yang mengarah pada pemberdayaan perlindungan dan keberpihakan Masyarakat Asli Papua. Kewenangan hanya memberikan pertimbangan atau fungsi konsultatif
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Belum optimalnya pelayanan distrik, kelurahan dan kampung kepada masyarakat
			2	Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah
			3	Belum memadainya pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah
			4	Rendahnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			5	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i>
			6	Belum optimalnya penerapan nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi
			7	Publikasi dan diseminasi kebijakan Pemerintah Provinsi belum memadai

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5.2 Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

Urusan bidang aparatur dan kepegawaian berkaitan dengan manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur memiliki nilai strategis dengan adanya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian di Pemerintahan Daerah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang aparatur dan kepegawaian di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.102.

Tabel 2. 102 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Belum optimalnya kompetensi, distribusi dan pelayanan ASN	1	Ketersediaan ASN di Provinsi Papua Tengah belum mencukupi kebutuhan daerah
		2	Rendahnya kualitas/ kompetensi SDM ASN sesuai tugas dan fungsi
		3	Rendahnya kemampuan pengelolaan data informasi berbasis komputer
		4	Masih kurangnya Penempatan ASN pada Jabatan tertentu berdasarkan kompetensi jabatan
		5	Masih rendahnya jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Pimpinan
		6	Rendahnya jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklatsar CPNS
		7	Belum terbentuknya kebijakan kepegawaian yang disesuaikan dengan kebijakan Otsus Papua
		8	Rendahnya mentalitas ASN terkait disiplin dan kinerja
	2 Belum optimalnya kelembagaan dan tata laksana aparatur dan kepegawaian	1	Belum efektifnya sosialisasi sistem penilaian beban kerja pegawai
		2	Belum berkembangnya sistem <i>reward</i> untuk ASN berprestasi dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
		3	Belum adanya sistem database dan informasi ASN yang terintegrasi, komprehensif dan berbasis kinerja
	3 Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	1	Kurangnya sarana penunjang akses informasi dan komputer
		2	Model <i>e-government</i> masih didominasi perspektif <i>provider</i> tunggal dan tidak terintegrasi
		3	Belum adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5.3 Urusan Bidang Keuangan Daerah

Urusan keuangan berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang keuangan di Papua Tengah terdapat pada Tabel 2.103.

Tabel 2. 103 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Keuangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah
			2	Belum akuratnya database pajak dan retribusi serta objek pendapatan daerah lainnya
			3	Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya
			4	Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Penyampaian LKPD tidak tepat waktu
			2	Penyusunan APBD yang tidak tepat waktu
			3	Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD
			4	Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah
			5	Prinsip <i>value for money</i> dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan
			6	Belum optimalnya penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah
	3	Belum optimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus	1	Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otonomi Khusus
			2	Kurang optimalnya pelaporan pengelolaan dana Otsus
			3	Belum tersedianya nomenklatur belanja dan program kegiatan khusus Otonomi Khusus
	4	Belum optimalnya kapasitas aparatur keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi
			2	Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5.4 Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan berkaitan dengan perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; perencanaan wilayah dan tata ruang; serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam implementasi urusan perencanaan, pembangunan daerah di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 2.104. berikut.

Tabel 2. 104 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan dan penataan ruang	1 Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil	1 Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan
		2 Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
		3 Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
		4 Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang diakibatkan
		5 Belum optimalnya kajian-kajian dan perencanaan khusus konstektual Papua Tengah
	2 Belum optimalnya sinergi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1 Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan belum berjalan optimal
		2 Lemahnya tingkat pemahaman terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien
	3 Belum optimalnya Penyelenggaraan Perencanaan Otonomi Khusus Papua	1 Cakupan pendataan OAP secara berkala dengan menggunakan SIO Papua yang terintegrasi belum 100%. Padahal, cakupan pendataan OAP berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan OTSUS bermanfaat bagi OAP.
		2 Terdapat OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya pembagian kewenangan urusan berdasarkan PP 106 Tahun 2021
		3 Belum tersedianya instrumen perencanaan khusus untuk pelaksanaan Otonomi Khusus di level Provinsi, kabupaten/kota dan juga Kampung. Perencanaan Otsus saat ini masih digabung dengan perencanaan umum daerah
		4 Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang OTSUS masih digabung dengan Musrenbang RKPD
	4 Terdapat permasalahan pengelolaan dan manajemen perencanaan	1 Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
		2 Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu

		3	Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas OPD, termasuk hubungan perencanaan dengan provinsi dan pemerintah pusat
		4	Belum optimalnya penjangkauan aspirasi masyarakat di semua jenjang pemerintahan melalui mekanisme Musrenbang
		5	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
		6	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound</i>) dan terstruktur (<i>ter-cascading</i>)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.5.5 Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Papua Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2. 105 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dalam pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya	1	Belum optimalnya revidu terhadap dokumen Perencanaan, Anggaran dan dokumen lainnya (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, Renja dan RKA)
			2	Masih rendahnya Implementasi SPIP di Lingkup Pemerintah Daerah
			3	Masih rendahnya capaian penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
			4	Belum optimalnya pengawasan dan audit penyelenggaraan program program Otsus
			5	Belum terbentuknya wadah/majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Sabarpungli dalam rangka penyelesaian kerugian daerah serta menunjang pelayanan Publik
	2	Belum optimalnya kapasitas dan integritas SDM tentang akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi dan rendahnya kesadaran pejabat untuk melaporkan harta kekayaan
			2	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, mark up harga, kurang volume pekerjaan dan pekerjaan tidak tepat waktu
			3	SDM APIP di Pemerintah Daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.3.1.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan solusi berkelanjutan. Seperti

- Infrastruktur yang Terbatas**
Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan raya, transportasi, dan energi dapat menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas ke wilayah pedalaman. Hal ini menyulitkan distribusi barang, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
- Ketidaksetaraan Pendidikan**
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi masalah di beberapa daerah Papua Tengah. Faktor geografis yang sulit diakses, kurangnya sarana pendidikan, dan tantangan keamanan dapat menghambat kesempatan pendidikan bagi masyarakat setempat.
- Kesejahteraan dan Kemiskinan**
Meskipun Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, beberapa masyarakat di wilayah ini masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemisahan geografis dan kendala aksesibilitas mempersulit upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Masalah Kesehatan**
Layanan kesehatan di beberapa wilayah mungkin terbatas, dan akses ke fasilitas kesehatan sering kali sulit. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyebaran penyakit menular.
- Ketegangan Sosial dan Konflik**
Beberapa daerah di Papua Tengah masih mengalami ketegangan sosial dan konflik, baik yang berkaitan dengan isu-isu pemekaran wilayah, hak asasi manusia, atau ketidaksetaraan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan wilayah.
- Konservasi dan Pembangunan Ekonomi**
Tantangan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi dapat menjadi kompleks di Papua Tengah. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem alam dan berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan.
- Ketidaksetaraan Gender**
Beberapa masyarakat di Papua Tengah masih menghadapi ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan rumah tangga. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah ini.
- Keterbatasan Akses Teknologi**
Beberapa wilayah mungkin masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menghambat konektivitas dan akses informasi bagi masyarakat.
- Keterlibatan Masyarakat Lokal**
Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan masih merupakan tantangan. Peningkatan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif.

2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis memberikan gambaran tentang permasalahan pokok pembangunan maupun peluang yang merentang mulai konteks internasional, nasional, maupun regional di Tanah Papua. Berbagai isu tersebut membentuk lingkungan strategis bagi Provinsi Papua Tengah, yang kemudian sebagai dasar dalam perumusan isu strategis pembangunan Papua Tengah. Isu strategis sendiri diartikan

sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang.

2.3.2.1 Isu Internasional

Pemerintah nasional dan sub nasional di berbagai negara memiliki kewajiban untuk merespon berbagai permasalahan internasional sebagai akibat dari adanya perkembangan zaman dan dinamika sosial politik di tingkat global. Berbagai isu internasional kerap muncul seiring kemajuan teknologi maupun dari skema kerja sama internasional, misalnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah di respon oleh Pemerintah Indonesia di tingkat nasional melalui Perpres No. 59 Tahun 2017. Selain itu, perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan, revolusi Industri 4.0 telah menciptakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi setiap warga negara dan lembaga pemerintah untuk menata kembali eksistensi mereka dengan mempercepat digitalisasi yang dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, aspek lingkungan juga turut menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Isu pemanasan global kerap menghantui berbagai belahan dunia di tengah maraknya pembangunan di berbagai negara. Adapun penjelasan secara lebih rinci mengenai isu-isu internasional yang sedang bergulir dapat dilihat pada bagian berikut.

2.3.2.1.1 Sustainable Development Goals (SGDs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan buah kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang mulai diadopsi oleh berbagai negara sejak September 2015. Negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk memobilisasi negara-negara di dunia untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Sebagai sebuah tujuan global yang berorientasi lebih jauh untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan, SDGs mengajak seluruh negara dengan berbagai kekuatan ekonominya untuk mempromosikan kesejahteraan global sekaligus melindungi planet bumi dari berbagai ancaman keamanan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis mulai dari merumuskan sasaran yang tepat dan strategi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menangani berbagai permasalahan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta mengatasi perubahan iklim.

SDGs sebagai upaya pembangunan global memiliki 17 tujuan yang meliputi beberapa aspek pembangunan dan terdiri atas 4 pilar, yaitu: 1) Pembangunan Sosial; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan; dan 4) Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya, 17 tujuan pembangunan tersebut dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target tersebut merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, hingga level kabupaten/kota. Adapun 17 tujuan dari SDGs yang perlu dijadikan pijakan dalam melihat isu-isu strategis di level global adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan untuk semua, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
8. kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

9. Membangun infrastuktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, terdapat 236 indikator *SDGs* yang merupakan kewenangan provinsi. Berdasarkan hasil indentifikasi awal terkait kesesuaian indikator *SDGs* dengan kondisi kewilayahan Papua Tengah, maka terdapat 224 (95%) Indikator *SDGs* yang sesuai dengan kondisi dan kewenangan pencapaian *SDGs* di Provinsi Papua Tengah. Guna memastikan pencapaian seluruh target indikator *SDGs* di Papua Tengah, maka diperlukan penyusunan dokumen RAD TPB/*SDGs* yang selaras dengan perencanaan jangka Panjang Provinsi Papua Tengah. Hal ini harus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya pencapaian *SDGs* hingga tahun 2030.

2.3.2.1.2 Pemanasan Global

Di tengah era globalisasi ini, faktor kelestarian lingkungan perlu menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi di mana upaya pembangunan yang turut memperhatikan aspek lingkungan semakin mengalami penurunan. Jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat, maka ancaman global warming akan turut merusak kondisi lingkungan hidup. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam dan dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir bahkan dapat menjadi faktor utama bencana alam lainnya. Oleh karena itu, antisipasi dalam bentuk kebijakan terhadap isu global warming menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah di berbagai dunia. Hal tersebut dapat dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Berbagai bentuk upaya pembangunan harus memiliki strategi dan eksekusi yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan perlu dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan dampak dari global warming dapat diminimalisir. Sebagai salah satu upaya antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pengawasan peruntukan lahan yang ketat dalam pembangunan, khususnya yang melibatkan wilayah hutan. Hal ini dilakukan guna memastikan porsi lahan hijau di suatu wilayah tetap terjaga. Dengan adanya permasalahan pemanasan global, pentingnya suatu kebijakan yang mengatur wilayah Papua Tengah terutama lahan-lahan hijau yang merupakan paru-paru dunia.

2.3.2.1.3 Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan istilah untuk menggambarkan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur termasuk sistem cyber-fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, komputasi kognitif, dan artificial intelligence. Istilah ini bermula dari inisiatif untuk membuat industri manufaktur Jerman lebih kompetitif dan kemudian istilah ini diadopsi secara global. Tujuannya adalah untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan secara otonomi, memantau aset dan proses secara real-time, dan dunia yang lebih terintegrasi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia daring dan lini produksi di industri di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Perkembangan teknologi yang memunculkan revolusi industri 4.0 juga mendorong hadirnya perbaikan sektor publik. Berbagai pihak memprediksi bahwa keuntungan dari revolusi industri mampu mendisrupsi praktik-praktik tradisional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, warga negara memiliki akses yang lebih luas terhadap data publik dan mampu memproduksi serta menyebarkan isu-isu kepublikan kepada khalayak. Di waktu yang bersamaan, ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat seiring dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta otomatisasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.

Namun demikian, hadirnya revolusi industri 4.0 juga memiliki tantangan yang setara dengan manfaat yang didapat. Salah satu hal yang paling kompleks adalah proses digitalisasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Proses ini sudah mulai dilakukan dan ditemukan dalam berbagai jenis layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan sektor lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan banyak ditemukan, terutama berkaitan dengan kesiapan SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Upaya perbaikan perlu terus dilakukan, mengingat manfaat yang akan didapatkan cukup besar. Upaya digitalisasi perlu dijadikan sebagai katalisator dalam upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah dengan syarat harus memperkuat bagian-bagian yang masih lemah.

Untuk memperkuat transformasi digital, kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia telah diarahkan pada dua sektor prioritas, yaitu pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Pertama, pelayanan publik telah melakukan transformasi digital sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pengembangan *E-Government* mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik. Kedua, transformasi digital di bidang ekonomi juga telah dilakukan sejak pemerintah melihat potensi besar ekonomi berbasis digital. Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Demikian pula, besarnya potensi ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah karena beberapa tantangan mendasar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa setidaknya ada lima tantangan transformasi digital di Indonesia dari perspektif investasi, yaitu: 1) cyber security atau keamanan data digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek; 3) kualitas sumber daya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi yang belum sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada konteks daerah-daerah di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik dan ekonomi perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain sebagai upaya untuk mengakselerasi, pelayanan di level daerah merupakan yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat. Di sektor pelayanan publik dan pemerintahan, pemerintah daerah berpeluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Namun demikian, tantangan pada sisi SDM dan aksesibilitas perlu diintervensi lebih serius. Meskipun terlihat sebagai konsep yang 'berat' dan belum begitu relevan dengan konteks wilayah di Provinsi Papua Tengah, beberapa aspek dari revolusi industri 4.0, seperti *E-Government* dan keamanan data menjadi sesuatu yang berguna untuk perbaikan layanan publik. Oleh karena itu, isu terkait revolusi industri 4.0 perlu menjadi satu bagian yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan di lingkup Provinsi Papua Tengah di tahun yang akan datang.

2.3.2.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan Lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

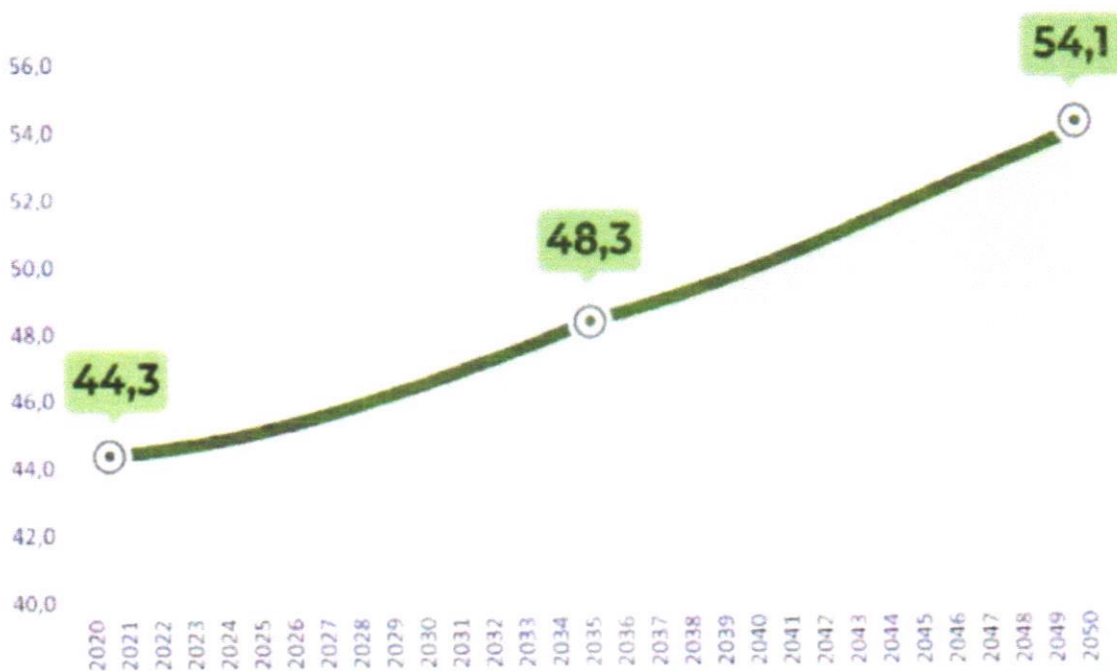
2.3.2.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada tahun 2022, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 Juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata-rata tahun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki pasar yang besar, terutama untuk produk-produk dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global dan dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Dengan struktur penduduk yang menguntungkan, di mana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi, yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran mereka terus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitasnya.

Gambar 2. 13 Rasio Ketergantungan Indonesia 2020-2050



Sumber: RPJPN 2025-2045

2.3.2.2.2 Produktivitas Rendah

Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tecermin dari Total Factor Productiuitg (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971- 1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan

dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan Ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan mencapai 5,3 persen pada Tahun 2022.

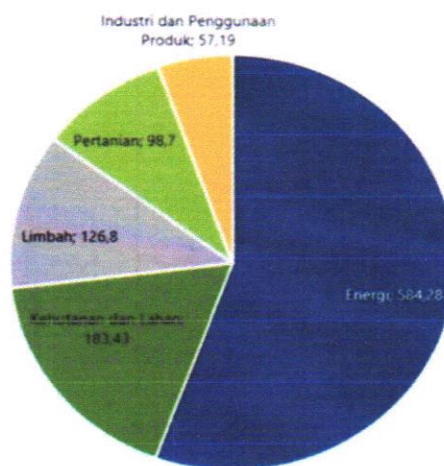
2.3.2.2.3 Perubahan Iklim

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "kode merah bagi manusia." Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahun, 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celsius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar 0,7 - 0,9 cm/tahun.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO₂e atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO₂e (*Our World in Data based on the Global Carbon Project*, 2022). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila pembangunan tidak berubah. Pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan emisi GRK nasional akan terus meningkat hingga dua kali lipat mencapai 2,27 GtCO₂e di tahun 2045.

Gambar 2. 14 Emisi Gas Rumah Kaca Nasional



Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar 2. 4 Proyeksi Tren Peningkatan Emisi GRK GtCO₂e Tahun 2045

Grafik 2.3.2. Proyeksi tren peningkatan emisi GRK (GtCO₂e)



Sumber: RPJPN 2025-2045

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi Risiko perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022 memberikan peringatan bahwa waktu untuk bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

2.3.2.2.4 Pemindahan Ibukota IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, menyongsong tatanan baru, cara kerja baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia ke depan. Undang-undang IKN disahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Pembangunan fisik IKN telah dimulai sejak tanggal 14 Maret 2022. Pemindahan ibu kota ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut super hub ekonomi IKN.

Pembangunan IKN menjadi miniatur penting dalam transformasi ekonomi. Menempatkan pembangunan dan pemindahan IKN sebagai core program sejalan dengan menjadikan IKN sebagai superhub ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Jadi bukan hanya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur yang berbasis value creation tetapi juga mengimplementasikan strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui superhub tersebut yang akan meningkatkan perdagangan antara wilayah di Indonesia.

2.3.2.2.5 Asta Cita

Asta Cita merupakan 8 Misi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang dijadikan kebijakan prioritas Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029, di mana secara ketentuan dan kebijakan pemerintah daerah wajib menindaklanjutinya di dalam penyelarasan arah kebijakan pembangunan, sasaran pembangunan, tujuan pembangunan yang ingin dicapai, program prioritas pembangunan serta indikator pembangunan yang digunakan, dalam menerjemahkan 8 Misi Asta Cita dalam merencanakan pembangunan di Provinsi Papua Tengah ke depan agar tercapai Papua Tengah yang Sehat, Cerdas dan Produktif. Berikut ini adalah 8 Misi Asta Cita yang harus dijadikan landasan kebijakan dalam proses pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, di mana mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua tengah secara rinci tersirat sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) ;
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru ;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur ;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas ;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri ;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan ;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba ;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.3.2.3 Isu Pembangunan Papua

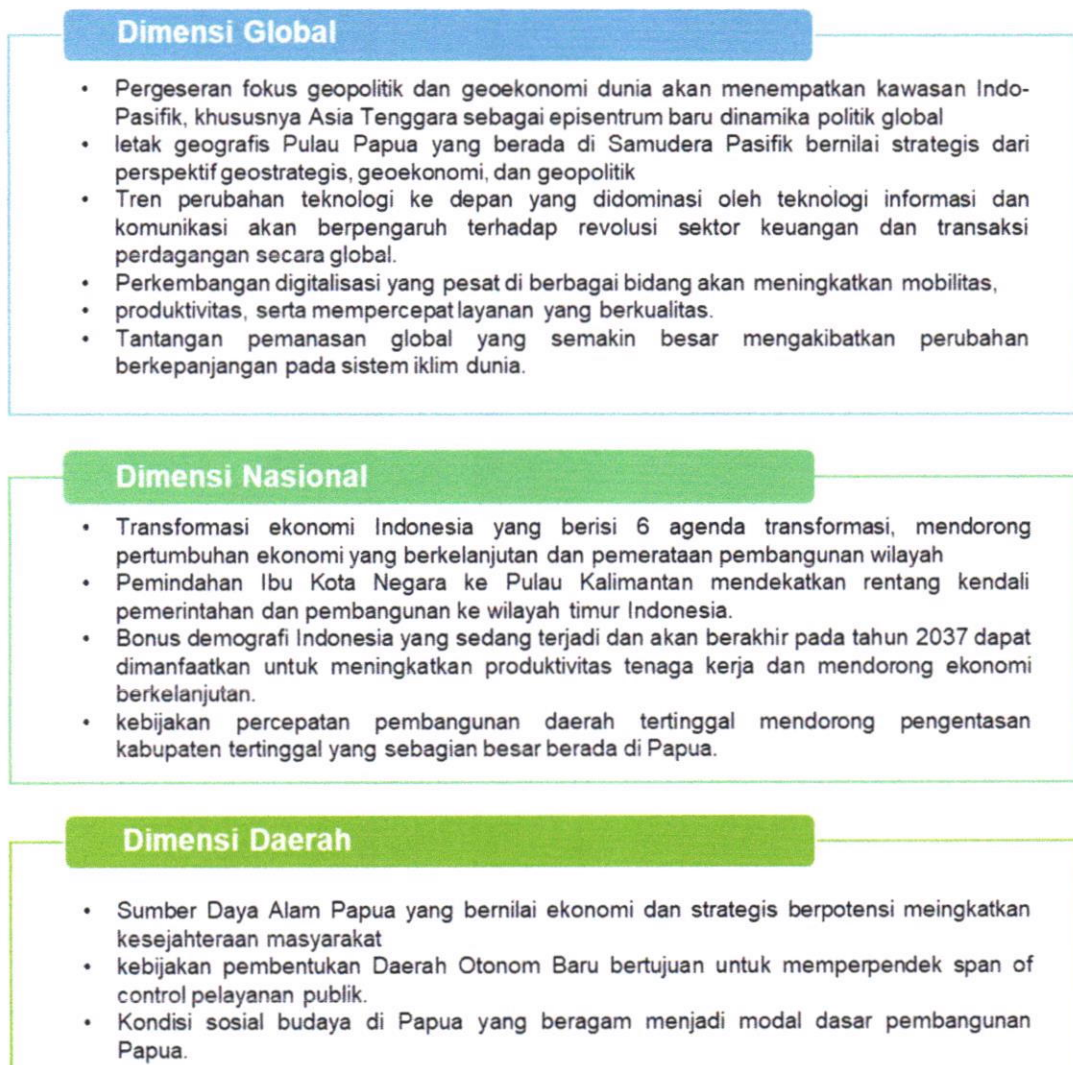
Isu pembangunan Papua merupakan isu dan persoalan pembangunan seluruh wilayah di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Tengah. Isu pembangunan Papua secara makro terkait kesejahteraan dan keberdayaan Orang Asli Papua, serta stabilitas wilayah. Isu Papua tidak hanya sebagai persoalan lokal, melainkan telah menjadi isu nasional. Pemerintah pusat, oleh karena itu telah merespon melalui berbagai kebijakan untuk penguatan Otonomi Khusus Papua dan percepatan pembangunan kesejahteraan. Kebijakan makro berupa revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021. Regulasi perubahan tersebut telah memiliki aturan turunan yang memuat detail terkait kewenangan Otonomi Khusus Papua hingga amanat penyusunan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Sebelum adanya kebijakan makro tersebut, telah dikeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Strategi pembangunan Papua yang termaktub di dalam Inpres tersebut, yaitu:

1. Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan Partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi.
2. Pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP).
3. Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah terluar, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.
4. Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintahan daerah dan pelibatan peran serta masyarakat.
6. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal, Tokoh Agama dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua.
8. Peningkatan kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak.
9. Peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi
10. Peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua menjadi zona yang aman, stabil, dan damai.
11. Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Wilayah Pulau Papua.

Strategi tersebut telah komprehensif yang memandang Papua mulai dari level lokal, nasional, hingga internasional. Rumusan strategi juga menempatkan Orang Asli Papua sebagai subyek pembangunan sekaligus penerima manfaat yang besar dari pembangunan. Kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan Papua diperkuat dengan RIPPP yang berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pendanaan Papua dalam rangka Otonomi khusus untuk kesejahteraan di Papua. RIPPP sendiri merupakan amanat dari perubahan undang-undang Otonomi khusus, yang secara khusus dilandasi oleh Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

RIPPP merumuskan konteks lingkungan strategis yang merangkai mendesaknya percepatan pembangunan Papua. Konteks lingkungan strategis tersebut berada dalam dimensi global, nasional, dan daerah sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Konteks Lingkungan Strategis Dalam Dimensi Global, Nasional, dan Daerah



Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 24 Tahun 2023

RIPPP memiliki Visi “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Visi tersebut akan dicapai melalui misi, sasaran, dan dimensi pembangunan. Selain itu, tidak kalah penting RIPPP juga merumuskan kondisi perlu sebagai prasyarat tercapainya sasaran pembangunan.

Tabel 2. 104 Visi dan Misi RIPPP 2022-2041

Visi:		
Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera		
Misi	Sasaran	Dimensi Pembangunan
Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.	Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. • Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan. • Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.
Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas.	Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan yang berkualitas. • Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif. • Distribusi tenaga pendidik yang merata. • Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.
Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.	Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi masyarakat adat dan sumber daya lokal. • Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global. • Sumber daya alam yang berkelanjutan. • Ekonomi lokal. • Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kondisi Perlu: <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dasar dan konektivitas • Lingkungan hidup • Tata kelola pembangunan • Tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial 		

Pengarusutamaan:

- Gender
- Sosial budaya
- Transformasi digital
- Resiliensi bencana dan perubahan iklim

Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 24 Tahun 2023

2.3.2.4 Isu Strategis Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)

Indikasi program dan alokasi prioritas percepatan pembangunan wilayah Papua menuju Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produksi agar dapat mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia Papua yang unggul serta pembangunan ekonomi Papua yang inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola yang baik, bersih dan berwibawa.

Papua sehat, cerdas dan produktif hanya dapat di wujudkan melalui indikasi program dan lokasi prioritas pembangunan daerah, dengan kebijakan pelaksanaan pembangunannya di provinsi Papua tengah, yang terdiri dari:

1. Pengembangan *Mobile Health Service*, kebijakannya untuk mengatasi masalah aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah sulit dengan kondisi geografis yang beragam, indikasi Kabupaten Prioritasnya Dogiyai, Intan Jaya dan Puncak;
2. Akselerasi Akses dan Mutu Layanan Kesehatan, kebijakannya fokus pada pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, termasuk sarana prasarana, obat, dan alat kesehatan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, Deyai dan Dogiyai;
3. Peningkatan Layanan Kesehatan, kebijakannya fokus pada daerah dengan capaian indikator kesehatan yang relatif baik dalam rangka mempertahankan capaian tersebut agar tidak turun, indikasi Kabupaten Prioritasnya Nabire, Mimika dan Paniai;
4. Pengembangan Sekolah Alam (*Culture Based Learning*) dan Sekolah Sepanjang Hari, kebijakannya adalah program pembelajaran alam kontekstual Papua terutama di daerah sulit akses mengingat tingkat aksesibilitas layanan pendidikan dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta partisipasi peserta didik yang rendah, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya;
5. Akselerasi Akses dan Mutu Layanan Pendidikan, kebijakannya fokus pada daerah dengan capaian indikator pendidikan yang relatif masih rendah, dengan fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan manajemen pendidikan, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai;
6. Peningkatan Layanan Pendidikan, kebijakannya fokus pada daerah yang capaian indikator pendidikan yang sudah relatif baik dalam rangka mempertahankan capaian tersebut agar tidak turun, dan juga fokus pada kemajuan pengelolaan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, indikasi Kabupaten Prioritasnya Nabire dan Mimika;
7. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dan Pariwisata, kebijakannya adalah fokus pada peningkatan nilai tambah dari potensi komoditas unggulan/pariwisata, sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan daerah, indikasi Kabupaten Prioritasnya Puncak (Kopi), Intan Jaya (Kopi), Deiyai (Kopi), Dogiyai (Kopi), Paniai (Kopi), Nabire (Perikanan Tangkap), Mimika (Perikanan Tangkap) dan Daya Tarik Wisata Prioritasnya diperlukan masukan;
8. Pengembangan Pangan Lokal dan Kawasan Sentra Produksi Pangan, kebijakannya adalah fokus untuk ketahanan pangan lokal dengan memanfaatkan lahan di lingkungan sekitar sesuai ciri khas makanan pokok masing-masing daerah, indikasi Kabupaten Prioritasnya untuk Pengembangan Pangan Lokal seluruh kabupaten Kawasan Sentra Produksi Pangan;

9. Percepatan Investasi Kawasan, kebijakannya adalah fokus pada percepatan peningkatan realisasi investasi pada kawasan strategis, dengan fokus pada pengembangan industri, ekspor, dan pemasaran produk, dan penanaman modal, dengan tetap mendayagunakan tenaga kerja lokal, indikasi Kabupaten Prioritasnya Mimika;
10. Pengembangan Model Kota Kecil Berkelanjutan, kebijakannya adalah fokus pada pengembangan model kota kecil yang berkelanjutan, adaptif dan resilien terhadap bencana dan perubahan iklim, serta layak huni, indikasi Kabupaten Prioritasnya diperlukan masukan;
11. Penataan Tanah Adat atau Ulayat, kebijakannya adalah fokus pada penguatan perlindungan masyarakat hukum adat serta penataan tanah adat atau ulayat sehingga pembangunan dapat berjalan optimal, indikasi Kabupaten Prioritasnya seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;
12. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonomi Baru, kebijakannya adalah fokus pada percepatan pembangunan sarana prasarana pada kawasan pemerintahan serta penataan kawasan pada lingkup perkotaan, indikasi Kabupaten Prioritasnya Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

2.3.2.5 Isu Strategis Provinsi Papua Tengah

2.3.2.5.1 Isu Strategis Berdasarkan Kondisi Muatan Lingkungan.

Identifikasi Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) berdasarkan kondisi muatan lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah menjadi salah satu sumber dalam proses sintesis isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam KLHS RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029. Berikut merupakan isu berdasarkan kondisi muatan lingkungan hidup :

1. Provinsi Papua Tengah dikategorikan dalam kelas “ sangat rentan (sangat tinggi)”;
2. Bahaya tanah longsor; didominasi oleh kelas indeks bahaya bencana tanah longsor dengan kelas tinggi sebesar 3.166.786 hektar atau 81% dari total luas wilayah meliputi delapan Kabupaten ;
3. Bahaya Likuifaksi : di dominasi oleh kelas indeks bahaya Likuifaksi dengan kelas sedang sebesar 1.353.372 hektar atau 69% dari luas total wilayah delapan Kabupaten;
4. Bahaya banjir: didominasi oleh kelas indeks bahaya bencana banjir dengan kelas sedang sebesar 461.254 hektar atau 45% dari luas total wilayah meliputi delapan Kabupaten;
5. Penyedia air bersih: jasa ekosistem ini didominasi oleh kategori sedang mencakup luas sebesar 3.261.629 ha atau 53% dari total luas wilayah Provinsi Papua tengah;
6. Penyedia pangan: jenis jasa ekosistem ini dominan dalam kategori sedang, mencakup luas sebesar 3.566.793 ha atau 58% dari total luas wilayah Provinsi Papua Tengah;
7. Rawan bencana gempa bumi tinggi, dominan berada di Kabupaten Mimika dan Nabire;
8. Potensi timbulnya lumpur tinja di Provinsi Papua Tengah yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk (pada tahun 2029 mencapai 289.701.186 liter/orang/tahun);
9. Potensi timbulnya sampah yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk (pada tahun 2029 mencapai 1.448.5005.903 liter/orang/tahun);
10. Indikator status daya dukung pangan yang terlampaui dengan ambang batas penduduk sebesar 19.170 jiwa dan selisih ketersediaan - kebutuhan sebesar - 1.124.994.324.095 m³/tahun.

Identifikasi tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB) strategis berdasarkan kondisi muatan lingkungan hidup provinsi Papua tengah memberikan pandangan komprehensif mengenai tantangan dan potensi yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan Daerah dengan memperhatikan isu-isu seperti kerentanan terhadap bencana alam, ketersediaan air bersih, pangan, serta timbulnya sampah dan limbah, hasil ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap kondisi nyata. Sintesis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029, guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masa depan provinsi.

2.3.2.5.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Papua Tengah

Selain isu-isu strategis internasional, nasional, dan wilayah papua secara umum, Papua Tengah juga menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis di tingkat provinsi. Isu-isu ini terkait dengan pencapaian tujuan pembentukan daerah Otonomi baru yakni untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP di ke-4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Isu-isu strategis di wilayah Provinsi Papua Tengah muncul sehubungan dengan Papua Tengah yang dibagi dalam 4 pendekatan pembangunan wilayah adat, yaitu 1) wilayah adat Meepago ; 2) wilayah adat La Pago ; 3) wilayah adat Saireri ; dan 4) wilayah adat Domberay, di mana kondisi wilayah yang secara geografis berada di wilayah pedalaman, pesisir pantai, kepulauan dan masih terisolir, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan dan keamanan. Di sisi pemerintah daerah, terdapat peningkatan beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dengan berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang definitif, diharapkan akan terjadi optimalisasi pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan membuat jadi kokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Dalam melaksanakan Otonomi daerah, Provinsi Papua Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah isu-isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah dalam melakukan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah hingga tahun 2045 (Indonesia Emas), yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh hampir semua wilayah di Papua secara umum dan secara khusus di Provinsi Papua Tengah dalam kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gizi yang memadai.

Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan pokok misalnya adalah; belum adanya Perguruan Tinggi Negeri di Papua Tengah, cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal, dan Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah saat ini antara lain terjadi karena (1) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2) Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta (3) Cakupan dan kualitas program kesehatan belum optimal. Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua Tengah sering kali masih dibayangi oleh adanya ancaman kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaan ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua Tengah sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangkan dan peningkatan produksi komoditi pangan lokal dan membudayakan konsumsi pangan

lokal perlu ditingkatkan di Papua Tengah untuk mencapai kedaulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua Tengah merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi *stunting* di Papua Tengah.

2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah masih rendah, jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini tentu saja berkontribusi pada rendahnya daya beli di masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu melakukan penguatan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada sumber daya lokal.

Ekonomi basis di Provinsi Papua Tengah adalah pertanian, perkebunan dan perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan ekonomi rumah tangga, terutama OAP. Perlu adanya peran pemerintah provinsi dalam mendukung, memfasilitasi dan memperkuat kegiatan ekonomi tersebut melalui fasilitasi infrastruktur produksi dan pemasaran, pengembangan pelatihan dan pengembangan pusat-pusat pemasaran.

Provinsi Papua Tengah adalah provinsi dengan laju perkembangan kegiatan yang relatif pesat. Maka dari sisi SDM perlu dipersiapkan untuk memiliki keterampilan ekonomi non-basis, ekonomi kreatif mencakup keterampilan/kerajinan, kesenian/kebudayaan, dan digital adalah kegiatan ekonomi yang berkembang dan perlu dikuasai oleh sumber daya lokal. Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya keterampilan/ kerajinan peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, kuliner dan pakaian dan memenuhi kebutuhan cendera mata bagi turis baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota akan mendukung pengembangan pusat-pusat pelatihan dan pameran kerajinan/industri lokal.

3. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten

Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah di samping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Di samping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah sering kali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, ke depan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

4. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah di Wilayah Papua Tengah

Pentingnya peningkatan koordinasi dengan TNI-Polri, Tokoh Agama, masyarakat, dan komunitas adat guna memperkuat penanganan keamanan di Provinsi Papua Tengah. Komunikasi dan koordinasi penting dilakukan, agar penanganan keamanan berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya masalah keamanan jika tidak cegah secara dini maka akan mempengaruhi atau berdampak pada pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah.

5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Daerah Tertinggal

Letak dan posisi geografis daerah tertinggal, Pesisir, dan pulau-pulau kecil sering menyebabkan timbulnya disparitas perkembangan sosial ekonomi. Penduduk yang terisolasi secara geografis sering terbelakang dan terkategori miskin, dilihat dari kondisi perumahan, ketersediaan air bersih dan sanitasi/kesehatan lingkungan. Persebaran penduduk antara pulau-pulau dapat juga menjadi pemicu belum berkembangnya pusat pertumbuhan wilayah berbasis kepulauan. Akhirnya, persebaran penduduk menjadi tidak merata dalam memperoleh akses dasar dari kegiatan layanan pemerintah, dan pada gilirannya menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan dan ketimpangan yang semakin dalam, semakin parah dan semakin meluas akan mengancam sistem sosial-ekonomi yang ada. Sehingga perlu adanya perhatian Khusus dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi adalah gambaran atau impian tentang masa depan yang ingin dicapai oleh suatu Daerah sedangkan Misi adalah tujuan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencapai visi tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Tengah Dalam Kepemimpinan 2025-2029 mempunyai Slogan Yaitu "*Papua Tengah Terang*". Adapun uraian dimaksud dalam kata "*Terang*" adalah cita-cita kepala daerah untuk mewujudkan Papua Tengah Terang dengan uraian Sebagai Berikut:

1. Transportasi Terkoneksi,
2. Edukasi untuk Semua dan Energi Terbarukan,
3. Rakyat Berdaya Beli dan Lapangan kerja yang luas,
4. Aman dan Bermartabat,
5. Nilai Kemanusiaan yang bermartabat,
6. Gerakan Hidup Sehat.

Dalam mencapai cita-cita Kepala Daerah dalam mewujudkan "*Papua Tengah Terang*" Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki Moto yaitu "*Memimpin Dengan Kasih*".

3.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah "*Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan berkelanjutan*" dengan penjelasannya sebagai berikut:

PAPUA TENGAH EMAS

Papua Tengah yang "*Emas*" tidak hanya bermakna kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai unggulan dalam aspek sosial, budaya, dan lingkungan. "*Emas*" dapat menjadi akronim untuk ekonomi mandiri, aman, dan sejahtera, yang mengacu pada kondisi masyarakat yang memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, merasa aman dalam kehidupannya dan merasakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Papua Tengah Emas terdapat dalam *Sila kelima Pancasila* yaitu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* karena konsep "*Emas*" dapat di artikan sebagai kemakmuran dan kejayaan yang dapat di nikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk Papua Tengah dengan cara yang adil dan berkeadilan sosial.

PAPUA TENGAH ADIL

Keadilan mencakup pemerataan hasil pembangunan antar wilayah di provinsi Papua Tengah, terutama untuk daerah pedalaman dan pegunungan. "*Adil*" juga berarti adanya akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama atau status sosial.

Papua Tengah "*Adil*" terdapat dalam *Sila kelima Pancasila* yaitu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Dalam konteks Papua Tengah Adil, *Sila kelima* ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Pembangunan yang "*Adil*" di Papua Tengah harus memastikan bahwa semua masyarakat di Papua Tengah dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan kemajuan, serta bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat.

PAPUA TENGAH BERDAYA SAING

Papua Tengah yang "*Berdaya saing*" mencerminkan masyarakat yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal dengan teknologi modern serta pendidikan yang berkualitas. Ini termasuk peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

berbasis potensi lokal, pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul serta keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi nasional dan internasional.

Papua Tengah “Berdaya Saing” terdapat dalam *Sila keempat Pancasila*, yaitu *Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan*. Dalam konteks Papua Tengah berdaya saing. *Sila keempat Pancasila* ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Pembangunan yang berdaya saing di Papua Tengah harus memastikan bahwa semua masyarakat di Papua Tengah dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta bahwa pembangunan, di lakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

PAPUA TENGAH BERMARTABAT

Masyarakat Papua Tengah yang “Bermartabat” menunjukkan tinggi nilai – nilai budaya asli dan adat istiadat yang menjadi identitas mereka. “Bermartabat” juga berarti bahwa masyarakat memiliki rasa bangga terhadap daerah mereka dan dihargai dalam kancah nasional dan global. Perlindungan terhadap hak-hak adat serta pelestarian budaya menjadi bagian penting dari aspek ini,

Papua Tengah “Bermartabat” terdapat dalam *Sila kedua Pancasila*, yaitu *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, dalam konteks Papua Tengah Bermartabat, *Sila kedua Pancasila* ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti martabat, harga diri, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pembangunan yang bermartabat di Papua Tengah harus memastikan bahwa semua masyarakat di Papua Tengah dapat hidup dengan dignitas , harga diri, dan kehormatan, serta bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat.

PAPUA TENGAH HARMONIS

Kehidupan masyarakat yang “Harmonis” di tandai dengan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman serta penyelesaian konflik secara damai. “Harmonis” tidak hanya terjadi di antara manusia, tetapi juga antara manusia dan lingkungan alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua Tengah. Papua Tengah “Harmonis” terdapat dalam *Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa*, ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan, serta membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan sekitar.

Pembangunan yang harmonis di Papua tengah harus memastikan bahwa semua masyarakat di Papua Tengah dapat hidup dengan damai, aman, dan sejahtera, serta bahwa pembangunan tidak merugikan atau mengeksploitasi masyarakat lemah atau pinggiran.

PAPUA TENGAH MAJU

Papua Tengah “Maju” yang di harapkan meliputi berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan, layanan pendidikan yang modern, sistim kesehatan yang andal, serta peningkatan akses informasi dan komunikasi. Kemajuan ini di ukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah di tingkat Nasional, Papua Tengah “Maju” masuk dalam *Sila ketiga Pancasila* yaitu *Persatuan Indonesia*.

Dalam konteks Papua Tengah “Maju”, *Sila ketiga Pancasila* ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua Tengah harus di lakukan dengan mempertimbangkan *Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia*.

Pembangunan yang maju di Papua Tengah harus memastikan bahwa semua Masyarakat di Papua Tengah merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan bahwa pembangunan tidak memperburuk perbedaan atau konflik antara masyarakat di Papua Tengah dan masyarakat di daerah lain di Indonesia. .

PAPUA TENGAH BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memastikan manfaat

pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Aspek sosial, ekonomi dan lingkungan perlu saling mendukung dalam pola pembangunan yang ramah lingkungan.

Keterkaitan antara Visi RPJMD TAHUN 2025 – 2029 dan RPJPD, saling terhubung antara kedua dokumen yang di mana Visi RPJPD Provinsi Papua Tengah sejalan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada RPJPD yaitu “*Terwujudnya Papua Tengah Adil, Berdaya Saing, Maju Dan Berkelanjutan*” dengan penjelasan sebagai berikut:

ADIL

Keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek pembangunan, termasuk distribusi sumber daya, akses terhadap layanan, dan peluang bagi semua lapisan masyarakat dan dapat mengacu pada peningkatan akses dan keadilan dalam sistem hukum dan sosial.

BERDAYA SAING

Menunjukkan fokus pada peningkatan daya saing wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang baik, serta sumber daya manusia yang terampil dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing Papua Tengah.

MAJU

Bila di lihat dari tujuan nasional, pada tahun 2045 Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Hal ini juga secara langsung akan beriringan dengan tujuan dari provinsi Papua Tengah menjadi provinsi berdaya, inovatif dan tangguh. Kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keamanan.

BERKELANJUTAN

Mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah di laksanakan dengan memperhatikan asas konservasi baik dalam hal SDA, lingkungan alam, lingkungan hidup, serta keanekaragaman budaya dengan prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan tidak serta merta mengeksploitasi kekayaan alam dan berorientasi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan menjunjung kearifan lokal. Di mana kedua visi tersebut saling terhubung sebagai dasar pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan, berkeadilan dan tetap terdepan dalam mempertahankan alam dan budaya sebagai aset bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua Tengah yang makmur dan sejahtera dengan potensi sumber daya alam yang di optimalkan secara bijaksana demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Provinsi Papua Tengah juga Sejalan dengan visi RPJMN Tahun 2025 – 2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Dapat dilihat dari kesamaan tujuan dalam membentuk Indonesia Emas dan Papua Tengah Emas. Dari visi tersebut saling terkait bahwa untuk mencapai visi tersebut di perlukan kerja sama putra putri terbaik dalam membangun Indonesia menuju Indonesia emas, di mana kemajuan suatu daerah ada pada masyarakat yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan dalam membangun daerahnya menuju Indonesia emas, dengan masyarakat yang mampu bersaing dalam segala aspek.

3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi “*Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan berkelanjutan*”, maka dirumuskan misi Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 sebagai

berikut.

1. Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan dan inisiatif kesehatan yang inovatif;
 2. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan;
 3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi;
 4. Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib;
 5. Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
 6. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata.
 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.
- dengan penjelasannya masing-masing sebagai berikut:

Misi 1 : “Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan dan inisiatif kesehatan yang inovatif”, dengan penjelasan sebagai berikut :

Setiap individu dan komunitas secara keseluruhan mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan, keterampilan yang spesifik dan bakat yang dimiliki melalui pendidikan baik formal maupun non formal untuk memperluas wawasan dan membuka peluang bagi pengembangan lebih lanjut dan juga dengan pelatihan yang praktis dan terfokus untuk peningkatan kualitas hidup. Inisiatif kesehatan yang inovatif merujuk pada berbagai inovasi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan individu dan komunitas. Hal ini berarti pengembangan potensi bergantung pada aspek pendidikan, pelatihan dan juga pada inisiatif yang juga terfokus pada perbaikan kualitas hidup melalui inovasi dalam kesehatan.

Misi 2 : “Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip – prinsip keadilan dan kesetaraan” dengan penjelasan sebagai berikut :

Provinsi Papua Tengah memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang sangat berpotensi dan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan sehingga dalam pengelolaannya harus dikelola dengan cara distribusi yang adil diseluruh wilayah dan masyarakat harus mendapatkan akses yang setara terhadap manfaat dari sumber daya alam tersebut. Dalam pengembangan potensi sumber daya manusia merujuk pada kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang mencakup aspek pendidikan, keterampilan dan kesehatan. Dengan demikian pengelolaan baik sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Misi 3 : “Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi” dengan penjelasan sebagai berikut :

Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi dengan implementasi sistem administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi membantu memudahkan pemerintahan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih transparan dan lebih cepat diakses oleh publik dan masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi mengakses informasi serta mengawasi jalannya pemerintahan yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Misi 4 : “Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib” dengan penjelasan sebagai berikut :

Lingkungan yang aman berarti terciptanya situasi di mana individu atau masyarakat merasa terlindungi dari ancaman atau bahaya baik fisik maupun psikologis. Lingkungan yang tenteram artinya terciptanya suasana damai dan harmonis bagi setiap individu maupun kelompok merasa nyaman untuk hidup tanpa adanya ketegangan yang merusak. Lingkungan yang damai adalah kondisi di mana

ada keseimbangan sosial dan tidak ada kekerasan atau konflik yang mengganggu tatanan masyarakat. Lingkungan yang tertib artinya kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan adab yang menjaga agar kehidupan sosial berjalan lancar dan terorganisir.

Misi 5 : “Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan” dengan penjelasan sebagai berikut :

Upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya serta keberlanjutan sumber daya alam. Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal merupakan identitas dan jati diri, penyambung generasi, peningkatan rasa kebanggaan dan harmonisasi kehidupan sosial. Pelestarian adat, budaya dan kearifan lokal memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab yaitu pengelolaan sumber daya alam tradisional.

Misi 6 : “Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata” dengan penjelasan sebagai berikut :

Aksesibilitas infrastruktur merupakan aspek yang sangat penting dalam konektivitas suatu wilayah melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata. Pembangunan jaringan transportasi yang lebih baik adalah aspek : (a). perbaikan kualitas infrastruktur jalan, (b). transportasi umum yang efisien, (c) pengembangan infrastruktur transportasi antar daerah dan (d) infrastruktur transportasi ramah lingkungan. Sedangkan komunikasi yang lebih baik melalui aspek : (a). Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, (b). Penyediaan layanan telekomunikasi yang merata, (c). Keamanan jaringan komunikasi.

Misi 7 : “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir” dengan penjelasan sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kuantitas berarti menambah jumlah dan cakupan Infrastruktur yang tersedia sedangkan meningkatkan kualitas berarti memastikan infrastruktur tersebut dapat berfungsi dengan baik, tahan lama dan memenuhi standar yang dibutuhkan. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang memperhatikan dampak ekologis dan berusaha mengurangi kerusakan terhadap alam dengan cara pemanfaatan teknologi hijau, pengurangan dampak polusi, dan desain yang berkelanjutan. Inovasi lokal merujuk pada solusi yang diciptakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal, budaya serta kebutuhan spesifik wilayah. Pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah terpencil. Fokus utamanya adalah untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi masyarakat di daerah-daerah ini untuk berkembang dan menikmati manfaat dari kemajuan teknologi serta peningkatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan ke tujuh misi di atas, maka tetapkan indikator makro pembangunan yang perlu dicapai. Indikator makro ini merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial, yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan dan kualitas pembangunan manusia. Masing-masing indikator makro ini telah ditargetkan pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029.

No.	Indikator Makro Pembangunan	Awal Perencanaan	Target Kinerja						Akhir Perencanaan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	5,2	6,05	6,9	7,75	8,6	9,45	9,45
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	27,60	26,50 - 27,00	26,50 - 27,00	26,50 - 27,00	26,50 - 27,00	20,50 - 21,50	20,50 - 22,15	20,50- 22,15
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,75	2,65 - 3,12	2,65 - 3,12	2,65 - 3,12	2,65 - 3,12	2,00 - 2,40	2,00 - 2,40	2,00 - 2,40
4.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah per kapita)	119,5	128,7	141,7	154	166,7	179,4	192	192
5.	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,42	0,42	0,427	0,435	0,442	0,45	0,457	0,457
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,383	0,380 - 0,383	0,380 - 0,383	0,380 - 0,383	0,380 - 0,383	0,374 - 0,380	0,374 - 0,380	0,374- 0,380
7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,28	59,28	61,22	63,15	64,96	66,85	68,74	68,74
8.	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	82,56	82,56	82,72	82,88	83,04	83,20	83,36	83,36
9.	Kontribusi PDRB PROVINSI (%)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Sumber Data : RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045, Data diolah **

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran dalam penyusunan RPJMD merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja dan prioritas pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Kepala Daerah Terpilih Provinsi Papua Tengah dalam jangka menengah tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran serta indikator pembangunan daerah yang akan dicapai selama tahun 2025-2029 pada Visi dan masing-masing misi yang disajikan pada Tabel berikut:

			yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
			- Literasi Membaca	Persen (%)	21,24-23,74	21,24-23,74	21,24-23,74	21,24-23,74	26,23-28,73	26,23-28,73	
			- Numerasi	Persen (%)	15,68-18,18	15,68-18,18	15,68-18,18	15,68-18,18	19,68-22,18	19,68-22,18	
			c. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	6,25	6,72	7,2	7,67	8,15	8,62	
			d. Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,71	9,76	9,81	9,86	9,92	9,97	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen (%)	9,34	9,49	9,64	9,79	9,95	10,1	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persen (%)	77,21	77,99	78,78	79,57	80,36	81,14	
	Mewujudkan inisiatif kesehatan yang inovatif		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	4,0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan

		Papua Tengah Sehat	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tahun	69,2	69,2	69,3	69,4	69,5	69,7	Keluarga Berencana
			Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jiwa	449	410	371	332	292	254	
			b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan Sangat Pendek) Pada balita (%)	Persentase	33,1	30,67	28,25	25,82	23,4	20,9	
			Penanganan Tuberkolosis : a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Persen (%)	85	85	85	85	85	85	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	Persen (%)	85	85	85	85	85	85	
			c. Eliminasi Malaria Per Kabupaten	Persen (%)	63	65	67	69	71	73	
			d. Jumlah Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk	Jiwa	3671	3671	3200	3170	2960	2650	

			di daerah terinfeksi								
			Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	Persen (%)	98,6	99	99	99	99	99	
Mengembangkan Potensi Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan	Meningkatkan Potensi Sumber daya alam dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Keadilan dan Kesetaraan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	7,7	7,9	8,1	8,3	8,6	8,8	Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
			Pendapatan Per kapita (juta Rupiah)	(juta Rupiah)	128,7	141,7	154	166,7	179,4	192	
		Perlindungan sosial yang adaptif ketahanan energi	Tingkat Kemiskinan (%)	Persentase	26,50 - 27,00	26,50 - 27,00	26,50 - 27,00	26,50 - 27,00	20,50- 21,50	20,50- 22,15	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persentase	21,16	26,18	31,21	36,24	41,27	46,29	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persentase	N/A	15	17	20	24	28	
			a. Jumlah Penyandang disabilitas yang	orang	N/A	200	300	400	500	600	

			mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan								
			b. Jumlah Unit Layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat kab/kota/provinsi	unit	1	3	5	7	9	11	
		Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Rasio	0,83	2,17	3,52	4,86	6,21	7,55	- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pariwisata
			b. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen (%)	3,8	4,32	4,85	5,37	5,9	6,42	
			Pengembangan Pariwisata : a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Rasio	0,22	0,222	0,225	0,227	0,23	0,232	

			b. Presentasi Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	Rasio	4,45	4,67	4,9	5,12	5,35	5,75	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Persen (%)	N/A	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD : c. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Persen (%)	0,36	0,367	0,375	0,382	0,39	0,397	
			d. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	Persen (%)	1,63*	1,63*	1,75	1,80	1,83	1,85	
			e. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen (%)	0,41	0,46	0,52	0,57	0,63	0,68	
			f. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persen (%)	1,17	1,172	1,175	1,177	1,18	1,182	
			g. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	Persen (%)	1,95	2,03	2,11	2,19	2,28	2,36	BPPKAD

			Penciptaan Lapangan Kerja yang baik : a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen (%)	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,00-2,40	2,00-2,40	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Persen (%)	20	21,5	23	24,5	26	27,5	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen (%)	53,45 – 65,00	53,45 – 65,00	53,45 – 65,00	62,70-67,31	62,70-67,31	62,70-67,31	
			Tingkat Penguasaan Iptek (%)	Persen (%)	15	20	25	30	35	40	Dinas Informatika, Statistik dan Persandian
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih, Transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi	Mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi.		Indeks Reformasi Birokrasi	Persen (%)	50	55	60	65	70	75	
		Terwujudnya Regulasi dan Tata kelola	Indeks Reformasi Hukum	Persen (%)	70	70,3	70,7	71,1	71,5	71,8	Setda Sekwan MRP

		yang Berintegrasi dan Adaptif di Papua Tengah									
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen (%)	2,00	2,12	2,24	2,36	2,48	2,6	Semua OPD
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	
			Indeks Integritas Nasional	Indeks	62,98	63,65	64,32	64,99	65,66	66,33	
		Terwujudnya Transformasi Digital Papua Tengah	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indeks	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,2	Dinas Informatika, Statistik dan Persandian
			Rasio Elektrifikasi RT (%)	Rasio	47,36	47,36	47,80	48	48,5	49	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
		Terwujudnya Ketangguhan Kepemimpinan daerah Papua Tengah	Indeks Kepemimpinan Daerah	Indeks	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sekretariat Daerah
			Persentase Penurunan Konflik Sara	Persen (%)	N/A	40	43	45	48	50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Menciptakan lingkungan yang Aman, Tenteram, damai dan tertib	Memantapkan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib		Penurunan Angka Kriminalitas	Persen (%)	10,68	10	9,58	9	8,55	8	

		Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansi pada Provinsi Papua Tengah	Usulan Proksi : a. Persentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen (%)	70	71,4	72,8	74,2	75,7	77,1	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Satuan Polisi Pamong Praja
			b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen (%)	60	62,5	65	67,5	70	72,5	
			Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya (%)	Persen (%)	74	74,7	75,5	76,2	77	77,7	
			Indeks Demokrasi Daerah	Indeks	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,85	60,00-63,85	
Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung	Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap		Indeks Kohesi Sosial	Skor	1	2,5	3,5	4,5	5	6	
		Terwujudnya Beragama maslahat dan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	49,54-49,61	49,54-49,61	49,54-49,61	49,54-49,61	51,4 – 51,59	51,4 – 51,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

jawab dan berkelanjutan		berkebudayaan maju									
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	81,18-81,22	81,18-81,22	81,18-81,22	81,18-81,22	82,66-82,9	82,66-82,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	50,65	52,36	54,07	55,78	57,5	59,21	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	81,94-82,01	82,05-82,17	82,17-82,32	82,29-82,46	82,42-82,61	82,56-82,78	
	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan		Persentase Luas Hutan yang dikelola Masyarakat	Persen(%)	6,20	6,50	7	7,50	8	8,50	
		Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di Papua Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Indeks	20,2	19,8	19,4	19	18,7	18,3	- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - BPPKAD -Dinas Penanaman Modal & PTSP
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen (%)	23,9	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen (%)	48,82-49,14	48,82-49,14	48,82-49,14	50,24-50,88	50,24-50,88	50,24-50,88	

		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen (%)	0,39	0,45	0,51	0,57	0,64	0,70	
			Tingkat Inflasi (%)	Persen (%)	3,6-5,3	3,6-5,3	3,6-5,3	3,6-5,3	2,2-5,2	2,2-5,2	
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan: a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	Persen (%)	16,74	17,59	18,45	19,30	20,16	21,01	
			b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Persen (%)	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	
			c. Nilai Transaksi saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Nilai	856.520,71	984.209	1.111.897	1.239.586	1.367.274,09	1.494.962	
			d. Total Kredit/PDRB (%)	Persen (%)	13,02	13,18	13,35	13,51	13,68	13,84	
			e. Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Persen (%)	2,71	2,76	2,81	2,85	2,9	2,93	
			Inklusi Keuangan (%)	Persen (%)	86,79	87,29	87,79	88,29	88,8	89,30	
Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama	Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Indeks	1,01	1,89	2,3	4	4,25	4,68	

melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata	pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata										
		Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di Papua Tengah	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan: a. Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Provinsi Terhadap Nasional	Persen	0,73	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	-Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	22,96	23,47	23,98	24,49	25	25,51	-Dinas PUPR - Dinas Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			c. Persentase Desa mandiri	Persen	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	
			d. Persentase Mantap Jalan	Persen	35	35	36	38	40	45	
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau	Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau		Persentase Penurunan Jumlah Desa Berstatus Tertinggal	Persen (%)	N/A	0,43	0,87	1,04	1,30	1,48	

dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir	dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.										
		Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau : a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	61,06	62,23	63,4	64,57	65,74	66,91	-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan ESDM -Dinas Pangan, pertanian, Kelautan dan Perikanan -Dinas PUPR
			b. Indeks Ekonomi Biru	Indeks	22,64	23,52	24,40	25,29	26,17	27,06	
			c. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Persen (%)	26,6	26,6	26,9	27,3	27,9	28	
		Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,389	0,389	0,394	0,400	0,425	0,425	
			Kualitas Lingkungan Hidup: h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	82,56	82,56	82,65	82,73	83,20	83,20	
			B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persen (%)	4,0	5,89	7,86	9,67	10	11	

			C. Pengelolaan Sampah - Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen (%)	15,00	18,00	20,25	25,64	30	35	
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen (%)	36	39	40	45	52	55	
		Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan: a. Ketahanan Energi								
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	(Kwh)	315	334	353	370	388	407	
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	Persen (%)	90	90	87	86	84	82	
			b. Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	34,03	33	31,2	29,4	29,23	29	

			c. Ketahanan Air								
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	Persen (%)	0	1,5	1,5	2	2	3	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen (%)	20	20	25	30	30	35	
		Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	191,94	191,94-185,88	191,94-185,88	191,94-185,88	185,88-179,95	185,88-179,95	-Dinas Kerja, Transmigrasi dan ESDM -Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan - Dinas PKP2B & Satpol PP
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)								
			- Kumulatif	Persen (%)	10,92	11,5	12,87	14,35	15,35	15,45	
			- Tahunan	Persen (%)	30,07	30,4	30,53	30,78	30,93	40	

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.4.1 Strategi Pembangunan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah- langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya- upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Tengah disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
Visi : Mewujudkan Papua Tengah Emas Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan							
M1 : Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan, dan inisiatif kesehatan yang inovatif, sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk menciptakan Masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing							
T1 : Mewujudkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan yang berpotensi dan kompeten							
M1	T1	S1	Papua Tengah Cerdas	S1	Meningkatkan Capaian Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Nasional : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis <i>Teaching at The Right Level (TaRL)</i> dan <i>Merdeka Belajar</i>;• Implementasi model pembelajaran berbasis teknologi dan digitalisasi sekolah;• Penyediaan dan distribusi buku bacaan berkualitas serta bahan ajar berbasis budaya lokal;• Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, termasuk akses listrik dan internet di daerah terpencil;• Mendorong kolaborasi dengan mitra pendidikan seperti universitas, NGO, dan lembaga internasional.		
				S2	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas : <ul style="list-style-type: none">• Program wajib belajar 12 tahun dengan insentif bagi siswa dari keluarga kurang mampu;• Beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi, khususnya dari daerah terpencil;• Program pendidikan kejar paket untuk masyarakat putus sekolah;• Penyediaan sekolah berbasis asrama di daerah sulit akses (Pembangunan Pendidikan Berpola Asrama).		
				S3	Meningkatkan Harapan Lama Sekolah : <ul style="list-style-type: none">• Perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi di seluruh kabupaten/kota;• Penguatan program pendidikan vokasi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja;• Meningkatkan peran sekolah dan komunitas dalam mencegah putus sekolah;• Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.		
				S4	Meningkatkan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi : <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah;• Mendorong pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Papua Tengah) akan menjadi Pusat Pengembangan SDM berkualitas di Papua Tengah;• Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri;• Peningkatan kualitas dosen dan tenaga pengajar melalui program <i>capacity building</i>.		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
T2 : Mewujudkan inisiatif kesehatan yang inovatif							
M1	T2	S2	Papua Tengah Sehat	S5	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan, termasuk Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional, peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan bidan di daerah terpencil;• Penguatan program ANC (<i>Antenatal Care</i>) dan layanan persalinan aman dengan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan;• Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi ibu hamil di daerah sulit akses;• Pemberian suplemen gizi dan tablet tambah darah bagi ibu hamil serta imunisasi lengkap bagi bayi;• Program edukasi bagi ibu hamil dan keluarga terkait gizi, ASI eksklusif, serta pencegahan <i>stunting</i> melalui intervensi spesifik dan sensitif.		
				S6	Penanganan Tuberkulosis (TBC) : <ul style="list-style-type: none">• Memperluas layanan deteksi dini TBC di puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan;• Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis dan pengobatan TBC;• Mendorong kepatuhan pengobatan pasien TBC dengan sistem pemantauan berbasis teknologi (<i>digital adherence monitoring</i>);• Program pendampingan bagi pasien TBC untuk mencegah putus obat dan resistensi obat (TBC RO);• Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan TBC.		
				S7	Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten : <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan kelambu berinsektisida dan obat anti-malaria di daerah endemis;• Penguatan surveilans malaria dengan skrining rutin di daerah rawan;• Peningkatan cakupan dan kualitas pengobatan malaria sesuai standar WHO;• Program pemberantasan nyamuk melalui penyemprotan rumah dan pengelolaan lingkungan;• Edukasi masyarakat mengenai pencegahan malaria, terutama di daerah pedalaman.		
				S8	Penanggulangan HIV/AIDS : <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akses terhadap layanan tes dan konseling HIV (VCT) secara gratis;• Penyediaan obat ARV (Antiretroviral) secara berkelanjutan bagi ODHA;• Edukasi tentang pencegahan HIV/AIDS melalui kampanye yang melibatkan pemuda, kelompok masyarakat, dan gereja;		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
					<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dengan HIV untuk mencegah penularan ke bayi.			
				S9	Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi (%) : <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan;• Mempermudah akses administrasi bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;• Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan premi JKN bagi masyarakat tidak mampu;• Penyediaan layanan kesehatan berbasis digital untuk mempercepat klaim dan layanan JKN.			
M2 : Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dengan memperkuat kapasitas produksi lokal, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memfasilitasi akses pasar yang lebih luas yang bertujuan untuk menciptakan swasembada pangan, lapangan kerja, menghapus kemiskinan ekstrim , mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah demi terwujudnya kemandirian ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adil dan merata								
T3 : Meningkatkan potensi sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan								
M2	T3	S3	Perlindungan Sosial yang Adaptif Ketahanan energi	S10	Menurunkan Tingkat Kemiskinan (%) : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, seperti pengembangan pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis komoditas unggulan Papua Tengah;• Bantuan sosial yang tepat sasaran, termasuk program perlindungan sosial berbasis keluarga seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai);• Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan melalui program pelatihan kerja dan sekolah vokasi bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah;• Meningkatkan akses ke layanan keuangan dan permodalan, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) dan koperasi berbasis komunitas;• Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses air bersih, listrik, dan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin.			
				S11	Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) : <ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi dan edukasi kepada pekerja formal dan informal tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan);• Memperluas cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan mendorong perusahaan dan pekerja sektor informal untuk mendaftar;			

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
					<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan subsidi bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan;• Peningkatan kerja sama dengan perusahaan, koperasi, dan BUMDes untuk menjamin pekerja sektor informal mendapatkan perlindungan sosial;• Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan agar perusahaan mematuhi regulasi terkait jaminan sosial tenaga kerja.			
				S12	Meningkatkan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasi, keterampilan digital, dan wirausaha;• Mendorong kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen di sektor formal, termasuk kuota khusus di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD;• Penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang inklusif, seperti aksesibilitas fisik di tempat kerja dan kebijakan kerja fleksibel bagi disabilitas;• Memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan sektor swasta untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi penyandang disabilitas;• Meningkatkan insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja disabilitas, seperti potongan pajak dan subsidi pelatihan kerja.			
T4 : Meningkatkan potensi sumber daya manusia dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan								
M2	T4	S4	Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah	S13	Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB : <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan Papua Tengah (seperti pengolahan kayu, perikanan, pertanian, dan hasil hutan non-kayu);• Mendorong investasi dalam industri hilir agar produk lokal memiliki nilai tambah;• Penyediaan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan;• Pelatihan tenaga kerja industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing;• Peningkatan infrastruktur pendukung industri seperti listrik, jalan, dan konektivitas logistik.			
				S14	Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan <i>branding</i> dan promosi destinasi wisata unggulan Papua Tengah, termasuk ekowisata dan wisata budaya;• Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, bandara, dan fasilitas akomodasi;• Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku usaha hotel dan restoran;			

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
					<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong investasi di sektor perhotelan, restoran, dan atraksi wisata berbasis komunitas; • Digitalisasi layanan wisata, termasuk pemasaran Online dan sistem reservasi berbasis teknologi. 		
				S15	Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis seni budaya, kuliner, dan kriya khas Papua Tengah; • Mendorong digitalisasi ekonomi kreatif melalui <i>e-commerce</i>, pemasaran digital, dan teknologi finansial; • Pemberdayaan komunitas kreatif lokal melalui pelatihan dan pendampingan usaha; • Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif melalui kredit usaha kreatif dan hibah modal. 		
				S16	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD : <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan program inkubasi bisnis dan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi; • Digitalisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional; • Peningkatan peran BUMD dalam mendukung sektor strategis daerah, seperti distribusi pangan dan energi; • Optimalisasi kemitraan antara UMKM dan industri besar dalam rantai pasok lokal; • Penyederhanaan perizinan bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha baru. 		
				S17	Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitas : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri; • Mendorong industri padat karya dan sektor kreatif untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal; • Penguatan sistem informasi pasar kerja agar tenaga kerja dapat terhubung dengan peluang kerja yang sesuai; • Penyediaan insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. 		
				S18	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan : <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi; • Mendorong kebijakan ramah keluarga di tempat kerja, seperti fleksibilitas jam kerja dan cuti melahirkan yang lebih baik; • Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak di tempat kerja; • Program kewirausahaan perempuan berbasis komunitas dan UMKM. 		
				S19	Meningkatkan Tingkat Penguasaan Iptek :		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
					<ul style="list-style-type: none">• Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri;• Penyediaan pusat riset dan teknologi untuk mendukung industri lokal;• Mendorong adopsi teknologi digital di sektor UMKM, pertanian, dan industri;• Peningkatan investasi dalam pendidikan dan riset berbasis STEM (<i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i>).			
M3 : Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan semangat kerja sama dan komitmen terhadap pelayanan dan pembangunan melalui ekosistem organisasi kerja yang adaptif dan agile yang mendukung kultur budaya kompetitif demi terwujudnya transformasi tata kelola yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat								
T5 : Mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistim administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi.								
M3	T5	S5	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif di papua Tengah	S20	Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan kepastian hukum yang mendukung investasi dan pelayanan publik;• Penguatan kapasitas aparat hukum dan peradilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di tingkat daerah;• Peningkatan transparansi dan aksesibilitas regulasi daerah dengan digitalisasi dokumen hukum dan kebijakan;• Optimalisasi peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui konsultasi publik dan partisipasi masyarakat sipil;• Sinergi antara regulasi nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan keselarasan hukum.			
				S21	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : <ul style="list-style-type: none">• Digitalisasi administrasi pemerintahan dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh;• Pengembangan layanan publik berbasis digital, seperti <i>e-government</i>, <i>e-budgeting</i>, dan <i>e-procurement</i> untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi;• Peningkatan keamanan data dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital pemerintahan;			

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
					<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap sistem digital; • Integrasi layanan digital antar instansi pemerintah guna menciptakan sistem pelayanan terpadu yang lebih efisien. 		
				S22	<p>Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik melalui pelatihan berorientasi pada pelayanan prima; • Penerapan standar pelayanan publik yang jelas, cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip <i>good governance</i>; • Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif, seperti layanan <i>hotline</i>, aplikasi pengaduan digital, dan kanal media sosial resmi; • Mendorong inovasi dalam pelayanan publik, seperti layanan keliling, sistem layanan berbasis aplikasi, dan <i>one-stop service center</i>; • Penyediaan fasilitas layanan publik yang ramah disabilitas dan inklusif, untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang setara. 		
				S23	<p>Meningkatkan Indeks Integritas Nasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran; • Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti <i>e-audit</i> dan <i>e-monitoring</i> terhadap anggaran dan proyek pemerintah; • Penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen ASN untuk memastikan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas; • Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, melalui sistem pelaporan yang mudah diakses; • Peningkatan edukasi anti-korupsi bagi aparatur negara dan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan etika birokrasi. 		
M3	T5	S6	Terwujudnya Transformasi Digital Papua Tengah	S24	<p>Meningkatkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur digital yang merata, termasuk penyediaan jaringan internet hingga ke daerah terpencil; • Penguatan literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah guna meningkatkan adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari; 		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
M3	T5	S7	Terwujudnya Ketangguhan Kepemimpinan Daerah Papua Tengah		<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong digitalisasi sektor publik dan ekonomi, seperti layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), e-commerce untuk UMKM, dan digitalisasi layanan kesehatan serta pendidikan; • Peningkatan kerja sama dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet untuk memperluas cakupan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan; • Pengembangan pusat inovasi digital dan <i>startup</i> teknologi lokal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital. 		
				S25	<p>Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (RT) (%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro, dan biomassa untuk menjangkau daerah terpencil; • Peningkatan investasi dalam jaringan distribusi listrik guna memastikan stabilitas pasokan listrik bagi rumah tangga dan industri; • Mendorong pemanfaatan teknologi <i>smart grid</i> dan digitalisasi manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik; • Program subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu agar seluruh rumah tangga memiliki akses listrik yang terjangkau; • Pengembangan desa mandiri energi dengan pemanfaatan teknologi <i>mikrogrid</i> untuk daerah dengan akses listrik terbatas. 		
				S26	<p>Meningkatkan Indeks Kepemimpinan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah serta ASN melalui pelatihan kepemimpinan yang berbasis inovasi, tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada masyarakat; • Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah; • Peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah; • Pemberdayaan kepemimpinan berbasis data dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan; • Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan daerah agar kebijakan lebih partisipatif dan inklusif. 		
				S27	<p>Menurunkan Persentase Konflik SARA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dialog antar agama dan antarsuku melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda guna membangun kesepahaman dan solidaritas sosial; 		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
					<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mediasi dan resolusi konflik dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan berbasis kearifan lokal;• Pendidikan multi kultural dan toleransi sejak dini di sekolah dan komunitas untuk menanamkan nilai keberagaman dan persatuan;• Penerapan sistem deteksi dini konflik sosial dengan membentuk tim khusus yang memantau potensi konflik dan melakukan intervensi sebelum terjadi eskalasi;• Optimalisasi peran media dalam menyebarkan narasi damai dan mengurangi provokasi berbasis SARA melalui regulasi dan kampanye anti-hoaks.			
M4 : Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai, dan tertib, di mana setiap warga masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan optimal dengan semangat gotong royong dan kerja sama antar unsur masyarakat untuk mewujudkan stabilitas daerah yang berkeadilan melalui pendekatan adat, budaya, sosial dan ekonomi								
T6 : Memantapkan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib								
M4	T6	S8	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamananan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansi pada Provinsi Papua Tengah	S28	Meningkatkan Penegakan Hukum Peraturan Daerah : <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas aparaturnya penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda);• Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami dan mematuhi Perda yang berlaku;• Optimalisasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda dengan membentuk sistem pemantauan dan mekanisme pelaporan masyarakat;• Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat untuk memastikan Perda diterapkan secara efektif dan berkeadilan.			
				S29	Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM : <ul style="list-style-type: none">• Memastikan kebijakan daerah selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam perlindungan hak-hak kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat);• Mendorong edukasi HAM kepada aparaturnya pemerintahan dan masyarakat melalui sosialisasi dan program pelatihan;• Memperkuat peran Komisi Nasional HAM atau lembaga HAM daerah dalam memantau, mengevaluasi, dan menangani pelanggaran HAM;• Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan, termasuk penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.			

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
				S30	Meningkatkan Proporsi Penduduk yang Merasa Aman di Tempat Tinggalnya : <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui optimalisasi peran kepolisian, TNI, dan satuan keamanan masyarakat (Satkamling);• Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah;• Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan keamanan daerah, seperti pemasangan CCTV di area publik dan penggunaan sistem laporan kejadian berbasis digital;• Meningkatkan program patroli keamanan di daerah rawan kejahatan dan konflik;• Membangun mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.			
				S31	Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua Tengah : <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kebijakan daerah melalui keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan;• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu serta pemilihan kepala daerah guna memastikan demokrasi yang jujur dan adil;• Menguatkan peran media dan kebebasan pers untuk mendukung kebebasan berekspresi serta mengawasi jalannya pemerintahan;• Meningkatkan kapasitas partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan peran demokrasi yang sehat;• Membangun budaya politik yang inklusif dan bebas dari praktik politik uang, diskriminasi, serta tekanan politik.			
M5 : Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi melalui praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah, sekarang dan di masa yang akan datang								
T7 : Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan								
M5	T7	S9	Terwujudnya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	S32	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan mencerminkan kemajuan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di suatu daerah : <ul style="list-style-type: none">• Pelestarian dan revitalisasi budaya lokal Papua Tengah melalui dukungan terhadap seni, bahasa, tradisi, dan kearifan lokal;			

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan budaya dengan memasukkan muatan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah; • Penguatan lembaga budaya, sanggar seni, dan komunitas kreatif guna memperluas ruang ekspresi dan inovasi budaya; • Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri kreatif, pariwisata budaya, dan produk berbasis kearifan lokal; • Peningkatan infrastruktur kebudayaan seperti museum, galeri seni, rumah adat, dan pusat kebudayaan guna mendukung kegiatan budaya; • Mendorong digitalisasi dan dokumentasi budaya untuk menjaga warisan budaya agar dapat diakses oleh generasi mendatang. 		
				S33	<p>Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur harmoni antarumat beragama, toleransi, dan kerja sama dalam kehidupan sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat dialog antar agama melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh agama, pemuda lintas agama, dan pemerintah daerah; • Mengembangkan program pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah dan masyarakat guna menanamkan nilai-nilai persaudaraan dan harmoni sosial; • Mendorong peran aktif tokoh agama dalam membangun narasi damai dan menangkal penyebaran ujaran kebencian serta ekstremisme; • Optimalisasi peran media dalam menyebarkan pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks yang berpotensi memicu konflik keagamaan; • Meningkatkan kerja sama antar umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan untuk memperkuat solidaritas sosial; • Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam mediasi konflik keagamaan. 		
M5	T7	S10	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	S34	<p>Meningkatkan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPK). Indeks ini mencerminkan kesejahteraan keluarga dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk layanan gizi, imunisasi, dan kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak; • Peningkatan literasi dan pendidikan keluarga dalam pola asuh anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kesejahteraan psikososial keluarga; • Penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peningkatan keterampilan kerja, akses permodalan bagi usaha mikro, dan pelatihan kewirausahaan berbasis keluarga; 		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
					<ul style="list-style-type: none">• Mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna menciptakan keseimbangan peran dalam keluarga;• Meningkatkan akses terhadap perumahan layak huni dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga;• Memperkuat peran lembaga sosial dan komunitas dalam mendampingi keluarga rentan, seperti keluarga miskin, keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, dan keluarga yang terdampak konflik.			
				S35	<p>Mengurangi Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk beasiswa dan program afirmatif untuk kelompok rentan;• Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama di sektor formal, serta memberikan pelatihan keterampilan untuk memperkuat kapasitas perempuan;• Meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di sektor pemerintahan, politik, dan ekonomi;• Memastikan akses layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan terhadap perempuan, termasuk pencegahan pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender;• Mendorong kesetaraan dalam kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah yang adil, cuti melahirkan, serta fasilitas penitipan anak di tempat kerja;• Membangun mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi atau kekerasan.			
T8 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan								
M5	T8	S11	Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di papua Tengah	S36	Menjaga Stabilitas Harga Antarwilayah (Koefisien Variasi Harga). Variasi harga antarwilayah menunjukkan tingkat kesenjangan harga di berbagai daerah di Papua Tengah. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi akibat infrastruktur yang belum merata, biaya distribusi yang tinggi, atau keterbatasan pasokan barang dan jasa :			
					<ul style="list-style-type: none">• Penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik, termasuk peningkatan akses jalan, pelabuhan, dan bandara guna mempercepat distribusi barang antarwilayah;• Pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien, seperti pemanfaatan rantai pasok berbasis teknologi dan gudang logistik terpadu;			

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
M5	T8	S12	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan peran BUMD dan koperasi dalam distribusi bahan pokok dan kebutuhan strategis untuk mengurangi fluktuasi harga; • Mendorong peningkatan produksi dan stok pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada barang dari luar daerah; • Memperkuat kerja sama antarwilayah dalam perdagangan dan distribusi barang untuk memastikan pasokan merata di seluruh Papua Tengah. 		
				S37	<p>Meningkatkan Investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB). PMTB menggambarkan tingkat investasi yang masuk ke dalam pembangunan infrastruktur, peralatan, dan modal usaha di Papua Tengah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum bagi investor; • Peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan koperasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; • Mendorong kemitraan antara swasta dan pemerintah (<i>Public-Private Partnership/PPP</i>) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis; • Memperkuat insentif bagi investasi hijau dan berkelanjutan, terutama di sektor energi terbarukan dan industri ramah lingkungan. 		
				S38	<p>Memperkuat Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB). Ekspor barang dan jasa menjadi indikator integrasi ekonomi Papua Tengah dengan pasar nasional dan global :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, hasil hutan, kopi, kakao, dan produk pertambangan, untuk meningkatkan daya saing ekspor; • Meningkatkan kualitas dan standar produk ekspor, termasuk sertifikasi produk yang sesuai dengan standar internasional; • Mendorong hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sebelum produk diekspor; • Memperluas akses pasar ekspor dengan kerja sama perdagangan antar provinsi dan internasional; • Memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk mempromosikan produk Papua Tengah ke pasar global. 		
M5	T8	S12	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah	S39	<p>Meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Pendapatan daerah yang kuat akan mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program ekonomi yang berkelanjutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
					<ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya dengan memperluas basis pajak dari sektor-sektor potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital; • Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang taat pajak; • Menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi baru sambil tetap menjaga keseimbangan pendapatan daerah. 		
			S40	Menjaga Tingkat Inflasi (%) Tetap Stabil. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah :	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mengelola kebijakan harga dan ketersediaan barang pokok; • Penguatan ketahanan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga harga tetap stabil; • Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, termasuk pembangunan pasar induk dan gudang logistik untuk mengurangi biaya distribusi; • Intervensi harga secara selektif melalui kebijakan subsidi atau operasi pasar untuk komoditas strategis. 		
			S41	Memperkuat Pendalaman Sektor Keuangan dan Intermediasi. Pendalaman sektor keuangan menunjukkan seberapa besar sektor keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah :	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah simpanan masyarakat dalam sistem keuangan formal dengan mendorong inklusi keuangan; • Mendorong investasi jangka panjang, termasuk penguatan dana pensiun dan instrumen investasi lainnya; • Meningkatkan akses kredit produktif bagi UMKM dan industri lokal melalui skema pembiayaan berbunga rendah; • Mendorong pasar modal daerah agar lebih aktif dengan memperkenalkan berbagai instrumen investasi seperti obligasi daerah. 		
			S42	Meningkatkan Inklusi Keuangan (%). Inklusi keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan :	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses layanan keuangan digital melalui pengembangan <i>fintech</i> dan bank digital di daerah terpencil; 		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
					<ul style="list-style-type: none">Memperkuat peran koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM;Mendorong program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda;Memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk masyarakat tidak terlayani (<i>unbanked population</i>) guna meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal.			
M6 : Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata, sehingga tercipta konektivitas antar masyarakat dan antar wilayah dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat integrasi antar wilayah, dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan Papua Tengah								
T9 : Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata								
M6	T9	S13	Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di papua Tengah	S43	Meningkatkan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Provinsi terhadap Nasional. Papua Tengah harus mendorong sektor unggulan di perkotaan dan pedesaan agar berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional : <ul style="list-style-type: none">Pengembangan sektor industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan, dengan pendekatan hilirisasi;Peningkatan daya saing sektor jasa dan pariwisata di kota dan desa untuk menarik lebih banyak investasi;Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri, pusat logistik, dan pasar modern di kota dan desa;Peningkatan konektivitas antara kota dan desa melalui jalur transportasi yang lebih efisien guna memperlancar distribusi hasil produksi.			
				S44	Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%). Hunian yang layak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong produktivitas ekonomi : <ul style="list-style-type: none">Program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah;Penguatan skema kredit perumahan terjangkau, seperti KPR subsidi bagi masyarakat kurang mampu;Peningkatan infrastruktur permukiman, termasuk penyediaan air bersih, listrik, dan sanitasi;			

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
					<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kota hijau dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang yang ramah penduduk.			
				S45	<p>Meningkatkan Persentase Desa Mandiri. Desa mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan ekowisata;• Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kemandirian desa;• Pengembangan infrastruktur desa, termasuk jalan desa, listrik, jaringan internet, dan air bersih untuk mendukung aktivitas ekonomi;• Peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.			
				S46	<p>Meningkatkan Persentase Mantap Jalan. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat mobilitas penduduk dan distribusi barang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah :</p> <ul style="list-style-type: none">• Percepatan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, kabupaten, dan desa untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik;• Penggunaan teknologi jalan yang lebih tahan lama guna mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kualitas infrastruktur;• Peningkatan anggaran pembangunan jalan dari APBD, Dana Desa, dan kerja sama dengan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP);• Integrasi perencanaan infrastruktur jalan dengan pengembangan kawasan ekonomi untuk memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.			
M7 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam Papua Tengah untuk generasi yang akan datang								
T10 : Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir								
M7	T10	S14	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	S47	Meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana praktik ekonomi di daerah telah memperhitungkan keberlanjutan lingkungan :			

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
			di Papua Tengah		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang lestari, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pertanian organik; • Penguatan kebijakan konservasi hutan dan ekosistem, dengan memanfaatkan skema karbon kredit dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan; • Meningkatkan peran UMKM hijau yang berfokus pada produk ramah lingkungan dan ekonomi sirkular (reduce, reuse, recycle); • Implementasi regulasi pembangunan rendah karbon, termasuk pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali; • Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. • Pengembangan Kawasan Pulau-pulau Kecil dan Terluar • Penguatan Sentra Produksi Komoditas tuna-Cakalang-Tongkol • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan Propesi Nelayan 		
				S48	<p>Meningkatkan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer (%)</p> <p>Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah kunci utama dalam menurunkan emisi karbon dan menciptakan ketahanan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan energi surya, hidro, dan biomassa sebagai sumber energi utama di Papua Tengah, terutama untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional; • Mendorong penggunaan biodiesel dan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif bagi sektor transportasi dan industri; • Meningkatkan investasi dalam teknologi energi terbarukan, termasuk penelitian dan pengembangan (R&D) energi bersih; • Membangun infrastruktur energi hijau, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan; • Mendorong program konversi energi di sektor rumah tangga dan industri dari energi fosil ke energi hijau. 		
M7	T10	S15	Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	S49	<p>Meningkatkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah. Keanekaragaman hayati Papua Tengah yang kaya harus dikelola dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem melalui penegakan hukum dan patroli hutan; 		

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi				
					<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan ekowisata;• Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui skema karbon kredit dan perhutanan sosial;• Kolaborasi dengan lembaga riset dan NGO dalam upaya pelestarian flora dan fauna khas Papua.			
			S50	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat pencemaran air, udara, dan tanah di suatu wilayah : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pengawasan industri dan pertambangan untuk mengurangi pencemaran air dan tanah;• Penghijauan perkotaan dan restorasi ekosistem kritis, seperti hutan mangrove dan daerah aliran sungai (DAS);• Peningkatan program pengendalian polusi udara, termasuk regulasi terhadap emisi kendaraan dan industri;• Penyediaan sistem peringatan dini bencana lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor.				
			S51	Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%). Sanitasi yang baik berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan sistem sanitasi terpadu di permukiman dan pedesaan, seperti septic tank komunal dan pengolahan limbah domestik;• Program penyediaan air bersih dan sanitasi aman di sekolah serta fasilitas umum;• Edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan dan lingkungan.				
			S52	Meningkatkan Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan. Sampah yang tidak terkelola dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga harus dikelola dengan sistem yang baik : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, termasuk daur ulang dan pemanfaatan limbah organik;• Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah, seperti <i>refuse-derived fuel</i> (RDF) dan biogas;• Kolaborasi dengan sektor swasta dalam investasi fasilitas pengolahan sampah.				
			S53	Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) : Perluasan layanan pengumpulan sampah berbasis komunitas, terutama di daerah terpencil; Penerapan sistem retribusi sampah berbasis jumlah produksi limbah untuk mendorong masyarakat mengurangi sampah;				

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
					Penyediaan fasilitas dropbox sampah di titik-titik strategis perkotaan dan pedesaan.		
M7	T10	S16	Terwujudnya berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	S54	Ketahanan Energi : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses listrik ke seluruh wilayah Papua Tengah, termasuk daerah pedalaman dan terpencil melalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan solusi energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Mikrohidro; • Diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti bioenergi, tenaga air, dan tenaga surya; • Peningkatan efisiensi energi dalam industri, rumah tangga, dan transportasi melalui penerapan teknologi hemat energi; • Mendorong investasi swasta dalam sektor energi hijau untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil; • Edukasi dan insentif penggunaan peralatan hemat energi di sektor industri dan rumah tangga. 		
				S55	Ketahanan Pangan : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dengan modernisasi alat pertanian dan pendampingan petani/peternak; • Diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan konsumsi pangan bergizi berbasis komoditas lokal seperti sagu, ubi-ubian, dan pisang; • Pengembangan rantai pasok pangan yang efisien dengan memperkuat infrastruktur logistik dan penyimpanan hasil pertanian; • Meningkatkan ketahanan pangan berbasis komunitas dengan membangun lumbung pangan desa dan meningkatkan peran koperasi pangan; • Penyediaan subsidi dan insentif bagi petani dan nelayan untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka. 		
				S56	Ketahanan Air : <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan infrastruktur air baku dan air bersih melalui pembangunan waduk, embung, dan sistem perpipaan yang efisien; • Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan konservasi daerah aliran sungai (DAS) dan reboisasi kawasan hulu; • Peningkatan layanan akses air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM); • Penerapan teknologi pengolahan air modern seperti sistem filtrasi dan desalinasi untuk daerah 		

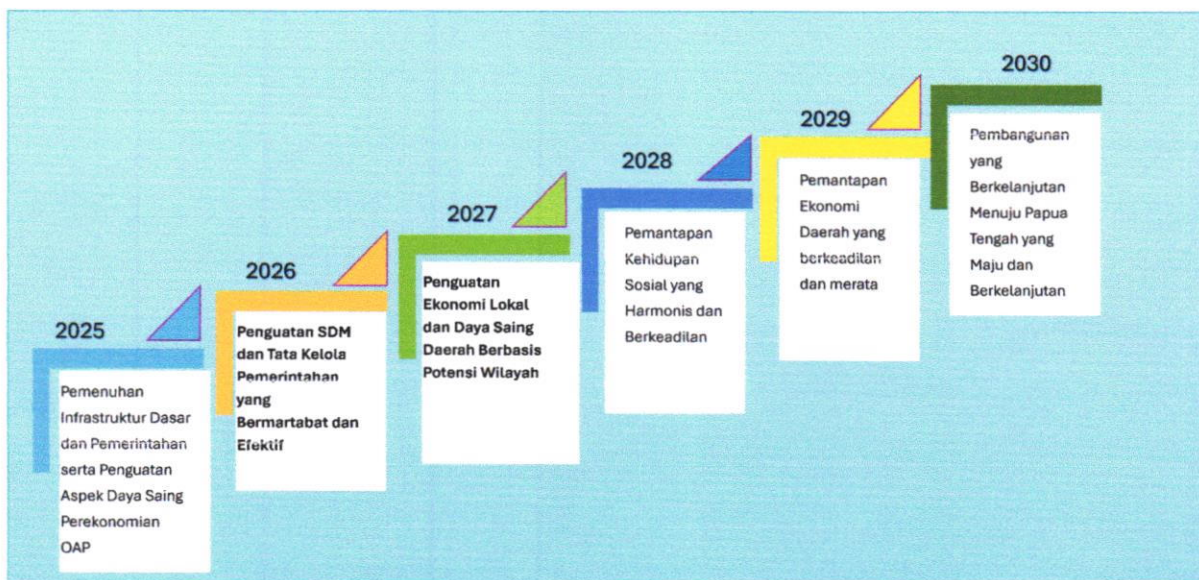
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran				Strategi			
					<ul style="list-style-type: none"> • pesisir; • Edukasi dan sosialisasi efisiensi penggunaan air di sektor rumah tangga dan industri. 		
M7	T10	S17	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	S57	<p>Mitigasi Perubahan Iklim dan Penurunan Emisi GRK :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui perlindungan kawasan hutan serta penguatan regulasi terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan alih fungsi lahan; • Pengembangan energi bersih dan rendah karbon, seperti penggunaan energi surya, bioenergi, dan tenaga air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; • Penerapan pertanian dan peternakan berkelanjutan dengan teknik agroforestri, pertanian rendah emisi, serta efisiensi dalam penggunaan pupuk dan pestisida; • Pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah plastik, peningkatan daur ulang, dan pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi terbarukan; • Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan sistem transportasi berbasis energi hijau. 		
				S58	<p>Adaptasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem peringatan dini terhadap bencana alam dengan membangun pusat informasi bencana dan memperkuat sistem pemantauan cuaca dan iklim; • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, waduk pengendali banjir, dan rumah tahan gempa di daerah rawan bencana; • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk pelatihan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan darurat berbasis komunitas; • Pengelolaan tata ruang berbasis risiko bencana, memastikan pembangunan tidak dilakukan di zona rentan bencana seperti daerah rawan banjir dan longsor; • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk dana cadangan bencana yang memadai. 		

3.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan tahapan RKPD.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Papua Tengah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD. Penetapan tema pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penjabaran tema pembangunan pada RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045, yaitu "Terwujudnya Papua Tengah Yang Adil, Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap pertama pada RPJPD Provinsi Papua Tengah, maka melalui Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan." *Penjabaran tema pembangunan ini berdasarkan prioritas Strategis pembangunan Tahun 2025-2029 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini:*

Gambar 3. 1 Tema Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Papua Tengah



Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2025)

Fokus pada :

"Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Orang Asli Papua (OAP)"

Tahun pertama pembangunan 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP).

1. Pemenuhan Infrastruktur Dasar :

▪ Fokus : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

▪ Arah Kebijakan:

1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi antar kabupaten/kota untuk memperlancar distribusi barang dan jasa;
2. Penyediaan listrik dan telekomunikasi di daerah terpencil guna mempercepat digitalisasi dan akses informasi bagi masyarakat;
3. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di pedesaan dan daerah terpencil;
4. Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, termasuk Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional, Puskesmas, serta sekolah-sekolah yang layak (Pendidikan Berpola Asrama), Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Papua Tengah) dan lain-lainnya;
5. Pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, seperti irigasi pertanian, gudang penyimpanan hasil panen, dan pasar rakyat.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

▪ Fokus : Meningkatkan efektivitas pemerintahan, transparansi, dan pelayanan publik berbasis digital.

▪ Arah Kebijakan :

1. Penguatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik;
2. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna mempercepat digitalisasi layanan administrasi pemerintahan;
3. Peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan;
5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan pajak dan retribusi yang adil dan berkeadilan.

3. Penguatan Daya Saing Perekonomian Orang Asli Papua (OAP)

▪ Fokus : Mendorong kemandirian ekonomi OAP melalui pemberdayaan sektor ekonomi lokal dan peningkatan keterampilan kerja.

▪ Arah Kebijakan :

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas unggulan Papua Tengah, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan ekowisata;
2. Penguatan ekosistem UMKM dan koperasi OAP melalui akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha;
3. Pembangunan sentra ekonomi kreatif dan industri kecil menengah (IKM) bagi OAP untuk mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi;
4. Peningkatan akses OAP ke dunia kerja dan industri melalui program pelatihan keterampilan (*vocational training*) berbasis kebutuhan pasar kerja;
5. Penguatan akses permodalan dan pendampingan bisnis bagi pengusaha OAP, termasuk optimalisasi dana Otsus untuk mendorong kewirausahaan.

Arah kebijakan ini akan memastikan bahwa pembangunan di Papua Tengah pada tahun pertama (2025) benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya OAP, dengan fokus pada pemerataan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi berbasis lokal.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun kedua (2026)

"Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif"

Pada tahun kedua, fokus utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik.

1. Penguatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM

- Fokus : Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah.

▪ Arah Kebijakan :

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan fokus pada pendidikan vokasi berbasis potensi daerah;
2. Penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal dan kebutuhan pasar kerja guna meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan ekonomi;
3. Peningkatan pelatihan keterampilan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan program sertifikasi kompetensi berbasis industri;
4. Perluasan program beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, ekonomi, dan pemerintahan;
5. Peningkatan literasi digital bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja untuk mendukung transformasi digital.

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

- Fokus : Meningkatkan profesionalisme ASN, efektivitas layanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

▪ Arah Kebijakan :

1. Penyederhanaan regulasi dan proses birokrasi untuk meningkatkan efektivitas layanan publik;
2. Penguatan kapasitas dan integritas ASN melalui pelatihan kepemimpinan, anti-korupsi, serta pengembangan kompetensi berbasis meritokrasi;
3. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintahan;
5. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah berbasis data dan *evidence-based policy*.

3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- Fokus : Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

▪ Arah Kebijakan :

1. Peningkatan akses layanan kesehatan bagi daerah terpencil dan tertinggal melalui pembangunan Puskesmas, rumah sakit rujukan, dan tenaga medis yang memadai;
2. Penguatan program pencegahan dan penanganan *stunting*, gizi buruk, dan penyakit menular (TBC, malaria, HIV/AIDS);
3. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah;
4. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan

- melalui insentif dan program pengembangan kapasitas;
5. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta program kesehatan reproduksi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. (Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional).
 4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Efisiensi Anggaran
 - Fokus : Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan mencegah kebocoran anggaran.
 - Arah Kebijakan :
 1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib pajak;
 2. Efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan dampak pembangunan;
 3. Penguatan sistem audit dan pengawasan keuangan daerah guna mencegah penyalahgunaan anggaran;
 4. Mendorong tata kelola BUMD yang profesional dan berorientasi pada peningkatan ekonomi daerah;
 5. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha dalam pengelolaan keuangan dan investasi daerah.
 5. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Hukum yang berkeadilan
 - Fokus : Meningkatkan kualitas demokrasi dan supremasi hukum untuk menciptakan stabilitas dan keadilan di Papua Tengah.
 - Arah Kebijakan :
 - 1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan;
 - 2) Penguatan sistem penegakan hukum yang adil dan inklusif, khususnya dalam menangani konflik sosial dan politik;
 - 3) Peningkatan indeks demokrasi daerah melalui pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pembangunan daerah;
 - 4) Mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berbasis budaya lokal guna memperkuat stabilitas daerah;
 - 5) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani berbagai kasus hukum yang adil dan transparan.
 6. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Inklusif dalam Pembangunan
 - Fokus : Memberdayakan kelompok rentan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.
 - Arah Kebijakan :
 - 1) Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, politik, dan dunia usaha;
 - 2) Mendorong peran aktif pemuda dalam inovasi dan pembangunan daerah melalui program kewirausahaan dan *startup* digital;
 - 3) Peningkatan layanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik;
 - 4) Penguatan program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lansia;
 - 5) Mendorong nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) berfokus pada penguatan SDM dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bermartabat dengan fokus pada : (1). Meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan keterampilan SDM; (2). Meningkatkan efektivitas dan transparansi birokrasi serta reformasi tata kelola pemerintahan; (3). Memperkuat layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat; (4). Meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah; (5). Memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan

penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal; (6). Mendorong partisipasi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam pembangunan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2027)

"Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah"

Pada tahun ketiga, fokus pembangunan adalah memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing daerah dengan memberdayakan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat Papua Tengah.

1. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Wilayah

- Fokus : Optimalisasi potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal berbasis keunggulan daerah.

▪ Arah Kebijakan :

- 1) Pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kopi, kakao, sagu, dan hortikultura;
- 2) Revitalisasi sektor perikanan dan kelautan dengan meningkatkan akses nelayan terhadap sarana produksi, teknologi budidaya, dan pemasaran hasil laut;
- 3) Pengembangan sektor kehutanan dan hasil hutan non-kayu seperti gaharu, rotan, dan Minyak Atsiri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- 4) Mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, seperti industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- 5) Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekowisata, termasuk pelestarian wisata alam, cagar budaya, serta peningkatan daya tarik destinasi wisata.

2. Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif

- Fokus : Meningkatkan peran UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

▪ Arah Kebijakan :

- 1) Mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM dan koperasi, termasuk pemanfaatan dana Otsus dan kemitraan dengan perbankan;
- 2) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai kabupaten/kota untuk mendukung hilirisasi produk lokal;
- 3) Mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan e-commerce dan pemasaran berbasis teknologi;
- 4) Peningkatan daya saing produk lokal melalui standardisasi, sertifikasi, dan branding produk Papua Tengah;
- 5) Penguatan inkubator bisnis dan ruang kreatif bagi anak muda Papua Tengah untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan berbasis teknologi.

3. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi

- Fokus : Memperkuat konektivitas antarwilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

▪ Arah Kebijakan :

- 1) Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar kabupaten/kota untuk mempercepat arus barang dan jasa;
- 2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi pasar tradisional sebagai pusat perdagangan lokal yang lebih efisien dan berdaya saing;
- 3) Penguatan infrastruktur logistik dan transportasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk lokal dan pasar nasional/internasional;
- 4) Mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan industri lokal di Papua Tengah.

4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif

- Fokus : Menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di sektor unggulan daerah.
- Arah Kebijakan :
 - 1) Peningkatan pelatihan keterampilan berbasis industri dan kewirausahaan untuk mendukung transformasi ekonomi masyarakat;
 - 2) Pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis kebutuhan daerah, seperti agribisnis, kelautan, pariwisata, dan teknologi informasi;
 - 3) Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk membuka akses pekerjaan bagi tenaga kerja Papua Tengah;
 - 4) Mendorong program beasiswa bagi OAP untuk studi di bidang ekonomi, teknologi, dan industri kreatif;
 - 5) Peningkatan kapasitas perempuan dan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi produktif.

5. Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Ekonomi

- Fokus : Meningkatkan daya saing daerah melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengusaha lokal dan investasi yang berkelanjutan.
- Arah Kebijakan :
 - 1) Penyederhanaan regulasi investasi dan perizinan usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah;
 - 3) Penguatan kebijakan insentif bagi investor yang memberdayakan masyarakat lokal dan mendukung ekonomi hijau;
 - 4) Optimalisasi peran BUMD dalam pengelolaan sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
 - 5) Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan tahun kedua (2027) akan menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan daya saing daerah, dengan fokus pada : (1). Optimalisasi potensi sumber daya alam daerah (pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata); (2). Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi masyarakat; (3). Peningkatan konektivitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi daerah; (4). Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industri dan kewirausahaan lokal; (5). Reformasi regulasi ekonomi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2028)

"Pemantapan Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Berkeadilan"

Tahun keempat pembangunan Papua Tengah akan berfokus pada pembangunan sosial yang inklusif, keadilan bagi semua kelompok masyarakat, serta penguatan harmoni sosial dan kohesi antar komunitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai, toleran, dan berkeadilan dalam aspek sosial, ekonomi, serta hukum.

1. Penguatan Harmoni Sosial dan Toleransi Antar Masyarakat
 - Fokus : Mencegah konflik sosial, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun kesadaran keberagaman sebagai kekuatan daerah.
 - Arah Kebijakan :
 - 1) Meningkatkan dialog dan rekonsiliasi sosial berbasis budaya lokal untuk meredam potensi konflik antar kelompok masyarakat;
 - 2) Penguatan peran tokoh agama, adat, dan pemuda dalam menciptakan harmoni sosial serta membangun semangat kebersamaan;
 - 3) Meningkatkan pendidikan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan inklusi sosial melalui kurikulum pendidikan dan program komunitas;

- 4) Peningkatan program mediasi dan resolusi konflik berbasis adat serta hukum positif untuk mencegah konflik berkepanjangan;
- 5) Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons dan menangani konflik sosial secara cepat dan tepat.

2. Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Masyarakat

▪ Fokus: Memastikan pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap layanan sosial yang adil bagi semua kelompok masyarakat, termasuk OAP, perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

▪ Arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan akses layanan sosial bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan perempuan;
- 2) Memperluas cakupan program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi;
- 3) Mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal;
- 4) Meningkatkan jangkauan layanan perumahan layak, akses air bersih, dan sanitasi aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan redistribusi ekonomi dan peningkatan akses layanan dasar secara merata.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

▪ Fokus : Memastikan perempuan memiliki peran yang lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

▪ Arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam pemerintahan maupun dunia usaha;
- 2) Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja yang setara;
- 3) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui kebijakan hukum yang tegas serta penguatan layanan perlindungan sosial;
- 4) Mendorong kepemimpinan perempuan dalam masyarakat dan politik dengan meningkatkan representasi perempuan di berbagai sektor;
- 5) Mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak pada perempuan, seperti akses modal usaha, pelatihan wirausaha, dan pemberdayaan UMKM perempuan.
- 6) Mendorong perempuan sehingga berpotensi sebagai sumber daya pembangunan daerah serta berkontribusi pada berbagai bidang.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang Berkeadilan

▪ Fokus : Meningkatkan akses dan kualitas layanan publik yang merata, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

▪ Arah Kebijakan :

- 1) Mempercepat digitalisasi layanan publik untuk memastikan akses yang lebih mudah dan merata di seluruh wilayah Papua Tengah;
- 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif bagi masyarakat miskin, kelompok adat, dan wilayah terpencil;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemberian bantuan sosial serta perlindungan sosial;
- 4) Memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kependudukan dan administrasi pemerintahan;
- 5) Mengurangi diskriminasi dalam layanan publik melalui regulasi dan sistem pengawasan berbasis transparansi.

5. Penguatan Penegakan Hukum dan Keamanan yang Berkeadilan
 - Fokus : Memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan mampu menjaga stabilitas sosial serta ketertiban masyarakat.
 - Arah Kebijakan :
 - 1) Memperkuat supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan;
 - 3) Mendorong reformasi hukum daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan;
 - 4) Meningkatkan kapasitas aparat keamanan dan penegak hukum dalam menjaga ketertiban dengan pendekatan humanis dan berbasis kearifan lokal;
 - 5) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah dan mencegah konflik.
6. Penguatan Identitas Budaya dan Keberagaman Papua Tengah
 - Fokus : Menjaga dan mempromosikan kebudayaan lokal sebagai perekat sosial dan daya tarik daerah.
 - Arah Kebijakan :
 - 1) Meningkatkan program pelestarian budaya lokal melalui pendidikan, festival budaya, dan penguatan komunitas adat;
 - 2) Mendorong industri kreatif berbasis budaya lokal untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan nilai ekonomi budaya;
 - 3) Memperkuat pendidikan berbasis budaya dalam kurikulum sekolah untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Papua Tengah kepada generasi muda;
 - 4) Meningkatkan promosi budaya Papua Tengah sebagai bagian dari daya tarik wisata dan diplomasi budaya;
 - 5) Memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal sebagai sumber harmoni sosial.

Arah kebijakan tahun keempat (2028) berfokus pada pemantapan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan melalui : (1). Penguatan harmoni sosial dan resolusi konflik berbasis adat serta nilai-nilai kebhinekaan ; (2). Peningkatan kesejahteraan sosial dengan fokus pada kelompok rentan dan redistribusi ekonomi yang lebih adil; (3). Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai sektor; (4). Meningkatkan kualitas layanan publik yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat; (5). Meningkatkan supremasi hukum, keamanan daerah, dan akses keadilan bagi masyarakat; (6). Memperkuat identitas budaya dan keberagaman sebagai kekuatan sosial dan ekonomi daerah.

E. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2029)

Fokus: Pemantapan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan dan Merata

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tengah merupakan momentum strategis untuk memantapkan capaian pembangunan ekonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak 2025, sekaligus mengonsolidasikan transformasi ekonomi lokal menuju kemandirian, pemerataan, dan keberlanjutan. Fokus arah kebijakan pada tahun 2029 ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis potensi lokal, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat secara inklusif.

Arah kebijakan ini secara langsung merefleksikan pencapaian visi Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan, serta pelaksanaan misi kedua dan ketiga Gubernur dan

Wakil Gubernur Papua Tengah, yaitu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi.

Fokus Arah Kebijakan :

1. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan
 - Mendorong hilirisasi dan industrialisasi skala kecil atas komoditas lokal seperti kopi dataran tinggi, sagu, ikan air tawar, buah merah, rotan, dan kulit kayu.
 - Meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kampung melalui transfer teknologi, pembinaan usaha, dan akses pasar.
2. Pemerataan Infrastruktur Ekonomi dan Akses Wilayah
 - Penyelesaian infrastruktur pendukung ekonomi rakyat seperti jalan produksi, jaringan listrik desa, sarana pascapanen, dan digitalisasi konektivitas.
 - Penguatan konektivitas antarwilayah guna memperkecil ketimpangan harga dan distribusi hasil produksi.
3. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Mama-Mama Papua
 - Optimalisasi program unggulan *Papua Tengah Terang* untuk mendukung digitalisasi UMKM, koperasi kampung, serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.
 - Fasilitasi akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, dan dukungan pemasaran melalui festival ekonomi lokal dan platform digital.
4. Penguatan Ekosistem Investasi Daerah Berkeadilan
 - Peningkatan peran BUMD dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperluas lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi lokal.
 - Insentif investasi afirmatif di wilayah tertinggal dan pemanfaatan dana otonomi khusus untuk sektor produktif.
5. Pengurangan Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan Antarwilayah
 - Intervensi khusus ke distrik dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui program padat karya, kewirausahaan kampung, dan penguatan ekonomi keluarga.
 - Penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan dana pembangunan dan integrasi dengan perencanaan berbasis data spasial.
6. Transformasi Tata Kelola Ekonomi yang Transparan dan Terintegrasi
 - Pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan ekonomi melalui aplikasi e-Dalevbang.
 - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas program ekonomi berbasis indikator kinerja daerah.

F. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2030)

"Pembangunan yang Berkelanjutan Menuju Papua Tengah yang Maju dan Berkelanjutan"

Pada tahun kelima, fokus pembangunan Papua Tengah diarahkan pada keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Strategi ini akan memastikan bahwa hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua Tengah.

1. Penguatan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan
 - Fokus : Mengembangkan ekonomi berbasis lingkungan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor yang merusak alam.

- Arah Kebijakan :
 - 1) Mendorong investasi pada sektor ekonomi hijau, seperti energi terbarukan, ekowisata, dan industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - 2) Mengembangkan sistem insentif bagi perusahaan dan UMKM yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
 - 3) Mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan, dengan memperkuat sektor industri kreatif, pertanian berkelanjutan, dan jasa;
 - 4) Memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok industri berkelanjutan;
 - 5) Mengintegrasikan konsep pembangunan rendah karbon dalam kebijakan ekonomi daerah.
- 2. Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Daerah
 - Fokus : Membangun ekonomi Papua Tengah yang mandiri, berdaya saing, dan tidak bergantung pada sumber daya eksternal.
 - Arah Kebijakan :
 - 1) Meningkatkan nilai tambah produk daerah melalui hilirisasi industri berbasis potensi lokal;
 - 2) Membangun ekosistem wirausaha yang kuat, dengan dukungan infrastruktur, modal usaha, dan pasar;
 - 3) Mempercepat konektivitas ekonomi antar daerah, baik melalui infrastruktur transportasi maupun digitalisasi ekonomi;
 - 4) Meningkatkan ekspor produk lokal dengan memperkuat *branding* dan akses pasar internasional;
 - 5) Mempercepat pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- 3. Penguatan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan *Resilient*
 - Fokus : Menyediakan infrastruktur yang kokoh, ramah lingkungan, dan tahan terhadap perubahan iklim.
 - Arah Kebijakan :
 - 1) Mengembangkan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan, seperti sistem transportasi rendah emisi dan bangunan hemat energi;
 - 2) Memastikan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dengan menerapkan standar ketahanan bencana dalam perencanaan dan konstruksi;
 - 3) Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak bagi seluruh masyarakat;
 - 4) Mengembangkan jaringan transportasi multimoda untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah;
 - 5) Meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik berbasis teknologi digital.
- 4. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Perubahan Iklim
 - Fokus : Menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
 - Arah Kebijakan :
 - 1) Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mempercepat transisi energi ke sumber terbarukan;
 - 2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, laut, dan keanekaragaman hayati;
 - 3) Mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, termasuk pengurangan sampah plastik dan daur ulang limbah;
 - 4) Mengembangkan kebijakan insentif bagi industri dan masyarakat yang menerapkan praktik ramah lingkungan;
 - 5) Meningkatkan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan

- Fokus : Memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.
- Arah Kebijakan :
 - 1) Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat;
 - 2) Mempercepat pengurangan kesenjangan sosial dan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas;
 - 3) Meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
 - 4) Memperkuat sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan ekonomi dan bencana;
 - 5) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui sistem tata kelola yang partisipatif.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Saing dan Adaptif

- Fokus : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global.
- Arah Kebijakan :
 - 1) Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas;
 - 2) Meningkatkan kapasitas birokrasi dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang berbasis data dan teknologi;
 - 3) Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah;
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi yang lebih inklusif;
 - 5) Mempercepat reformasi hukum dan kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bisnis.

7. Penguatan Identitas Budaya dan Pariwisata Berkelanjutan

- Fokus : Mengembangkan sektor budaya dan pariwisata sebagai pilar ekonomi berkelanjutan.
- Arah Kebijakan :
 - 1) Melestarikan budaya lokal sebagai aset ekonomi dan identitas daerah;
 - 2) Meningkatkan daya saing destinasi wisata berbasis ekowisata dan wisata budaya;
 - 3) Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berbasis industri kreatif dan pariwisata;
 - 4) Memperkuat peran komunitas adat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan;
 - 5) Mendorong investasi dalam infrastruktur dan fasilitas wisata yang ramah lingkungan.

Arah kebijakan tahun kelima (2029) menjadi tonggak utama dalam memastikan Papua Tengah mencapai pembangunan yang maju dan berkelanjutan melalui: (1). Penguatan ekonomi hijau dan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis inovasi dan teknologi; (2). Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tahan bencana; (3). Peningkatan perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim secara sistematis; (4). Peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi; (5). Transformasi pemerintahan menuju tata kelola yang adaptif, efisien, dan berbasis digital; (6). Penguatan identitas budaya dan pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Dengan arah kebijakan ini, Papua Tengah dapat mencapai visi "Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan" secara nyata.

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 berdasarkan masing-masing sasaran serta tema pembangunan adalah sebagai berikut. Strategi dan arah kebijakan

merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3. 4 Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan / Sasaran				Strategi				Arah Kebijakan				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
Visi : Mewujudkan Papua Tengah Emas Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan													
M1: Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan, dan inisiatif kesehatan yang inovatif, sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing													
T1 : Mewujudkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan yang berpotensi dan kompeten													
M1	T1	S1	Papua Tengah Cerdas	S1	Meningkatkan Capaian Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Nasional : 1. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis <i>Teaching at The Right Level</i> (TaRL) dan Merdeka Belajar; 2. Implementasi model pembelajaran berbasis teknologi dan digitalisasi sekolah; 3. Penyediaan dan distribusi buku bacaan berkualitas serta bahan ajar berbasis budaya lokal; 4. Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, termasuk akses listrik dan internet di daerah terpencil; 5. Mendorong kolaborasi dengan mitra pendidikan seperti universitas, NGO, dan lembaga internasional.	1. Meningkatkan kualitas asesmen dan evaluasi pendidikan berbasis data; 2. Memperkuat supervisi dan pendampingan kepada sekolah yang belum mencapai standar minimum; 3. Memberikan insentif bagi guru yang berprestasi dalam meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa. 4. Meningkatkan kualitas Infrastruktur layanan umum dalam mendukung pendidikan				Dinas P & K, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas Sosial-P3A, BKPSDM, BPPKAD, Bapperida, Dinas Kominfo			
				S2	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas : 1. Program wajib belajar 12 tahun dengan insentif bagi siswa dari keluarga kurang mampu; 2. Beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi, khususnya dari daerah terpencil; 3. Program pendidikan kejar paket untuk masyarakat putus sekolah; 4. Penyediaan sekolah berbasis asrama di daerah sulit akses (Pembangunan Pendidikan Berpola Asrama).	1. Menjamin akses pendidikan yang inklusif dan merata; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka; 3. Memperluas akses pendidikan berbasis vokasi untuk menarik minat anak-anak melanjutkan sekolah.				Dinas P & K, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas Sosial-P3A, Bapperida, BPPKAD, Dinas Kominfo			

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<p>S3 Meningkatkan Harapan Lama Sekolah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi di seluruh kabupaten/kota; 2. Penguatan program pendidikan vokasi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja; 3. Meningkatkan peran sekolah dan komunitas dalam mencegah putus sekolah; 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong program afirmasi bagi daerah dengan angka putus sekolah tinggi; 2. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi dengan membuka program studi yang relevan dengan kebutuhan daerah; 3. Penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. 4. SD yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi 	<p>Dinas P & K, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas Sosial-P3A, Dinas Kominfo</p>
				<p>S4 Meningkatkan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah; 2. Mendorong pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Papua Tengah) akan menjadi Pusat Pengembangan SDM berkualitas di Papua Tengah; 3. Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri; 4. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga pengajar melalui program <i>capacity building</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kebijakan afirmatif bagi lulusan SMA/SMK agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi; 2. Memberikan insentif bagi mahasiswa Papua Tengah yang berkuliah dan kembali mengabdikan di daerah; 3. Meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi berbasis digital untuk menjangkau daerah terpencil; 4. Membangun Fakultas yang sesuai dengan potensi daerah; 5. Afirmasi Bantuan biaya Pendidikan Program Studi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Wajib penempatan Pada DTPK 6. Menciptakan SDM unggul dan meningkatkan daya saing Papua Tengah. 	<p>Dinas P & K, Dinas PUPR, Dinas Nakertrans-ESDA, BPPKAD, Dinas Sosial-P3A, Dinas Kominfo</p>

T2 : Mewujudkan inisiatif kesehatan yang inovatif

T2 : Mewujudkan inisiatif kesehatan yang inovatif

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan			Perangkat Daerah Penanggung jawab
M1	T2	S2	Papua Tengah Sehat	S5	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak : 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan, termasuk Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional, peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan bidan di daerah terpencil; 2. Penguatan program ANC (<i>Antenatal Care</i>) dan layanan persalinan aman dengan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan; 3. Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi ibu hamil di daerah sulit akses; 4. Pemberian suplemen gizi dan tablet tambah darah bagi ibu hamil serta imunisasi lengkap bagi bayi; 5. Program edukasi bagi ibu hamil dan keluarga terkait gizi, ASI eksklusif, serta pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif; 6. Pembangunan Rumah Sakit Provinsi .		1. Pembangunan Rumah Sakit Daerah Provinsi Papua tengah 2. Memastikan layanan kesehatan ibu dan anak dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Papua Tengah, terutama di daerah pedalaman; 3. Memperkuat sistem rujukan ibu hamil berisiko tinggi ke rumah sakit dengan fasilitas yang memadai; 4. Integrasi program pengentasan stunting dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga agar anak mendapatkan asupan gizi yang cukup; 5. Memastikan Layanan Kesehatan bisa di nikmati oleh seluruh masyarakat Papua Tengah.		Dinas Kesehatan-P2KB (RSUD/Puskesmas), Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Kominfostadi, Dinas Sosial-P3A, BPPKAD, Bapperida	
				S6	Penanganan Tuberkulosis (TBC) : 1. Memperluas layanan deteksi dini TBC di puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan; 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis dan pengobatan TBC; 3. Mendorong kepatuhan pengobatan pasien TBC dengan sistem pemantauan berbasis teknologi (<i>digital adherence monitoring</i>); 4. Program pendampingan bagi pasien TBC untuk mencegah putus obat dan resistensi obat (TBC RO); 5. Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan TBC.		1. Mewajibkan skrining TBC secara berkala di daerah dengan angka kejadian tinggi; 2. Penyediaan obat TBC yang gratis dan memastikan ketersediaannya di seluruh fasilitas kesehatan; 3. Mendorong kerja sama dengan komunitas dan NGO untuk mendukung program eliminasi TBC.		Dinas Kesehatan-P2KB (RSUD/Puskesmas), Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Kominfostadi, Dinas Sosial-P3A, BPPKAD, Bapperida	

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<p>S7 Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kelambu berinsektisida dan obat anti-malaria di daerah endemis; 2. Penguatan surveilans malaria dengan skrining rutin di daerah rawan; 3. Peningkatan cakupan dan kualitas pengobatan malaria sesuai standar WHO; 4. Program pemberantasan nyamuk melalui penyemprotan rumah dan pengelolaan lingkungan; 5. Edukasi masyarakat mengenai pencegahan malaria, terutama di daerah pedalaman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan setiap kabupaten memiliki program eliminasi malaria yang berkelanjutan; 2. Menjalin kerja sama dengan sektor swasta, universitas, dan organisasi internasional dalam penelitian dan penanganan malaria; 3. Mengintegrasikan program eliminasi malaria dengan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan posyandu. 	Dinas Kesehatan-P2KB (RSUD/ Puskesmas), Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Kominfostadi, Dinas Sosial-P3A, BPPKAD, Bapperida
				<p>S8 Penanggulangan HIV/AIDS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses terhadap layanan tes dan konseling HIV (VCT) secara gratis; 2. Penyediaan obat ARV (Antiretroviral) secara berkelanjutan bagi ODHA; 3. Edukasi tentang pencegahan HIV/AIDS melalui kampanye yang melibatkan pemuda, kelompok masyarakat, dan gereja; 4. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dengan HIV untuk mencegah penularan ke bayi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat layanan kesehatan khusus HIV/AIDS di puskesmas dan rumah sakit; 2. Mendorong kebijakan nol stigma bagi ODHA di lingkungan kerja dan sosial; 3. Integrasi program penanggulangan HIV/AIDS dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 	Dinas Kesehatan-P2KB (RSUD/ Puskesmas), Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Kominfostadi, Dinas Sosial-P3A, BPPKAD, Bapperida
				<p>S9 Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi (%) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan; 2. Mempermudah akses administrasi bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan perusahaan dan institusi untuk mendaftarkan pekerjanya dalam JKN; 2. Mengembangkan program subsidi bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan; 3. Memastikan fasilitas kesehatan daerah terintegrasi dengan sistem JKN untuk memberikan pelayanan maksimal bagi peserta. 	Dinas Kesehatan-P2KB (RSUD/ Puskesmas), Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Kominfostadi, Dinas Sosial-P3A, BPPKAD, Bapperida

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan premi JKN bagi masyarakat tidak mampu; 4. Penyediaan layanan kesehatan berbasis digital untuk mempercepat klaim dan layanan JKN.		
M2: Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dengan memperkuat kapasitas produksi lokal, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memfasilitasi akses pasar yang lebih luas yang bertujuan untuk menciptakan swasembada pangan, lapangan kerja, menghapus kemiskinan ekstrim, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah demi terwujudnya kemandirian ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adil dan merata T3 : Meningkatkan potensi sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan							
M2	T3	S3	Perlindungan Sosial yang Adaptif Ketahanan energi	S10	Menurunkan Tingkat Kemiskinan (%) : 1. Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, seperti pengembangan pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis komoditas unggulan Papua Tengah; 2. Bantuan sosial yang tepat sasaran, termasuk program perlindungan sosial berbasis keluarga seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai); 3. Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan melalui program pelatihan kerja dan sekolah vokasi bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah; 4. Meningkatkan akses ke layanan keuangan dan permodalan, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) dan koperasi berbasis komunitas; 5. Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses air bersih, listrik, dan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin.	1. Mempercepat penyediaan data kemiskinan berbasis digital untuk penyaluran bantuan yang lebih akurat; 2. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam program pengentasan kemiskinan; 3. Mengembangkan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. 4. Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)	Dinas Perindagkop, Dinas Sosial-P3A, Dinas Nakertrans-ESDA, BPPKAD, Bapperida, Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas P2KP, Dinas PUPR, Dinas P & K,
				S11	Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) :	1. Mewajibkan perusahaan skala menengah dan besar untuk mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS Ketenagakerjaan;	Dinas Perindagkop, Dinas Sosial-P3A, Inspektorat, Dinas Nakertrans-ESDA,

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan edukasi kepada pekerja formal dan informal tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan); 2. Memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan mendorong perusahaan dan pekerja sektor informal untuk mendaftar; 3. Penyediaan subsidi bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan; 4. Peningkatan kerja sama dengan perusahaan, koperasi, dan BUMDes untuk menjamin pekerja sektor informal mendapatkan perlindungan sosial; 5. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan agar perusahaan mematuhi regulasi terkait jaminan sosial tenaga kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan regulasi daerah yang mempermudah akses pekerja informal ke jaminan sosial; 3. Meningkatkan insentif bagi perusahaan yang menerapkan standar perlindungan tenaga kerja. 	BPPKAD, Dinas PTSP, Bapperida, Dinas Satpol PP, Dinas Admindukcapil-PMK
			S12	<p>Meningkatkan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasi, keterampilan digital, dan wirausaha; 2. Mendorong kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen di sektor formal, termasuk kuota khusus di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD; 3. Penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang inklusif, seperti aksesibilitas fisik di tempat kerja dan kebijakan kerja fleksibel bagi disabilitas; 4. Memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan sektor swasta untuk membuka lebih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan regulasi daerah yang mengharuskan perusahaan dan instansi pemerintah menyediakan minimal 2% tenaga kerja dari kelompok disabilitas; 2. Mendorong kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif; 3. Mengoptimalkan peran balai latihan kerja (BLK) untuk menyediakan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. 4. Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) 	Dinas Perindagkop, Dinas Sosial-P3A, Dinas Nakertrans-ESDA, BPPKAD, Dinas PTSP, Bapperida, Dinas PUPR, BKPSDM

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					banyak lapangan kerja bagi penyandang disabilitas; 5. Meningkatkan insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja disabilitas, seperti potongan pajak dan subsidi pelatihan kerja.		5. Peningkatan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskillin berstandar Industri		
M2	T4	S4	Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah	S13	Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB : 1. Pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan Papua Tengah (seperti pengolahan kayu, perikanan, pertanian, dan hasil hutan non-kayu); 2. Mendorong investasi dalam industri hilir agar produk lokal memiliki nilai tambah; 3. Penyediaan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan; 4. Pelatihan tenaga kerja industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing; 5. Peningkatan infrastruktur pendukung industri seperti listrik, jalan, dan konektivitas logistik.		1. Mengembangkan regulasi yang mendukung kemudahan investasi industri pengolahan; 2. Pembentukan BUMD milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah dibidang industri Pengolahan 3. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dalam pengembangan teknologi pengolahan; 4. Memastikan industri kecil dan menengah memiliki akses terhadap bahan baku, pasar, dan pendanaan.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas Perindagkop, Bapperida, Dinas LHK, BPPKAD, Dinas PTSP, Dinas P2KP	
				S14	Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan : 1. Penguatan branding dan promosi destinasi wisata unggulan Papua Tengah, termasuk ekowisata dan wisata budaya; 2. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, bandara, dan fasilitas akomodasi; 3. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku usaha hotel dan restoran;		1. Penyusunan regulasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal; 2. Mendorong kemitraan antara masyarakat lokal dan investor dalam pengembangan pariwisata; 3. Mengembangkan program insentif bagi UMKM yang terlibat dalam sektor pariwisata.	Dinas Poraparkref, Dinas Perindagkop, Dinas P & K, Dinas Kominfo, Bapperida, Dinas PTSP, Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					4. Mendorong investasi di sektor perhotelan, restoran, dan atraksi wisata berbasis komunitas; 5. Digitalisasi layanan wisata, termasuk pemasaran online dan sistem reservasi berbasis teknologi.				
			S15	Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif : 1. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis seni budaya, kuliner, dan kriya khas Papua Tengah; 2. Mendorong digitalisasi ekonomi kreatif melalui e-commerce, pemasaran digital, dan teknologi finansial; 3. Pemberdayaan komunitas kreatif lokal melalui pelatihan dan pendampingan usaha; 4. Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif melalui kredit usaha kreatif dan hibah modal.		1. Penguatan regulasi yang mendukung hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif; 2. Pembentukan BUMD milik Pemerintah Provinsi papua Tengah dibidang Ekonomi Kreatif 3. Peningkatan promosi dan event ekonomi kreatif, seperti festival seni dan budaya; 4. Penguatan jejaring dan kolaborasi antara ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.		Dinas Perindagkop, BPPKAD, Bapperida, Dinas Poraparkref, Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas Kominfostadi, Dinas P & K	
			S16	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD : 1. Penguatan program inkubasi bisnis dan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi; 2. Digitalisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional; 3. Peningkatan peran BUMD dalam mendukung sektor strategis daerah, seperti distribusi pangan dan energi; 4. Optimalisasi kemitraan antara UMKM dan industri besar dalam rantai pasok lokal; 5. Penyederhanaan perizinan bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha baru.		1. Penyusunan regulasi daerah yang memudahkan UMKM dan koperasi berkembang; 2. Pembentukan BUMD milik Pemerintah Provinsi papua Tengah 3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD untuk mendukung ekonomi daerah; 4. Mengembangkan program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan baru. 5. Fasilitasi Sosialisasi Pembentukan Koperasi dari Kelompok Strategis		Dinas Perindagkop, BPPKAD, Bapperida, Dinas PTSP, Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas P2KP, Dinas Kominfostadi, BUMD	

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<p>S17 Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri; 2. Mendorong industri padat karya dan sektor kreatif untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal; 3. Penguatan sistem informasi pasar kerja agar tenaga kerja dapat terhubung dengan peluang kerja yang sesuai; 4. Penyediaan insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan afirmatif untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas dalam rekrutmen; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri; 3. Mempermudah regulasi ketenagakerjaan agar mendukung pertumbuhan sektor formal. 4. Pembentukan BUMD milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah 	Dinas PTSP, Dinas Nakertrans-ESDA, BPPKAD, Bapperida, Dinas Perindagkop, Dinas P & K, Dinas Poraparkref
				<p>S18 Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi; 2. Mendorong kebijakan ramah keluarga di tempat kerja, seperti fleksibilitas jam kerja dan cuti melahirkan yang lebih baik; 3. Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak di tempat kerja; 4. Program kewirausahaan perempuan berbasis komunitas dan UMKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi daerah yang mendukung kesetaraan gender di dunia kerja; 2. Memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak perempuan; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi. 	Dinas Kesehatan-P2KB, Dinas Perindagkop, Dinas Sosial-P3A, BPPKAD, Bapperida, Dinas PTSP, Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas P & K
				<p>S19 Meningkatkan Tingkat Penguasaan Iptek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri; 2. Penyediaan pusat riset dan teknologi untuk mendukung industri lokal; 3. Mendorong adopsi teknologi digital di sektor UMKM, pertanian, dan industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kebijakan daerah yang mendorong inovasi dan riset berbasis lokal; 2. Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam riset dan pengembangan teknologi; 3. Menyediakan insentif bagi perusahaan dan startup yang berinvestasi dalam inovasi. 	Dinas Nakertrans-ESDA, Dinas Perindagkop, Bapperida, BPPKAD, Dinas P2KP, Dinas Kominfo, Dinas P & K

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					4. Peningkatan investasi dalam pendidikan dan riset berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).				
M3: Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan semangat kerjasama dan komitmen terhadap pelayanan dan pembangunan melalui ekosistem organisasi kerja yang adaptif dan agile yang mendukung kultur budaya kompetitif demi terwujudnya transformasi tata kelola yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat									
T5 : Mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistim administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi									
M3	T5	S5	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif di papua Tengah	S20	Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum : 1. Penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan kepastian hukum yang mendukung investasi dan pelayanan publik; 2. Penguatan kapasitas aparatur hukum dan peradilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di tingkat daerah; 3. Peningkatan transparansi dan aksesibilitas regulasi daerah dengan digitalisasi dokumen hukum dan kebijakan; 4. Optimalisasi peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui konsultasi publik dan partisipasi masyarakat sipil; 5. Sinergi antara regulasi nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan keselarasan hukum.		1. Mendorong percepatan revisi dan harmonisasi regulasi yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah; 2. Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan hukum daerah guna mencegah; penyalahgunaan wewenang. 3. Memperkuat lembaga bantuan hukum bagi masyarakat untuk memastikan akses keadilan yang merata.		Inspektorat, Dinas PTSP, Setda (Biro Hukum), Bapperida, Dinas Kominfostadi, Dinas Satpol PP, Dinas Admindukcapil-PMK, BPPKAD

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				S21	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : 1. Digitalisasi administrasi pemerintahan dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh; 2. Pengembangan layanan publik berbasis digital, seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 3. Peningkatan keamanan data dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital pemerintahan; 4. Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap sistem digital; 5. Integrasi layanan digital antarinstansi pemerintah guna menciptakan sistem pelayanan terpadu yang lebih efisien.	1. Mewajibkan setiap OPD mengimplementasikan SPBE secara bertahap sesuai dengan roadmap digitalisasi daerah; 2. Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pusat dan swasta dalam pengembangan infrastruktur digital daerah; 3. Menyediakan kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjamin keamanan informasi pemerintahan dan masyarakat. 4. Pengembangan Platform digital Managemen ASN	Setda (Biro Organisasi & Biro Hukum), Dinas Kesehatan-P2KB, Inspektorat, BPPKAD, Dinas Kominfo, Dinas Admindukcapil-PMK, BKPSDM, Bapperida, Dinas PTSP,	
				S22	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik : 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik melalui pelatihan berorientasi pada pelayanan prima; 2. Penerapan standar pelayanan publik yang jelas, cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> ; 3. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif, seperti layanan <i>hotline</i> , aplikasi pengaduan digital, dan kanal media sosial resmi; 4. Mendorong inovasi dalam pelayanan publik, seperti layanan keliling, sistem layanan berbasis aplikasi, dan <i>one-stop service center</i> ;	1. Menyusun regulasi daerah yang mengatur standar pelayanan publik dan mekanisme evaluasi kinerja pelayanan; 2. Menyediakan sistem pemantauan dan penilaian layanan publik berbasis data; 3. Mewajibkan setiap instansi pemerintah daerah memiliki <i>customer service</i> yang aktif untuk menangani keluhan masyarakat.	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan-P2KB, Dinas Sosial-P3A, Setda (Biro Organisasi & Biro Hukum), Inspektorat, Dinas Kominfo, Dinas PTSP, BKPSDM, Bapperida,	

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					5. Penyediaan fasilitas layanan publik yang ramah disabilitas dan inklusif, untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang setara.				
				S23	Meningkatkan Indeks Integritas Nasional : 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran; 2. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti <i>e-audit</i> dan <i>e-monitoring</i> terhadap anggaran dan proyek pemerintah; 3. Penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen ASN untuk memastikan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas; 4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, melalui sistem pelaporan yang mudah diakses; 5. Peningkatan edukasi anti-korupsi bagi aparatur negara dan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan etika birokrasi.			1. Mewajibkan pejabat daerah untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara berkala; 2. Mendorong sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi ASN berdasarkan kinerja dan tingkat integritasnya; 3. Membangun sistem whistleblower yang aman bagi masyarakat dan pegawai pemerintah yang ingin melaporkan praktik korupsi.	Inspektorat, BKPSDM, Setda (Biro Hukum & Barjas), BPPKAD, Dinas Kominfo, Dinas P & K, KPK
M3	T5	S6	Terwujudnya Transformasi Digital Papua Tengah	S24	Meningkatkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) : 1. Pembangunan infrastruktur digital yang merata, termasuk penyediaan jaringan internet hingga ke daerah terpencil; 2. Penguatan literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah guna meningkatkan adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari; 3. Mendorong digitalisasi sektor publik dan ekonomi, seperti layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), e-commerce untuk			1. Menyusun regulasi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TIK, termasuk kebijakan insentif bagi penyedia layanan internet; 2. Mewajibkan instansi pemerintah daerah mengadopsi sistem digital dalam layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi; 3. Menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dan	Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas PTSP, Dinas P & K, Dinas Kesehatan-P2KB, Bapperida, Dinas Poraparkref, Dinas Admindukcapil-PMK, BKPSDM,

Tujuan / Sasaran			Strategi			Arah Kebijakan			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				UMKM, dan digitalisasi layanan kesehatan serta pendidikan; 4. Peningkatan kerja sama dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet untuk memperluas cakupan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan; 5. Pengembangan pusat inovasi digital dan startup teknologi lokal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital.			pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi digital; 4. Meningkatkan investasi daerah dalam pengembangan pusat data dan keamanan siber guna mendukung transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. 5. Perluasan Layanan Penyiaran Digital		
			S25	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (RT) (%) : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro, dan biomassa untuk menjangkau daerah terpencil; 2. Peningkatan investasi dalam jaringan distribusi listrik guna memastikan stabilitas pasokan listrik bagi rumah tangga dan industri; 3. Mendorong pemanfaatan teknologi smart grid dan digitalisasi manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik; 4. Program subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu agar seluruh rumah tangga memiliki akses listrik yang terjangkau; 5. Pengembangan desa mandiri energi dengan pemanfaatan teknologi mikrogrid untuk daerah dengan akses listrik terbatas.			1. Menyusun kebijakan insentif bagi investasi energi terbarukan guna mendukung elektrifikasi daerah terpencil; 2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan energi berkelanjutan guna memastikan pemerataan akses listrik; 3. Meningkatkan kolaborasi dengan PLN dan sektor swasta untuk percepatan penyediaan listrik berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; 4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan program elektrifikasi berjalan sesuai target yang ditetapkan.		Dinas LHK, Dinas Nakertrns-ESDA, Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Sosial-P3A, Bapperida, Dinas Kominfo, Dinas PTSP, Dinas P & K, Dinas Perindagkop, PLN
M3	T5	S7	S26	Meningkatkan Indeks Kepemimpinan Daerah : 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah serta ASN melalui pelatihan kepemimpinan yang berbasis inovasi, tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada masyarakat;			1. Menetapkan standar kompetensi kepemimpinan daerah yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang lebih baik; 2. Mewajibkan pemimpin daerah dan ASN mengikuti program		Bakesbangpol, Inspektorat, Dinas Perindagkop, Dinas Kominfo, Dinas Sosial-P3A, Dinas Admindukcapil-PMK,

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					<div>2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah;</div> <div>3. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah;</div> <div>4. Pemberdayaan kepemimpinan berbasis data dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan;</div> <div>5. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan daerah agar kebijakan lebih partisipatif dan inklusif.</div>	<div>kepemimpinan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas;</div> <div>3. Memperkuat mekanisme evaluasi kinerja kepemimpinan daerah berbasis indikator yang jelas dan terukur.</div>	Bapperida, Dinas P & K, BKPSDM	
			S27	<div>Menurunkan Persentase Konflik SARA :</div> <div>1. Penguatan dialog antaragama dan antarsuku melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda guna membangun kesepahaman dan solidaritas sosial;</div> <div>2. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mediasi dan resolusi konflik dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan berbasis kearifan lokal;</div> <div>3. Pendidikan multikultural dan toleransi sejak dini di sekolah dan komunitas untuk menanamkan nilai keberagaman dan persatuan;</div> <div>4. Penerapan sistem deteksi dini konflik sosial dengan membentuk tim khusus yang</div>	<div>1. Mengembangkan kebijakan daerah yang berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik berbasis kearifan lokal;</div> <div>2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan kohesi sosial dan toleransi di masyarakat;</div> <div>3. Meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di Papua Tengah.</div>	Bakesbangpol, Dinas Kominfostadi, Dinas P & K, Dinas Sosial-P3A, Inspektorat, Dinas Satpol PP, Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Poraparkref		

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					memantau potensi konflik dan melakukan intervensi sebelum terjadi eskalasi; 5. Optimalisasi peran media dalam menyebarkan narasi damai dan mengurangi provokasi berbasis SARA melalui regulasi dan kampanye anti-hoaks.				
M4: Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai, dan tertib, di mana setiap warga masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan optimal dengan semangat gotong royong dan kerjasama antar unsur masyarakat untuk mewujudkan stabilitas daerah yang berkeadilan melalui pendekatan adat, budaya, sosial dan ekonomi									
T6 : Memantapkan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib									
M4	T6	S8	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamananan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansi pada Provinsi Papua Tengah	S28	Meningkatkan Penegakan Hukum Peraturan Daerah : 1. Penguatan kapasitas aparaturnya penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda); 2. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami dan mematuhi Perda yang berlaku; 3. Optimalisasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda dengan membentuk sistem pemantauan dan mekanisme pelaporan masyarakat; 4. Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat untuk memastikan Perda diterapkan secara efektif dan berkeadilan.	1. Memperkuat regulasi dan peraturan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan; 2. Meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan implementasi Perda guna mencegah penyalahgunaan kewenangan; 3. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang cepat dan berbasis digital untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat.		Bakesbangpol, Dinas Satpol PP, Setda (Biro Hukum), Inspektorat, Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Kominfostadi, Dinas P & K, Dinas Perindagkop, BKPSDM	
				S29	Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM : 1. Memastikan kebijakan daerah selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam perlindungan hak-hak kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat);	1. Menetapkan program aksi daerah yang mengedepankan prinsip HAM dalam pelayanan publik dan kebijakan daerah; 2. Mengembangkan sistem pelaporan dan penyelesaian kasus pelanggaran			

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					<ul style="list-style-type: none"> 2. Mendorong edukasi HAM kepada aparat pemerintah dan masyarakat melalui sosialisasi dan program pelatihan; 3. Memperkuat peran Komisi Nasional HAM atau lembaga HAM daerah dalam memantau, mengevaluasi, dan menangani pelanggaran HAM; 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan, termasuk penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. 		<ul style="list-style-type: none"> 3. Menyusun kebijakan afirmatif untuk meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan kelompok rentan. 	
				S30	<p>Meningkatkan Proporsi Penduduk yang Merasa Aman di Tempat Tinggalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui optimalisasi peran kepolisian, TNI, dan satuan keamanan masyarakat (Satkamling); 2. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah; 3. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan keamanan daerah, seperti pemasangan CCTV di area publik dan penggunaan sistem laporan kejadian berbasis digital; 4. Meningkatkan program patroli keamanan di daerah rawan kejahatan dan konflik; 5. Membangun mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil. 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sistem pengaduan keamanan yang mudah diakses oleh masyarakat; 2. Memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan dari ancaman kekerasan dan kriminalitas; 3. Meningkatkan kehadiran aparat keamanan di daerah rawan konflik guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. 	<p>Bakesbangpol, Dinas Sosial-P3A, Setda (Biro Hukum & Biro Pemerintahan), Dinas Satpol PP, Dinas Admindukcapil-PMK, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, FKUB, Polda, Kodam</p>
				S31	<p>Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua Tengah :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kebijakan daerah melalui 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keterbukaan informasi publik melalui regulasi yang mendukung akses masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; 	<p>Bakesbangpol, Dinas Sosial-P3A, KPU/Bawaslu, Setwan (DPR Papua Tengah), Dinas</p>

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan; 2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu serta pemilihan kepala daerah guna memastikan demokrasi yang jujur dan adil; 3. Memperkuat peran media dan kebebasan pers untuk mendukung kebebasan berekspresi serta mengawasi jalannya pemerintahan; 4. Meningkatkan kapasitas partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan peran demokrasi yang sehat; 5. Membangun budaya politik yang inklusif dan bebas dari praktik politik uang, diskriminasi, serta tekanan politik.	2. Mendorong dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih substansial; 3. Menyediakan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi masyarakat yang menghadapi diskriminasi politik atau intimidasi.	Kominfoستadi, Dinas Admindukcapil-PMK	
M5: Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi melalui praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah, sekarang dan di masa yang akan datang								
T7 : Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan								
M5	T7	S9	Terwujudnya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	S32	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan mencerminkan kemajuan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di suatu daerah : 1. Pelestarian dan revitalisasi budaya lokal Papua Tengah melalui dukungan terhadap seni, bahasa, tradisi, dan kearifan lokal; 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan budaya dengan memasukkan muatan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah;	1. Menetapkan kebijakan daerah untuk melindungi warisan budaya tak benda dan benda di Papua Tengah; 2. Menyediakan dana hibah atau insentif bagi komunitas budaya dan pelaku seni untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya lokal; 3. Menyelenggarakan festival budaya dan seni secara rutin guna memperkuat identitas budaya Papua Tengah dan menarik wisatawan;	Dinas P & K, Dinas Poraparkref, Dinas Kominfoستadi, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas Admindukcapil-PMK, Bapperida, Dewan Adat Papua Tengah,	

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan			Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					<div>3. Penguatan lembaga budaya, sanggar seni, dan komunitas kreatif guna memperluas ruang ekspresi dan inovasi budaya;</div> <div>4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri kreatif, pariwisata budaya, dan produk berbasis kearifan lokal;</div> <div>5. Peningkatan infrastruktur kebudayaan seperti museum, galeri seni, rumah adat, dan pusat kebudayaan guna mendukung kegiatan budaya;</div> <div>6. Mendorong digitalisasi dan dokumentasi budaya untuk menjaga warisan budaya agar dapat diakses oleh generasi mendatang.</div>		<div>4. Mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi dan peneliti untuk mendokumentasikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal.</div>					
			S33	<div>Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur harmoni antarumat beragama, toleransi, dan kerja sama dalam kehidupan sosial :</div> <div>1. Memperkuat dialog antaragama melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh agama, pemuda lintas agama, dan pemerintah daerah;</div> <div>2. Mengembangkan program pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah dan masyarakat guna menanamkan nilai-nilai persaudaraan dan harmoni sosial;</div> <div>3. Mendorong peran aktif tokoh agama dalam membangun narasi damai dan menangkal penyebaran ujaran kebencian serta ekstremisme;</div> <div>4. Optimalisasi peran media dalam menyebarkan pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks yang berpotensi memicu konflik keagamaan;</div>	<div>1. Menyusun regulasi daerah yang melindungi kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi berbasis agama;</div> <div>2. Menyediakan insentif dan fasilitas bagi kegiatan yang mendorong toleransi dan kerja sama antarumat beragama;</div> <div>3. Mengintegrasikan program pembangunan sosial dan ekonomi berbasis lintas agama untuk memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat;</div> <div>4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menangani isu-isu sensitif terkait keberagaman agama melalui pendekatan yang inklusif dan humanis.</div>		<div>Bakesbangpol, Dinas Sosial-P3A, Dinas Admindukcapil- PMK, Dinas Perindagkop, Dinas P & K, Dinas Kominfostadi, Dinas Poraparkref, FKUB/Dewan Adat Papua Tengah</div>					

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					5. Meningkatkan kerja sama antarumat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan untuk memperkuat solidaritas sosial; 6. Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam mediasi konflik keagamaan.				
M5	T7	S10	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	S34	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPK). Indeks ini mencerminkan kesejahteraan keluarga dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial : 1. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk layanan gizi, imunisasi, dan kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak; 2. Peningkatan literasi dan pendidikan keluarga dalam pola asuh anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kesejahteraan psikososial keluarga; 3. Penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peningkatan keterampilan kerja, akses permodalan bagi usaha mikro, dan pelatihan kewirausahaan berbasis keluarga; 4. Mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna menciptakan keseimbangan peran dalam keluarga; 5. Meningkatkan akses terhadap perumahan layak huni dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga; 6. Memperkuat peran lembaga sosial dan komunitas dalam mendampingi keluarga rentan, seperti keluarga miskin, keluarga			1. Menyediakan program bantuan sosial dan layanan konsultasi keluarga berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; 2. Mengembangkan kebijakan ketahanan keluarga yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial; 3. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan ketahanan keluarga, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan keluarga; 4. Mengembangkan pusat layanan keluarga dan rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	Dinas Sosial-P3A, Dinas PUPR, Dinas LHK, Dinas Kominfostadi, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas Perindagkop, Dinas P & K, Kesehatan-P2KB, (Puskesmas/Posyan du)

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					dengan anak berkebutuhan khusus, dan keluarga yang terdampak konflik.				
				S35	Mengurangi Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik : 1. Mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk beasiswa dan program afirmatif untuk kelompok rentan;	1. Mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan kesetaraan akses dan peluang bagi semua warga; 2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan;	Dinas Sosial-P3A, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas Kesehatan-P2KB, BKPSDM, Dinas P & K		
					2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama di sektor formal, serta memberikan pelatihan keterampilan untuk memperkuat kapasitas perempuan; 3. Meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di sektor pemerintahan, politik, dan ekonomi; 4. Memastikan akses layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan terhadap perempuan, termasuk pencegahan pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender; 5. Mendorong kesetaraan dalam kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah yang adil, cuti melahirkan, serta fasilitas penitipan anak di tempat kerja; 6. Membangun mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi atau kekerasan.	3. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender, termasuk dalam peran domestik dan pengasuhan anak; 4. Memastikan kebijakan daerah terkait layanan publik, pendidikan, dan ketenagakerjaan berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.			
T8 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan									
M5	T8	S11	Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di papua Tengah	S36	Menjaga Stabilitas Harga Antarwilayah (Koefisien Variasi Harga). Variasi harga antarwilayah menunjukkan tingkat kesenjangan harga di	1. Mengembangkan kebijakan pengendalian harga barang pokok	Dinas Perindagkop, Bapperida, Dinas P2KP, Dinas		

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<p>berbagai daerah di Papua Tengah. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi akibat infrastruktur yang belum merata, biaya distribusi yang tinggi, atau keterbatasan pasokan barang dan jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik, termasuk peningkatan akses jalan, pelabuhan, dan bandara guna mempercepat distribusi barang antarwilayah; 2. Pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien, seperti pemanfaatan rantai pasok berbasis teknologi dan gudang logistik terpadu; 3. Penguatan peran BUMD dan koperasi dalam distribusi bahan pokok dan kebutuhan strategis untuk mengurangi fluktuasi harga; 4. Mendorong peningkatan produksi dan stok pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada barang dari luar daerah; 5. Memperkuat kerja sama antarwilayah dalam perdagangan dan distribusi barang untuk memastikan pasokan merata di seluruh Papua Tengah. 	<p>dan memantau disparitas harga antarwilayah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyediakan subsidi transportasi bagi daerah terpencil agar harga barang tetap terjangkau; 3. Mengalokasikan investasi dalam infrastruktur logistik untuk mempercepat arus barang dan mengurangi biaya distribusi. 	Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
			S37	<p>Meningkatkan Investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB). PMTB menggambarkan tingkat investasi yang masuk ke dalam pembangunan infrastruktur, peralatan, dan modal usaha di Papua Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum bagi investor; 2. Peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi daerah yang mendukung iklim investasi yang kondusif dan transparan; 2. Memberikan insentif pajak dan kemudahan administrasi bagi investor yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah dan lembaga keuangan mikro dalam mendukung investasi sektor produktif. 	Dinas Nakertrans, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas P2KP, Setda (Bagian Hukum), Dinas PTSP, Bapperida

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					koperasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; 3. Mendorong kemitraan antara swasta dan pemerintah (Public-Private Partnership/PPP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis; 4. Memperkuat insentif bagi investasi hijau dan berkelanjutan, terutama di sektor energi terbarukan dan industri ramah lingkungan.				
				S38	Memperkuat Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB). Ekspor barang dan jasa menjadi indikator integrasi ekonomi Papua Tengah dengan pasar nasional dan global : 1. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, hasil hutan, kopi, kakao, dan produk pertambangan, untuk meningkatkan daya saing ekspor; 2. Meningkatkan kualitas dan standar produk ekspor, termasuk sertifikasi produk yang sesuai dengan standar internasional; 3. Mendorong hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sebelum produk diekspor; 4. Memperluas akses pasar ekspor dengan kerja sama perdagangan antarprovinsi dan internasional; 5. Memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk mempromosikan produk Papua Tengah ke pasar global.	1. Menyediakan kebijakan insentif bagi industri yang berorientasi ekspor; 2. Meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait guna memperluas pasar ekspor dan memperkuat diplomasi ekonomi; 3. Mengembangkan pusat logistik ekspor untuk mempercepat pengiriman dan menekan biaya ekspor. 4. Pengembangan kawasan kopi	Dinas Kominfostadi, Dinas Perindagkop, Dinas P2KP, Dinas Nakertrans ESDA		
M5	T8	S12	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah	S39	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Pendapatan daerah yang kuat akan mendukung pembangunan infrastruktur,	1. Penguatan regulasi pajak daerah yang lebih adil dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi;	Dinas PTSP, Dinas Kominfostadi, Dinas Perindagkop, Dinas Poraparkref		

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<p>pelayanan publik, dan program ekonomi yang berkelanjutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 2. Ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya dengan memperluas basis pajak dari sektor-sektor potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital; 3. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang taat pajak; 4. Menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi baru sambil tetap menjaga keseimbangan pendapatan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Digitalisasi layanan pajak untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kemudahan pembayaran pajak; 3. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerimaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 	
			S40	<p>Menjaga Tingkat Inflasi (%) Tetap Stabil. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mengelola kebijakan harga dan ketersediaan barang pokok; 2. Penguatan ketahanan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga harga tetap stabil; 3. Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, termasuk pembangunan pasar induk dan gudang logistik untuk mengurangi biaya distribusi; 4. Intervensi harga secara selektif melalui kebijakan subsidi atau operasi pasar untuk komoditas strategis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok; 2. Penguatan infrastruktur logistik untuk mengurangi hambatan distribusi; 3. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam menjaga stabilitas harga. 	<p>Dinas Perindagkop, BPPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas P2KP</p>

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<p>S41 Memperkuat Pendalaman Sektor Keuangan dan Intermediasi. Pendalaman sektor keuangan menunjukkan seberapa besar sektor keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah simpanan masyarakat dalam sistem keuangan formal dengan mendorong inklusi keuangan; 2. Mendorong investasi jangka panjang, termasuk penguatan dana pensiun dan instrumen investasi lainnya; 3. Meningkatkan akses kredit produktif bagi UMKM dan industri lokal melalui skema pembiayaan berbunga rendah; 4. Mendorong pasar modal daerah agar lebih aktif dengan memperkenalkan berbagai instrumen investasi seperti obligasi daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat regulasi keuangan daerah untuk mendukung stabilitas perbankan dan lembaga keuangan mikro; 2. Meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah; 3. Mendorong digitalisasi sektor keuangan guna memperluas jangkauan layanan keuangan. 	<p>BPPKAD, Dinas PTSP, Dinas Perindagkop</p>
				<p>S42 Meningkatkan Inklusi Keuangan (%). Inklusi keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses layanan keuangan digital melalui pengembangan fintech dan bank digital di daerah terpencil; 2. Memperkuat peran koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM; 3. Mendorong program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kebijakan bank inklusif yang mewajibkan bank untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah; 2. Meningkatkan kerja sama dengan fintech untuk mempercepat akses keuangan digital di daerah terpencil; 3. Mengembangkan skema kredit mikro berbunga rendah untuk mendukung UMKM dan wirausaha lokal. 	<p>Dinas Admindukcapil PMK, Dinas Sosial-P3A, Dinas P & K, Dinas Perindagkop, Dinas Kominfo</p>

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					4. Memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk masyarakat tidak terlayani (unbanked population) guna meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal.			
				S43	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Pendapatan daerah yang kuat akan mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program ekonomi yang berkelanjutan : 1. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 2. Ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya dengan memperluas basis pajak dari sektor-sektor potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital; 3. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang taat pajak; 4. Menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi baru sambil tetap menjaga keseimbangan pendapatan daerah.	1. Menyediakan kebijakan insentif bagi investasi di sektor unggulan yang dapat mendorong PDRB daerah; 2. Meningkatkan efisiensi tata kelola ekonomi daerah untuk mempercepat pertumbuhan usaha lokal; 3. Pembentukan Badan Udaha Milik daerah dalam hal mengelola Potensi Sumber daya Alam Provinsi Papua tengah 4. Memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola potensi ekonomi wilayah.	BPPKAD, Dinas Kominfostadi, Dinas Poraparkref, Dinas Perindagkop, Dinas PTSP	
M6: Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata, sehingga tercipta konektivitas antar masyarakat dan antar wilayah dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat integrasi antar wilayah, dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan Papua Tengah								
T9 : Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata								
M6	T9	S13	Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di papua Tengah	S43	Meningkatkan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Provinsi terhadap Nasional. Papua Tengah harus mendorong sektor unggulan di perkotaan dan	1. Mengalokasikan dana APBD dan kerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan hunian terjangkau;		Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas Poraparkref, Dinas

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					pedesaan agar berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional : 1. Pengembangan sektor industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan, dengan pendekatan hilirisasi; 2. Peningkatan daya saing sektor jasa dan pariwisata di kota dan desa untuk menarik lebih banyak investasi; 3. Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri, pusat logistik, dan pasar modern di kota dan desa; 4. Peningkatan konektivitas antara kota dan desa melalui jalur transportasi yang lebih efisien guna memperlancar distribusi hasil produksi.	2. Meningkatkan regulasi tata ruang agar pembangunan perumahan sesuai dengan prinsip keberlanjutan; 3. Memfasilitasi program CSR perusahaan untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu.	PTSP, Dinas P2KP, Dinas Nakertrans ESDA	
			S44	Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%). Hunian yang layak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong produktivitas ekonomi : 1. Program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah; 2. Penguatan skema kredit perumahan terjangkau, seperti KPR subsidi bagi masyarakat kurang mampu; 3. Peningkatan infrastruktur permukiman, termasuk penyediaan air bersih, listrik, dan sanitasi; 4. Pengembangan kota hijau dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang yang ramah penduduk.	1. Mengalokasikan dana APBD dan kerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan hunian terjangkau; 2. Meningkatkan regulasi tata ruang agar pembangunan perumahan sesuai dengan prinsip keberlanjutan; 3. Memfasilitasi program CSR perusahaan untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu. 4. Pembangunan Rumah Swadaya	Dinas LHK, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Nakertrans ESDA, BPPKAD		

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<p>S45 Meningkatkan Persentase Desa Mandiri. Desa mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan ekowisata; 2. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kemandirian desa; 3. Pengembangan infrastruktur desa, termasuk jalan desa, listrik, jaringan internet, dan air bersih untuk mendukung aktivitas ekonomi; 4. Peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan insentif bagi desa yang berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya; 2. Meningkatkan alokasi Dana Desa untuk program-program yang bersifat produktif; 3. Mendorong transformasi digital di desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. 4. Pengembangan Desa Wisata 5. Pengembangan Sarana Angkutan Perintis Laut, Darat, dan Udara 	<p>Dinas Kesehatan-P2KB, Dinas P & K, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas LHK, Dinas Perindagkop, Dinas Admindukcapil PMK, Dinas P2KP, Dinas Poraparkref, Dinas Perhubungan</p>
				<p>S46 Meningkatkan Persentase Mantap Jalan. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat mobilitas penduduk dan distribusi barang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, kabupaten, dan desa untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik; 2. Penggunaan teknologi jalan yang lebih tahan lama guna mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kualitas infrastruktur; 3. Peningkatan anggaran pembangunan jalan dari APBD, Dana Desa, dan kerja sama dengan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP); 4. Integrasi perencanaan infrastruktur jalan dengan pengembangan kawasan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan; 2. Mempercepat implementasi program pembangunan jalan di daerah terpencil dan pedesaan; 3. Memastikan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan agar lebih berkelanjutan. 4. Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas Jalan Wagate-Timika, Mulia-Sinak, Ilu-Mulia-Enarotali, Karubaga-Ilu-Mulia 	<p>Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas Poraparkref, BPPKAD, Dinas PUPR, Dinas PTSP, Dinas LHK, Dinas Admindukcapil PMK,</p>

Tujuan / Sasaran				Strategi				Arah Kebijakan				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					untuk memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.									
M7: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam Papua Tengah untuk generasi yang akan datang														
T10 : Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir														
M7	T10	S14	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah	S47	Meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana praktik ekonomi di daerah telah memperhitungkan keberlanjutan lingkungan : 1. Pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang lestari, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pertanian organik; 2. Penguatan kebijakan konservasi hutan dan ekosistem, dengan memanfaatkan skema karbon kredit dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan; 3. Meningkatkan peran UMKM hijau yang berfokus pada produk ramah lingkungan dan ekonomi sirkular (reduce, reuse, recycle); 4. Implementasi regulasi pembangunan rendah karbon, termasuk pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali; 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi.				1. Mengembangkan kebijakan fiskal hijau, seperti insentif pajak untuk industri hijau dan denda bagi perusahaan yang mencemari lingkungan; 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam menerapkan ekonomi hijau melalui perencanaan pembangunan berkelanjutan; 3. Mendorong kerja sama dengan lembaga internasional dan swasta dalam program investasi hijau. 4. Penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan 5. Penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat 6. Peningkatan fasilitas tempat pelelangan Ikan (TPI) 7. Pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>) 8. Penguatan kelembagaan ekonomi nelayan				Dinas Perindagkop, Dinas LHK, Dinas Kominfostadi, Dinas PUPR, Bapperida, Dinas P2KP, Dinas Poraparkref	

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						9. Hilirisasi produk akuakultur 10. Produk hilirisasi pangan hasil laut 11. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan		
			S48	Meningkatkan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer (%). Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah kunci utama dalam menurunkan emisi karbon dan menciptakan ketahanan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan : 1. Pengembangan energi surya, hidro, dan biomassa sebagai sumber energi utama di Papua Tengah, terutama untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional; 2. Mendorong penggunaan biodiesel dan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif bagi sektor transportasi dan industri; 3. Meningkatkan investasi dalam teknologi energi terbarukan, termasuk penelitian dan pengembangan (R&D) energi bersih; 4. Membangun infrastruktur energi hijau, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan; 5. Mendorong program konversi energi di sektor rumah tangga dan industri dari energi fosil ke energi hijau.	1. Menyusun regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan energi hijau dalam proyek-proyek pembangunan besar; 2. Memberikan insentif pajak dan subsidi bagi investasi di sektor energi terbarukan; 3. Mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi hijau melalui kebijakan energi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang; 4. Mendorong BUMD dan swasta untuk berinvestasi dalam proyek energi hijau melalui skema Public-Private Partnership (PPP).	Dinas Perindagkop, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas P2KP, Dinas Perhubungan, Bapperida		

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
M7	T10	S15	Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	S49	Meningkatkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah. Keanekaragaman hayati Papua Tengah yang kaya harus dikelola dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan : 1. Penguatan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem melalui penegakan hukum dan patroli hutan; 2. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan ekowisata; 3. Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui skema karbon kredit dan perhutanan sosial; 4. Kolaborasi dengan lembaga riset dan NGO dalam upaya pelestarian flora dan fauna khas Papua.	1. Menetapkan zonasi perlindungan dan restorasi ekosistem hutan serta perairan; 2. Memberikan insentif bagi industri yang menerapkan praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan; 3. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam pemantauan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal.	Dinas LHK, Bapperida, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas Poraparkref, Dinas P2KP, Dinas Admindukcapil PMK		
				S50	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat pencemaran air, udara, dan tanah di suatu wilayah : 1. Peningkatan pengawasan industri dan pertambangan untuk mengurangi pencemaran air dan tanah; 2. Penghijauan perkotaan dan restorasi ekosistem kritis, seperti hutan mangrove dan daerah aliran sungai (DAS); 3. Peningkatan program pengendalian polusi udara, termasuk regulasi terhadap emisi kendaraan dan industri; 4. Penyediaan sistem peringatan dini bencana lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor.	1. Menyusun regulasi daerah yang lebih ketat terhadap pencemaran lingkungan; 2. Mewajibkan industri untuk memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang transparan dan dapat dipantau masyarakat; 3. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas industri dan perkotaan. 4. Reklamasi Pasca Tambang	Dinas LHK, Dinas Kominfostadi, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas P2KP, Dinas Nakertrans ESDA		

Tujuan / Sasaran				Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				<p>S51 Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%). Sanitasi yang baik berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem sanitasi terpadu di permukiman dan pedesaan, seperti septic tank komunal dan pengolahan limbah domestik; 2. Program penyediaan air bersih dan sanitasi aman di sekolah serta fasilitas umum; 3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan dan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan fasilitas sanitasi di daerah yang belum memiliki akses memadai; 2. Mengintegrasikan program sanitasi dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 3. Menyediakan insentif bagi rumah tangga yang menerapkan sanitasi berbasis ekologi (eco-sanitation). 4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 	<p>Dinas Kesehatan-P2KB, Dinas Kominfostadi, Dinas Admindukcapil PMK, Dinas LHK, Bapperida, Dinas P & K, Dinas PUPR, BPBD</p>
				<p>S52 Meningkatkan Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan. Sampah yang tidak terkelola dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga harus dikelola dengan sistem yang baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, termasuk daur ulang dan pemanfaatan limbah organik; 2. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF) dan biogas; 3. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam investasi fasilitas pengolahan sampah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap kabupaten/kota memiliki fasilitas pengolahan sampah skala regional; 2. Memberikan insentif bagi industri yang menggunakan bahan baku dari limbah daur ulang. 	<p>Dinas Perindagkop, Dinas LHK, Dinas PTSP, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas Kominfostadi, Dinas PUPR, Bapperida</p>
				<p>S53 Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan layanan pengumpulan sampah berbasis komunitas, terutama di daerah terpencil; 2. Penerapan sistem retribusi sampah berbasis jumlah produksi limbah untuk mendorong masyarakat mengurangi sampah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pengumpulan sampah; 2. Mengembangkan regulasi daerah tentang pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga; 	<p>Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas Kominfostadi, Dinas Perhubungan, BPPKAD, Dinas Perindagkop, Dinas Admindukcapil PMK</p>

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					3. Penyediaan fasilitas dropbox sampah di titik-titik strategis perkotaan dan pedesaan.		3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.		
M7	T10	S16	Terwujudnya berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	S54	Ketahanan Energi : 1. Peningkatan akses listrik ke seluruh wilayah Papua Tengah, termasuk daerah pedalaman dan terpencil melalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan solusi energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Mikrohidro; 2. Diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti bioenergi, tenaga air, dan tenaga surya; 3. Peningkatan efisiensi energi dalam industri, rumah tangga, dan transportasi melalui penerapan teknologi hemat energi; 4. Mendorong investasi swasta dalam sektor energi hijau untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil; 5. Edukasi dan insentif penggunaan peralatan hemat energi di sektor industri dan rumah tangga.		1. Memperluas jaringan listrik ke daerah terpencil dengan memanfaatkan energi terbarukan; 2. Menerapkan regulasi efisiensi energi untuk sektor industri dan transportasi; 3. Memberikan insentif bagi investor dan masyarakat yang menggunakan energi bersih dan hemat energi.	Dinas Kominfo, Dinas Perindagkop, Dinas LHK, Dinas P & K, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	
				S55	Ketahanan Pangan : 1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dengan modernisasi alat pertanian dan pendampingan petani/peternak; 2. Diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan konsumsi pangan bergizi berbasis komoditas lokal seperti sagu, ubi-ubian, dan pisang; 3. Pengembangan rantai pasok pangan yang efisien dengan memperkuat infrastruktur		1. Mewujudkan Papua Tengah sebagai daerah mandiri pangan dengan optimalisasi potensi pertanian dan perikanan lokal; 2. Menyediakan program bantuan pangan bagi kelompok rentan serta edukasi gizi bagi masyarakat; 3. Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan agar harga tetap stabil dan terjangkau.	Dinas P2KP, Dinas Perindagkop, Dinas Sosial-P3A, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas P & K, Dinas Kesehatan-P2KB, Bapperida	

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					logistik dan penyimpanan hasil pertanian; 4. Meningkatkan ketahanan pangan berbasis komunitas dengan membangun lumbung pangan desa dan meningkatkan peran koperasi pangan; 5. Penyediaan subsidi dan insentif bagi petani dan nelayan untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka.	4. Optimalisasi Lahan Termasuk Revitalisasi Lahan rusak Menjadi Profuktif 5. Pengendalian Organime Penganggu Tumbuhan (OPT) tanaman 6. Fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani 7. Penyediaan Alat dan Mesin Pretanian Pra Panen 8. Pengembangan Model Percontohan Pertanian Modern 9. Peningkatan makanisasi Pertanian 10. Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian, Termasuk Digital Farming		
			S56	Ketahanan Air : 1. Penguatan infrastruktur air baku dan air bersih melalui pembangunan waduk, embung, dan sistem perpipaan yang efisien; 2. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan konservasi daerah aliran sungai (DAS) dan reboisasi kawasan hulu; 3. Peningkatan layanan akses air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM); 4. Penerapan teknologi pengolahan air modern seperti sistem filtrasi dan desalinasi untuk daerah pesisir; 5. Edukasi dan sosialisasi efisiensi penggunaan air di sektor rumah tangga dan industri.	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih di daerah yang masih memiliki akses terbatas; 2. Mewajibkan industri dan pertambangan untuk memiliki sistem pengolahan limbah air agar tidak mencemari sumber air bersih; 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air dan pemanfaatan teknologi hemat air.	Dinas LHK, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas PUPR, Dinas P2KP, Bapperida, BPBD,		